







BADAN POM

BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN

2025

LAPORAN TAHUNAN

INSPEKTORAT I

+ 6221 4227756

inspektorat1.pom.go.id

Gedung Mozaik Lantai 2

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan Inspektorat I Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun secara komprehensif sebagai salah satu wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025.

Pada tahun 2025, terdapat kondisi dinamis yang harus dihadapi oleh Inspektorat I mulai dari adanya kebijakan anggaran tingkat nasional pada awal tahun hingga masuknya CPNS dalam proporsi yang besar. Hal ini menyertai adalah peningkatan beban kerja serta kompleksnya permasalahan dalam pengawasan intern yang tentunya perlu diimbangi dengan adanya penguatan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang semakin profesional, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kerja sama dan koordinasi yang sinergis dengan berbagai pihak juga senantiasa dijalin, dibina, dan dikembangkan agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Inspektorat I pada khususnya dan Inspektorat Utama dalam perspektif yang lebih luas.

Dalam Laporan Tahunan ini disampaikan hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat I sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan tercapai kinerja yang telah direncanakan, mencakup kompilasi kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, program penjaminan mutu serta kegiatan pengawasan lainnya; program *consulting* yang meliputi kegiatan asistensi/bimbingan teknis dan workshop; serta program pengembangan kapasitas internal sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra pengawasan intern dan pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Muatan dari Laporan Tahunan ini menjadi wujud akuntabilitas pemenuhan *output* yang diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan dengan Inspektorat I sebagai pelaku utama maupun sebagai Unit Kerja Pendukung.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Inspektorat I dan Inspektorat Utama serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2025. Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya pengawasan intern.

Atas kerjasama semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Inspektur I,



Adam P.W.A Wibowo, SH. MH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
Daftar Gambar v
Daftar Tabel vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1. Gambaran Umum Inspektorat I 1
a. Tugas dan Fungsi 3
b. Struktur Organisasi 4
2. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Unit Kerja 6
BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA 11
1. Sumber Daya Manusia 11
2. Sarana dan Prasarana 21
3. Anggaran 23
4. Implementasi Pengarusutamaan Gender 26
BAB III HASIL KEGIATAN 31
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I 31
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien. 74
3. Terwujudnya Organisasi Inspektorat I yang Profesional 99
BAB IV PENUTUP 112
LAMPIRAN 113

Daftar Gambar

Gambar 1. Sejarah Badan Pengawas Obat dan Makanan 2
Gambar 2. Struktur Organisasi BPOM 5
Gambar 3. Struktur Kelembagaan Inspektorat I 5
Gambar 4. Perbandingan Proporsi Generasi di Inspektorat I..... 12
Gambar 5. Tangkapan Layar SIRENSDM 17
Gambar 6. Persentase Pegawai Inspektorat I yang Telah Mengikuti Pelatihan (Data SIASN Desember 2025) 20
Gambar 7. Kegiatan Verifikasi Lapangan Penilaian WBK pada Balai POM di Ambon. 33
Gambar 9. Kegiatan Verifikasi Lapangan Penilaian WBK pada Balai POM di Batam.. 34
Gambar 10. Kegiatan Verifikasi Lapangan Penilaian WBBM pada Balai Besar POM di Manado 34
Gambar 11. Kegiatan Verifikasi Lapangan Penilaian WBBM pada Balai Besar POM di Semarang 35
Gambar 12. Pleno Hasil Penilaian Unit Kerja Menuju WBK secara Mandiri di Lingkungan BPOM Tahun 2025 36
Gambar 13. Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, serta Pelayanan Publik yang Prima 38
Gambar 14. Koordinasi Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tahun 2024..... 40
Gambar 15. Desk Evaluasi SAKIP Tahun 2025 pada Sekretariat Utama BPOM 47
Gambar 16. Kegiatan Sosialisasi di Pontianak dan Mamuju..... 50
Gambar 17. Kegiatan Sosialisasi di Biro Hukum dan Organisasi serta Direktorat SPO 51
Gambar 18. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Pemeriksaan di Payakumbuh, Ambon, dan Medan 56
Gambar 19. Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025 58
Gambar 20. Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025 59
Gambar 21. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK periode Semester I tahun 2025 62
Gambar 22. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK periode Semester II tahun 2025 63
Gambar 23. Ilustrasi tentang Island of Integrity 65
Gambar 24. Penandatanganan Komitmen Pembangunan ZI 66
Gambar 25. Kegiatan Evaluasi Internal Triwulan IV 2024 pada Januari 2025..... 70
Gambar 26. Asistensi dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK pada Balai POM di Payakumbuh 79
Gambar 27. Asistensi dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK pada Balai POM di Payakumbuh 80
Gambar 28. Asistensi dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK pada Balai POM di Ambon..... 80

Gambar 29. Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025 86
Gambar 30. Ilustrasi Kapabilitas APIP Model Terbaru.....101
Gambar 31. Ilustrasi Penelitian AI Readiness.....106

Daftar Tabel

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat I 17
Tabel 2. BMN di Inspektorat I 22
Tabel 3. Realisasi Anggaran 23
Tabel 4. Implementasi PUG di Persiapan Masuk CPNS 29
Tabel 5. Rincian Kegiatan Terkait WBK dan/atau WBBM 33
Tabel 6. Kegiatan terkait Manajemen Risiko 40
Tabel 7. Kegiatan terkait Anti Korupsi 49
Tabel 8. Kegiatan Perjalanan Dinas Dukungan Administrasi Pengawasan 68
Tabel 9. Rincian Kegiatan Pimpinan 76
Tabel 10. Rincian Pelaksanaan Audit 92
Tabel 11. Rincian Pelaksanaan Audit Kinerja Program 93

BADAN POM












IMPLEMENTASI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK)
di Lingkungan Badan POM
dalam Rangka Benchmarking
Kementerian Luar Negeri

BADAN POM






KEPALA BADAN POM RI

BADAN POM









BAB I
PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum Inspektorat I

Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik fundamental dalam sejarah tata negara Indonesia yang mengakhiri era sentralisasi pada Orde Baru. Gerakan ini dipicu oleh tuntutan masyarakat untuk menjadi lebih demokratis. Momentum ini menuntut pergeseran peran pemerintah dari sekadar pengendali menjadi pelayan masyarakat, yang sekaligus membuka jalan bagi restrukturisasi hubungan pusat dan daerah guna memastikan pelayanan publik yang lebih responsif dan efektif yang akarnya dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi tonggak penerapan Otonomi Daerah di Indonesia.

Implementasi Undang-Undang tersebut telah menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu bidang pemerintahan yang wajib dikelola oleh daerah. Berbagai dinamika yang terjadi pada regulasi tentang otonomi daerah tidak mengubah kondisi tersebut. Pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan absolut diatur terbatas pada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Kesehatan bersama-sama dengan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, hingga sosial menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dengan demikian, Kementerian Kesehatan tidak lagi memiliki Kantor Wilayah (Kanwil) layaknya Kementerian Keuangan maupun Kementerian Agama. Dinas Kesehatan baik di provinsi maupun kabupaten/kota menjadi perangkat dari kepala daerah. Kementerian Kesehatan sendiri untuk fungsi-fungsi tertentu masih memiliki perangkat di daerah, antara lain seperti Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balai Litbangkes) di Magelang, Banjarnegara, Donggala, Aceh, Baturaja, Tanah Bumbu, serta Papua. Akan tetapi, secara umum, Kementerian Kesehatan fokus pada kebijakan sementara layanan kepada publik menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan di daerah.

Sebagai tindak lanjut UU Nomor 22 Tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 yang kemudian diteruskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). Regulasi ini berlaku untuk lebih dari 20 LPND antara lain Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam perjalanannya kemudian, masing-masing LPND yang berada dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tersebut memperoleh dasar hukum yang lebih kuat, seperti LAN dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2013, BPKP dengan Perpres Nomor 192 Tahun 2014, hingga BPOM dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017.

BPOM sendiri pada mulanya adalah salah satu Direktorat Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang dalam koridor sentralisasi memiliki perangkat di daerah berupa Balai Besar maupun Balai Pengawas Obat dan Makanan. Keppres 166/2000 dan peraturan-peraturan berikutnya hingga Perpres Nomor 80 Tahun 2017 memberi ruang kepada BPOM untuk menjadi institusi tersendiri.



Gambar 1. Sejarah Badan Pengawas Obat dan Makanan

Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi BPOM, terdapat kebutuhan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. BPOM dengan fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dipandang perlu untuk didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Perpres Nomor 80 Tahun 2017 hadir atas dasar pertimbangan tersebut. Salah satu perubahan yang ada pada Perpres tersebut adalah transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama. Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan sistem anggaran berbasis kinerja yang selalu diperbaharui secara dinamis melalui adanya Peraturan Pemerintah mengharuskan Instansi Pemerintah, termasuk BPOM, untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja pada akhir tahun, serta menyusun Laporan Tahunan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Laporan Tahunan 2025 Inspektorat I BPOM adalah sarana komunikasi dan informasi bentuk pertanggungjawaban administratif yang dibuat setahun sekali di akhir tahun anggaran. Laporan tahunan ini mencerminkan alur kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dalam mengawal tugas dan fungsi Badan POM. Dalam proses pelaksanaan tugas yang diemban, Inspektorat I terbuka terhadap masukan dan saran dari seluruh anggota organisasi maupun pihak terkait untuk kesempurnaan kinerja.

a. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022, Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat I sebagai struktur di

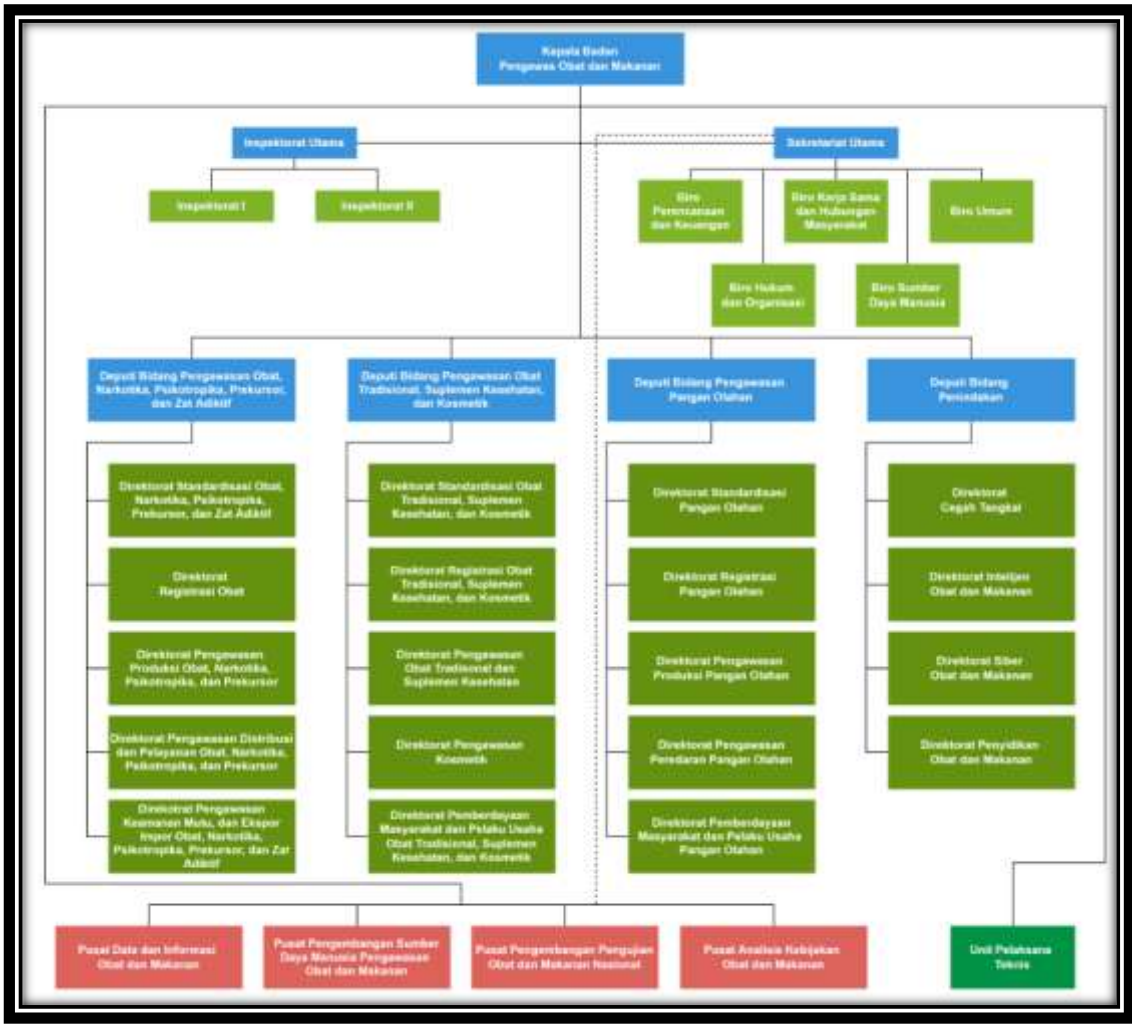
bawah Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan; penyusunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan administrasi Inspektorat I. Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan POM pada wilayah pengawasan Inspektorat I sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.7.11.21.458 Tahun 2021 Tentang Satuan Kerja dan Wilayah Pengawasan Intern Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022, Inspektorat Utama BPOM secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM sebagaimana ditampilkan pada **Gambar 2**.

Inspektorat Utama sebagai salah satu perubahan besar yang terjadi melalui Perpres Nomor 80 Tahun 2017 dipimpin oleh seorang Inspektur Utama pada level Eselon I. Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM terdiri dari 2 Unit Eselon II yakni Inspektorat I dan Inspektorat II. Sebagai elemen pendukung, terdapat Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama pada level Eselon III.

Sesuai dengan Reformasi Birokrasi sejak 2019 yang menekankan tentang *delayering* maka Inspektorat Utama secara umum maupun Inspektorat I pada khususnya mengedepankan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional, khususnya Jabatan Fungsional Auditor. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat I adalah sebagaimana **Gambar 3**.



Gambar 2. Struktur Organisasi BPOM



Gambar 3. Struktur Kelembagaan Inspektorat I

Pada tahun 2024, terdapat perubahan kepemimpinan baik di level BPOM maupun di level Inspektorat Utama dengan dilantiknya Prof. dr. Taruna Ikrar,

M.Biomed, PhD. sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Yan Setiadi, Ak., M.B.A. sebagai Inspektur Utama pada bulan Agustus 2024. Kepemimpinan tersebut terus berlanjut pada tahun 2025.

2. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi Unit Kerja

Pada periode Perencanaan Strategis 2025-2029, Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai entitas pemerintah memiliki Visi, Misi, dan Budaya Organisasi. Visi untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera**: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing

produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Adapun rumusan Misi pada Perencanaan Strategis adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**

   Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**

   BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan**

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

1. Profesional: Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas: Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
3. Kredibilitas: Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim: Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif: Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap : Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Inspektorat Utama dan Inspektorat I juga mengimplementasikan *Core Values* ASN yakni BerAKHLAK. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core Values* ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tagar #banggamelayanibangsa sebagai pemutakhiran dari employer branding ASN sebelumnya, yaitu melayani dengan sepenuh hati.

Core values ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, "ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai *core values* yang sama."

BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detail dari nilai-nilai tersebut adalah:

1. Berorientasi Pelayanan: memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel: Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten: Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis: Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal: Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif: Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.
7. Kolaboratif: Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Branding ini menunjukkan bahwa ASN adalah profesi yang bangga dalam melayani bangsa. Profesi ASN patut dibanggakan karena ASN diberi pengakuan dan penghargaan yang adil, diberi kesempatan meningkatkan kompetensi seluas-luasnya, dan diberi kesempatan terbuka untuk berkarir.

Dengan kebanggaan tersebut, diharapkan ASN juga harus mampu menyeimbangkan harapan dan ekspektasi organisasi terhadap dirinya, dengan terus meningkatkan kinerja secara terus menerus, selalu belajar untuk meningkatkan kapasitas, dan menyesuaikan perilaku dengan *core values*.

BAB II
PENGELOLAAN SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

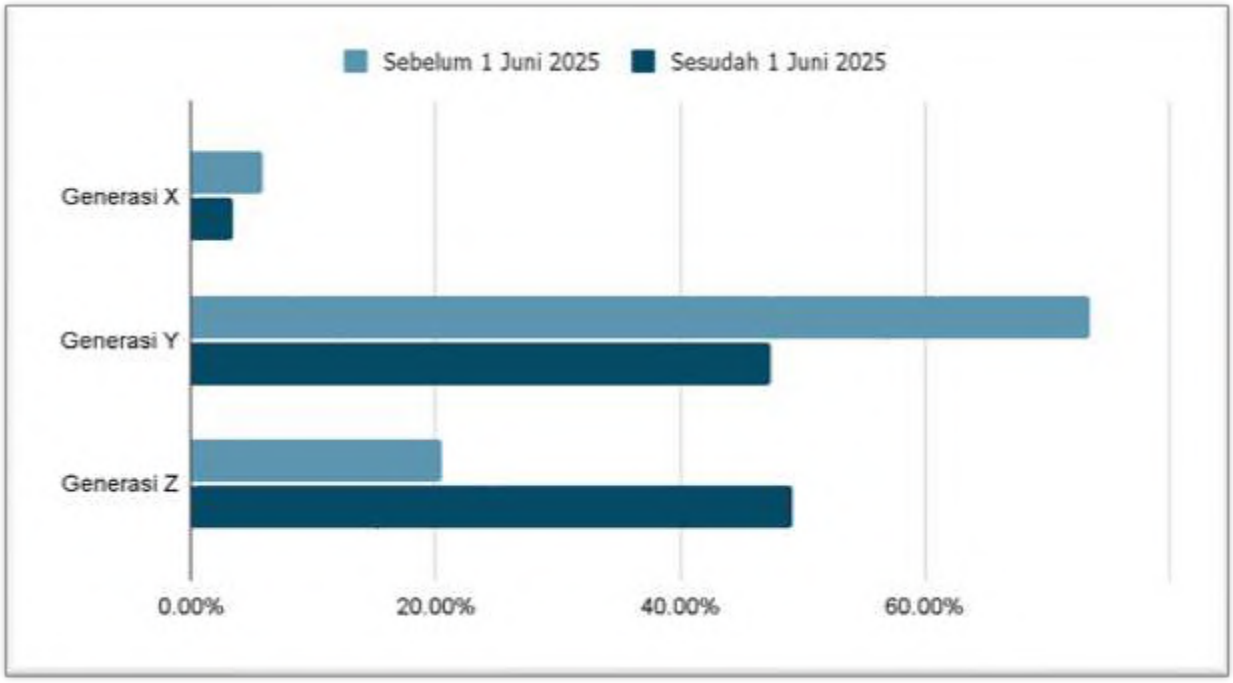
a. Data Kepegawaian

Guna mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama BPOM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Sebagaimana dipaparkan pada Laporan Tahunan TA 2024, pada periode tersebut terdapat pengurangan pegawai yang mengubah susunan pegawai di Inspektorat I dari 1 (satu) Inspektur, 4 (empat) Auditor Madya, 6 (enam) Auditor Muda dengan 1 diantaranya non-aktif karena tengah Tugas Belajar dan kembali bekerja per 1 Januari 2024, 12 (dua belas) Auditor Pertama, 6 (enam) PNS Pelaksana, 4 (empat) CPNS calon Auditor, 1 (satu) Arsiparis Terampil, 2 (dua) Pranata Keuangan APBN Terampil, serta 3 (tiga) PPNPN menjadi 1 (satu) Inspektur, 3 (tiga) Auditor Madya, 6 (enam) Auditor Muda, 16 (enam belas) Auditor Pertama, 1 (satu) PNS Pelaksana, 4 (empat) Auditor Terampil, 1 (satu) Arsiparis Terampil, 2 (dua) Pranata Keuangan APBN Terampil, serta 3 (tiga) PPNPN. Pada bulan November 2024, terdapat 1 (satu) orang pegawai yang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) dengan periode pengajuan awal 3 tahun.

Pada tahun 2025, terdapat perubahan kebijakan sehingga PPNPN dengan posisi pengemudi berubah status menjadi Tenaga Alih Daya. Adapun PPNPN secara umum juga beralih status melalui mekanisme yang ada menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada bulan Juni 2025, sebanyak 24 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bergabung ke Inspektorat I sesuai hasil rekrutmen pada akhir tahun 2024. Pada tahun 2025 juga terdapat Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan 1 orang Auditor Muda menjadi Auditor Madya dan 3 orang Auditor Pertama menjadi Auditor Muda sehingga secara umum proporsi pegawai menjadi 1 (satu) Inspektur, 4 (empat) Auditor Madya, 8 (delapan) Auditor Muda, 12 (dua belas) Auditor Pertama karena 1 (satu) orang berstatus CLTN, 1 (satu)

PNS Pelaksana, 4 (empat) Auditor Terampil, 1 (satu) Arsiparis Terampil, 2 (dua) Pranata Keuangan APBN Terampil, 21 (dua puluh satu) CPNS Auditor Pertama, 3 (tiga) CPNS Auditor Terampil, serta 2 (dua) PPPK, dan 1 (satu) tenaga alih daya.

Personil di Inspektorat I yang pada periode sampai dengan 2024 didominasi oleh Generasi Milenial hingga 73,5% secara resmi berubah. Sebagaimana ditampilkan pada **Gambar 4** dengan masuknya 24 orang CPNS pada 1 Juni 2025, maka sesuai Dashboard DEX pada SIASN terdapat 49,15% (29 orang) Generasi Z, diikuti oleh 47,46% (28 orang) Generasi Milenial, dan tetap ada 2 orang Generasi X.



Gambar 4. Perbandingan Proporsi Generasi di Inspektorat I

Gambaran ini menjadi relevan dengan transformasi wajah birokrasi Indonesia dan sektor publik dunia yang tidak lagi menyoal perubahan teknologi atau regulasi, melainkan perubahan demografis yang jauh lebih fundamental. Kedua kelompok generasi yang mendominasi di Inspektorat I pada dasarnya membawa nilai, perilaku, dan ekspektasi yang berbeda secara signifikan dari generasi pendahulu, yakni Generasi X dan *Baby Boomers*, yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung institusi publik.

Sebagaimana diketahui bahwa Generasi Y tumbuh di era transisi dari dunia analog menuju digital. Generasi milenial tumbuh di dunia yang belum mengenal internet secara luas sehingga merekalah generasi pertama yang mengenal internet sejak usia muda, merasakan revolusi telepon genggam, dan menyaksikan transformasi besar dalam cara manusia berkomunikasi dan bekerja. Sementara itu, Generasi Z adalah generasi pertama yang benar-benar lahir sebagai *digital native*—sejak kecil sudah akrab dengan layar sentuh, media sosial, dan kecerdasan buatan. Perbedaan konteks pertumbuhan inilah yang membentuk mentalitas, etos kerja, serta harapan mereka terhadap dunia kerja, termasuk sektor publik.

Fenomena di Inspektorat I sejalan dengan tren nasional bahwa sektor publik didominasi oleh generasi yang menginginkan dashboard digital, transparansi data, dan lingkungan kerja yang fleksibel. Memahami karakteristik, kekuatan, dan kelemahan masing-masing generasi ini menjadi kebutuhan strategis dalam manajemen sumber daya manusia pemerintahan.

Generasi Y atau Milenial memasuki dunia kerja sektor publik dengan membawa semangat yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya. Mereka cenderung mencari makna dalam pekerjaan. Dalam konteks sektor publik, hal ini menjadi keunggulan tersendiri ketika motivasi untuk melayani masyarakat dan berkontribusi pada kepentingan umum terasa lebih natural bagi generasi ini dibandingkan generasi yang sebelumnya lebih terdorong oleh stabilitas dan senioritas. Pada sisi lain, Generasi Y dikenal sebagai generasi yang kritis dan berani menyuarakan pendapat. Mereka tidak segan mempertanyakan prosedur birokrasi yang dianggap tidak efisien atau tidak relevan. Mereka juga lebih adaptif terhadap teknologi dibandingkan Generasi X, meski tidak sepenuhnya tumbuh bersama teknologi seperti Generasi Z. Kemampuan mereka beradaptasi di tengah perubahan menjadi aset berharga, terutama ketika pemerintah mendorong digitalisasi layanan publik secara masif. Generasi Y juga membawa serta sejumlah tantangan manajerial. Mereka cenderung kurang sabar terhadap hierarki kaku yang

masih banyak dijumpai di institusi pemerintahan. Loyalitas mereka lebih condong kepada nilai dan misi organisasi daripada kepada institusi itu sendiri, sehingga *turnover intention* menjadi isu yang perlu dicermati walaupun sejauh ini belum terdapat isu tersebut di Inspektorat I.

Generasi Z sebagai pendatang terbaru di sektor publik membawa dinamika yang lebih segar sekaligus lebih kompleks. Sebagai generasi yang tumbuh dengan media sosial sebagai media komunikasi utama, Generasi Z memiliki kemampuan digital yang luar biasa. Mereka terbiasa memproses banyak informasi secara cepat, bernavigasi di berbagai platform digital secara simultan, dan merespons perubahan dengan kecepatan yang menakjubkan.

Dalam konteks sektor publik, Generasi Z membawa perspektif kesadaran sosial yang tinggi. Isu-isu seperti keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan inklusi menjadi bagian dari identitas dan prinsip hidup yang mereka bawa ke dalam ruang kerja. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat modern terhadap pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Generasi Z cenderung menjadi agen perubahan organik yang mendorong institusi publik untuk bergerak lebih cepat menuju tata kelola yang lebih baik.

Di sisi lain, Generasi Z menunjukkan preferensi yang kuat terhadap fleksibilitas kerja. Pengalaman pandemi COVID-19, yang menjadi bagian dari *formative years* banyak Gen Z, telah meneguhkan keyakinan mereka bahwa pekerjaan tidak harus terikat pada lokasi fisik atau jam kerja yang kaku. Di sektor publik yang masih banyak mengoperasikan sistem presensi manual dan budaya kerja yang sangat prosedural, preferensi ini bisa menjadi sumber friksi. Namun di saat yang sama, preferensi inilah yang mendorong institusi pemerintahan untuk mempercepat reformasi birokrasi berbasis digital.

Salah satu perbedaan paling mencolok antara Generasi Y dan Z adalah sumber motivasi mereka. Generasi Y cenderung termotivasi oleh tujuan

besar yang mereka yakini bisa mereka capai melalui pekerjaan mereka. Mereka ingin merasa bahwa kontribusi mereka membuat perbedaan nyata. Di sektor publik, ini termanifestasi dalam semangat reformasi birokrasi yang tinggi dan keterlibatan aktif dalam program-program inovatif pemerintah.

Generasi Z memiliki motivasi yang lebih pragmatis tanpa kehilangan idealisme. Mereka sangat sadar akan kondisi ekonomi yang tidak menentu—banyak dari mereka menyaksikan orang tua mereka berjuang saat krisis finansial. Akibatnya, mereka menginginkan stabilitas finansial yang jelas, namun tetap memiliki ambisi untuk memberi dampak sosial yang berarti. Di sektor publik, kombinasi ini menjadikan mereka pekerja yang unik: idealistis dalam nilai, namun realistis dalam ekspektasi.

Dalam hal teknologi, Generasi Y adalah adopter yang aktif—mereka mempelajari teknologi baru dengan cepat dan menggunakannya untuk meningkatkan produktivitas. Namun, mereka masih mengingat era pra-digital sehingga memiliki kemampuan untuk memahami konteks penggunaan teknologi secara lebih luas. Generasi Z tidak pernah mengenal dunia tanpa internet. Teknologi bagi mereka bukan sekadar alat, melainkan ekstensi dari diri mereka. Implikasinya di sektor publik cukup signifikan: Generasi Z lebih cepat frustasi dengan sistem teknologi yang usang atau prosedur digital yang tidak intuitif.

Generasi Y menyukai kolaborasi dan cenderung bekerja baik dalam tim lintas fungsi. Mereka menghargai komunikasi yang terbuka dan egaliter, meski masih bisa beradaptasi dengan struktur hierarki formal jika diperlukan. Generasi Z lebih menyukai komunikasi yang singkat, langsung, dan berbasis pesan teks—sebuah refleksi dari kebiasaan mereka berkomunikasi melalui platform chat dan media sosial. Dalam lingkungan birokrasi yang sering masih mengandalkan rapat panjang dan surat memorandum formal, gaya komunikasi ini kadang menimbulkan kesalahpahaman antargenerasi.

Kehadiran Generasi Y dan Z secara bersamaan di sektor publik dan menunjukkan dominasi yang sama di Inspektorat I sesungguhnya membuka peluang transformasi yang luar biasa. Potensi akselerasi digitalisasi layanan publik menjadi sangat besar. Kedua generasi ini memiliki literasi digital yang tinggi dan secara alami mendorong adopsi teknologi dalam setiap proses kerja. Mulai dari *e-government*, sistem pelayanan berbasis aplikasi, hingga penggunaan analitik data dalam pengambilan keputusan kebijakan—semua ini menjadi lebih mudah diimplementasikan ketika digerakkan oleh pegawai yang memahami dan mengadopsi teknologi secara organik.

Sektor publik—dalam hal ini Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan—dapat memanfaatkan kesadaran sosial yang tinggi dari kedua generasi ini untuk mendorong program-program yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua generasi dominan ini lebih peka terhadap isu-isu seperti kesetaraan gender dalam rekrutmen ASN, pelayanan publik yang ramah disabilitas, dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Ketika nilai-nilai ini terinternalisasi dalam budaya organisasi pemerintahan, hasilnya adalah kebijakan publik yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kebutuhan nyata warga.

Transfer pengetahuan antar generasi menjadi peluang emas. Generasi Y yang sudah cukup senior kini berada di posisi manajerial menengah seperti Ketua Tim, sementara Generasi Z baru memasuki jalur karir awal. Kolaborasi antara kedua kelompok ini, dengan supervisi dari Generasi X yang masih memegang posisi pimpinan, bisa menciptakan ekosistem organisasi yang kaya perspektif. Mentoring dua arah dengan senior mengajarkan kebijaksanaan institusional dan junior mengajarkan keterampilan digital—berpotensi menjadi model pengembangan SDM yang sangat efektif di era reformasi birokrasi.

Dari segi latar belakang pendidikan–yang notabene merupakan pengukuran untuk Indeks Profesionalitas ASN–sebaran personil di Inspektorat I adalah sebagaimana **Tabel 1**.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat I

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
S3	0 orang
S2	4 orang
Profesi Apoteker	4 orang
D4/S1	41 orang
D3	10 orang

b. Kebutuhan Pegawai

Dengan bergabungnya 24 CPNS pada 1 Juni 2025 berikut 2 orang PPPK, maka pemenuhan kebutuhan pegawai di Inspektorat I berada di level tertinggi dibandingkan periode sebelumnya yakni mencapai 81,08%.



No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
7	Auditor Ahli Madya	12	Fungsional	5	4	1	80%
8	Auditor Ahli Muda	10	Fungsional	16	7	9	43.75%
9	Auditor Ahli Pertama	8	Fungsional	32	34	-2	106.25%
10	Auditor Mahir	7	Fungsional	5	0	5	0%
11	Auditor Penyelia	9	Fungsional	5	0	5	0%
12	Auditor Terampil	6	Fungsional	5	7	-2	140%

Gambar 5. Tangkapan Layar SIRENSDM

Adapun pada Januari 2026, 1 orang Auditor Ahli Madya Inspektorat I pindah ke Balai Besar POM di Yogyakarta sebagai Penata Layanan Operasional sehingga jumlah pegawai di level tersebut menurun ke 3 orang. Dengan kondisi saat ini, terdapat kelebihan pemenuhan di Auditor Ahli Pertama dan Auditor Terampil, namun demikian jumlahnya telah sesuai dengan proyeksi pemenuhan jabatan di atasnya. Sejumlah Auditor Pertama dalam proses

menuju Auditor Muda dan 3 orang Auditor Terampil tengah menempuh pendidikan untuk *eligible* pada jabatan Auditor Pertama.

c. Peningkatan Kompetensi SDM

ASN merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagai pelayan masyarakat sekaligus pelaksana kebijakan negara dan terutama di APIP sebagai *trusted advisor*, kualitas ASN secara langsung menentukan mutu layanan publik dan efektivitas pembangunan nasional. Dalam konteks birokrasi modern yang terus berkembang, pengembangan kompetensi ASN bukan sekadar program rutin, melainkan sebuah investasi strategis yang menopang daya saing bangsa di kancah global.

ASN di Inspektorat I merupakan bagian dari enam juta ASN yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Besarnya jumlah ini sekaligus mencerminkan tantangan besar dalam memastikan setiap aparatur memiliki kompetensi yang memadai, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Transformasi digital, perubahan regulasi yang dinamis, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi menjadikan pengembangan kompetensi sebagai agenda yang tidak bisa ditunda-tunda.

Upaya pengembangan kompetensi ASN kini dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah membawa dampak signifikan terhadap alokasi anggaran pelatihan dan pengembangan SDM aparatur.

Pengembangan kompetensi ASN memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara secara eksplisit mengamanatkan bahwa setiap pegawai berhak mendapatkan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun. Amanat ini mencerminkan kesadaran pembuat undang-undang bahwa kompetensi

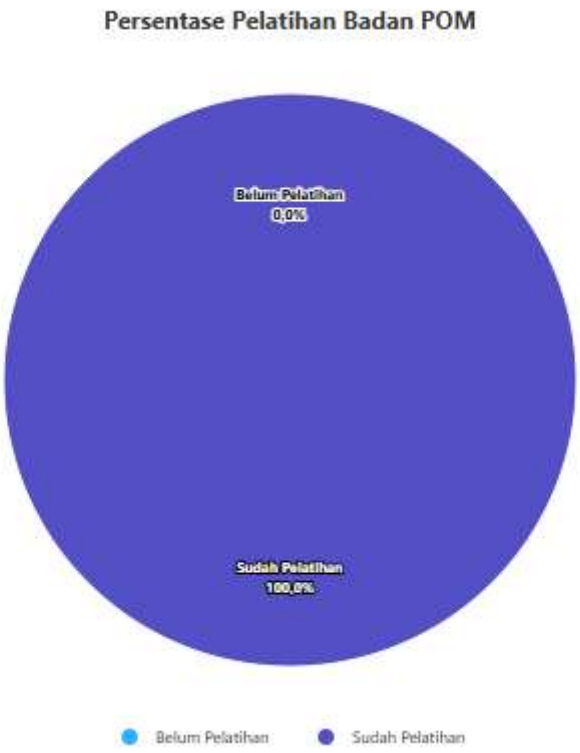
adalah prasyarat mutlak bagi terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.

Kompetensi ASN mencakup tiga dimensi utama: kompetensi teknis yang berkaitan dengan penguasaan bidang tugas, kompetensi manajerial yang meliputi kemampuan kepemimpinan dan pengelolaan organisasi, serta kompetensi sosial kultural yang mencerminkan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Ketiga dimensi ini harus dikembangkan secara seimbang agar ASN mampu tampil sebagai aparatur yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga peka terhadap dinamika sosial di tengah masyarakat.

Era transformasi digital semakin memperjelas urgensi pengembangan kompetensi. Digitalisasi layanan publik, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), hingga pemanfaatan kecerdasan buatan dalam proses pengambilan keputusan menuntut ASN untuk terus meningkatkan literasi digital mereka. ASN yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi berpotensi menjadi hambatan, bukan pendorong, bagi kemajuan layanan publik.

Salah satu inovasi penting dalam pengembangan kompetensi ASN adalah penerapan pendekatan pembelajaran mandiri berbasis teknologi atau e-learning. Melalui platform seperti Learning Management System (LMS) yang dikembangkan oleh PPSDM POM dengan IDEAS maupun platform lain di seperti di Kementerian Keuangan, LKPP, hingga KPK, ASN di Inspektorat I dapat mengakses materi pelatihan secara fleksibel tanpa harus meninggalkan tugas pokok mereka. Pendekatan ini terbukti efisien dari sisi biaya dan waktu, sekaligus memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan individu.

Secara total untuk di Inspektorat I, seluruh pegawai telah melakukan pengembangan kompetensi sebagaimana terekam di SIASN dengan total 27.902 JP namun dengan mayoritas merupakan JP dari CPNS yang dalam kurikulum orientasi serta Latsar penuh dengan pengembangan kompetensi.



Gambar 6. Persentase Pegawai Inspektorat I yang Telah Mengikuti Pelatihan (Data SIASN Desember 2025)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang ditandatangani pada Januari 2025, menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja negara secara signifikan. Instruksi ini menargetkan penghematan anggaran dalam jumlah besar demi menjaga kesehatan fiskal nasional, termasuk memangkas pos-pos belanja yang dianggap kurang prioritas atau dapat dioptimalkan. Salah satu dampak paling terasa dari Inpres 1/2025 adalah pemangkasan anggaran untuk kegiatan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan SDM aparatur. Di berbagai instansi, anggaran pelatihan dipotong hingga 50 persen atau bahkan lebih. Hal ini terjadi pula di Inspektorat I yang kemudian mengubah skema pelatihan tatap muka ke daring serta mengoptimalkan platform-platform tidak berbayar lainnya.Semangat efisiensi sejati diuji: bukan sekadar memotong program, melainkan menemukan cara-cara baru yang lebih cerdas untuk tetap memastikan pertumbuhan kompetensi ASN.

Terlepas dari tekanan Inpres 1/2025, pengembangan kompetensi ASN tetap harus dipandang sebagai prioritas yang tidak boleh dikorbankan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa investasi dalam kapasitas sumber daya manusia aparatur adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kualitas tata kelola yang baik. Pemangkasan anggaran pelatihan yang berlebihan dapat menghemat biaya dalam jangka pendek, namun berpotensi menciptakan defisit kompetensi yang jauh lebih mahal untuk diperbaiki di masa depan sehingga diperlukan cara-cara inovatif untuk menyikapinya.

Tantangan utama ke depan adalah membangun model pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, inklusif, dan tidak terlalu bergantung pada anggaran besar. Pemanfaatan teknologi secara maksimal, kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dan lembaga swasta, serta penguatan ekosistem pembelajaran organisasi di dalam instansi merupakan beberapa solusi yang perlu dipercepat implementasinya.

Peluang besar juga terbuka melalui kolaborasi lintas instansi. Dengan berbagi sumber daya pelatihan, fasilitator, dan modul pembelajaran, instansi-instansi pemerintah dapat menekan biaya pelatihan tanpa mengurangi kualitas. Konsep *corporate university* berbasis kluster instansi, di mana beberapa kementerian atau lembaga serumpun berbagi infrastruktur pelatihan, dapat menjadi solusi jangka menengah yang layak untuk dieksplorasi lebih serius. Dalam hal ini, Inspektorat Utama BPOM mengacu pada Corpu yang telah dibangun di BPOM dan juga di BPKP sebagai instansi pembina JFA.

Rekap lengkap pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh seluruh pegawai di Inspektorat I menjadi bagian dari **Lampiran 2** laporan ini.

2. Sarana dan Prasarana

Perkembangan sarana kerja di Inspektorat Utama secara umum dapat dilihat pada **Lampiran 1**. Adapun khusus di Inspektorat I, rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. BMN di Inspektorat I

Lokasi	Nama Barang	Jumlah
Ruang Inspektur I	Kursi Besi/Metal	2 unit
	Sice	2 unit
	Meja Makan Kayu	1 unit
	Lemari Es	1 unit
	Dispenser	1 unit
	Televisi	1 unit
	Air Cleaner	1 unit
	Coffee Maker	1 unit
	P.C. Unit	1 unit
	Camera Conference	1 unit
Ruang Dalnis A	Kursi Besi/Metal	3 unit
	Printer	1 unit
	P.C. Unit	1 unit
	Speaker Komputer	1 unit
	Meja Kerja Kayu	1 unit
	Meja Kerja Kayu	1 unit
Ruang Dalnis B	Kursi Besi/Metal	2 unit
	Meja Kerja Kayu	2 unit
	P.C. Unit	1 unit
Ruang Dalnis C	Kursi Besi/Metal	3 unit
	Meja Kerja Kayu	1 unit
	P.C. Unit	1 unit
Ruang Kerja Inspektorat I	P.C. Unit	4 unit
	Printer	4 unit
	Kursi Besi/Metal	27 unit
	Meja Kerja Kayu	40 unit
	Partisi Meja Kerja Kayu	19 unit
	Dispenser	3 unit
Ruang Konsultasi Inspektorat I	Meja Kerja Kayu	1 unit
	Lemari Kayu	1 Unit
	Printer	2 Unit
	Lemari Besi/Metal	1 Unit
Ruang Rapat Atas	Lemari Kayu	1 unit
	Kursi Besi/Metal	6 unit
Ruang Rapat Bawah	Kursi Besi/Metal	11 unit
	Coffee Maker	1 unit
	Meja Rapat	1 unit
Ruang Tata Usaha Inspektorat I	Lemari Besi/Metal	6 unit
	P.C. Unit	4 unit
	Kursi Besi/Metal	9 unit
	Alat Penghancur Kertas	2 unit
	Meja Kerja Kayu	9 unit
	Brankas	1 unit

Lokasi	Nama Barang	Jumlah
	LCD Projector/Infocus	4 unit
	Camera Digital	1 unit
	Lightweight Concrete Test Hammer	1 unit
	Printer	7 unit
	Lemari Kayu	1 unit
	Voice Recorder	2 unit
	Oven Listrik	1 unit
	Camera Conference	1 unit
	Mesin Penghitung Uang	1 unit

3. Anggaran

a. Realisasi Anggaran

Dalam semangat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Inspektorat I tetap melaksanakan kegiatan seesuai dengan perencaaan melalui penyesuaian skema. Adapun realisasi anggaran ditampilkan pada **Tabel 3.**

Tabel 3. Realisasi Anggaran

Indikator		Kode	Kegiatan	DIPA	Anggaran yang Dapat digunakan	Realisasi	Capaian Realisasi
1.1	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	EBA.960.005D	Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan/atau WBBM	118,332,000	87,439,000	87,438,862	100%
		EBA.960.005E	Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima	64,575,000		0	
		EBA.960.005F	Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja	21,600,000		0	
1.2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	EBA.960.005A	Bimbingan Teknis Manajemen Risiko	31,523,000		0	
		EBA.960.005C	Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor	8,584,000	8,584,000	8,583,286	99.99%

Indikator		Kode	Kegiatan	DIPA	Anggaran yang Dapat digunakan	Realisasi	Capaian Realisasi
			Internal				
		EBA.960.005G	Desk Maturitas Manajemen Risiko	21,600,000		0	
1.3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	EBA.960.005L	Evaluasi SAKIP	20,445,000		0	
1.4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	EBA.960.005B	Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM	31,118,000		0	
		EBA.960.005H	Sosialisasi SK LHKAN dan Bimtek Fasilitasi LHKAN	41,490,000		0	
1.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	EBA.960.005J	Pendampingan Pemeriksaan BPK	292,685,000	188,810,000	188,808,469	100%
		EBA.960.005K	Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK	21,600,000		0	
1.6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	EBA.960.005O	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	251,660,000	164,101,000	164,095,825	100%
1.7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	EBA.960.005N	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	756,000	756,000	756,000	100%
1.8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	EBA.960.005Z	Blokir Inpres 1 2025	582,061,000		0	
1.9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I						
2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan	EBD.965.052B	Reviu (LK, BMN, dan PIPK)	28,040,000	0	0	

Indikator		Kode	Kegiatan	DIPA	Anggaran yang Dapat digunakan	Realisasi	Capaian Realisasi
	intern Inspektorat I	EBD.965.051F	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	121,186,000	49.606.000	49,605,395	100%
		EBD.965.051B	Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	30,600,000		0	
		EBD.965.051C	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	249,510,000	8,722,000	8,722,000	100%
		EBD.965.051A	Reviu RKAKL	39,256,000		0	
		EBD.965.051D	Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I	151,384,000	103,491,000	103,489,210	100%
2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	EBD.965.053A	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	7,015,000		0	
		EBD.965.052A	Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	838,803,000	319,406,000	319,405,007	100%
		EBD.965.053C	Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I				
2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	EBD.965.053F	Pembahasan Layanan Konsultansi Pengawasan Intern	7,697,000	7,697,000	7,696,920	100%
2.4	Persentase pengaduan	EBD.965.053B	Audit Tujuan Tertentu	81,105,000	0	0	

Indikator		Kode	Kegiatan	DIPA	Anggaran yang Dapat digunakan	Realisasi	Capaian Realisasi
	wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	EBD.965.053E	Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan				
3.1	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	EBD.961.051B	Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	28,096,000	11,169,000	11.168.175	99,99%
3.2	Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat I	EBD.961.051A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	18,400,000	18,400,000	18,400,000	100%

b. Penerimaan PNBP

Pada unit kerja Inspektorat I tidak ada penerimaan PNBP.

4. Implementasi Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) atau dikenal secara internasional sebagai *Gender Equality and Social Inclusion* (GEDSI) diselenggarakan dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Untuk di BPOM, pedoman pelaksanaannya termaktub pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, serta Surat Keputusan perihal Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS 2025-2029.

Tujuan paling mendasar dari PUGIS adalah memastikan bahwa setiap individu di dalam unit pengawasan memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara terhadap sumber daya organisasi. Dalam konteks pengawasan intern, hal ini berarti bahwa baik auditor laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang

sama dalam penugasan audit yang menantang, misalnya audit investigatif atau audit di daerah terpencil. Setiap auditor juga memiliki kesempatan yang sama dalam Pengembangan Karir sehingga tidak ada *glass ceiling* yang seringkali menghambat perempuan atau kelompok penyandang disabilitas untuk mencapai posisi yang baik. Selain itu, PUGIS juga merupakan penciptaan ruang kerja yang inklusif, termasuk penyediaan fasilitas yang mendukung dan kebijakan yang mencegah pelecehan seksual atau diskriminasi.

Pengawasan intern pada dasarnya berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen. Jika auditor hanya terdiri dari satu kelompok homogen, maka sudut pandang dalam melihat masalah akan sangat terbatas. Dengan implementasi PUGIS, unit pengawasan dapat mengidentifikasi risiko yang terabaikan. Auditor yang sensitif gender akan mampu melihat apakah sebuah program pemerintah memberikan dampak negatif yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Auditor juga mampu mendeteksi dampak pada kelompok rentan karena tanpa perspektif inklusi sosial, auditor mungkin luput melihat bahwa sebuah kebijakan justru memutus akses bagi kalangan tertentu. Terakhir, implementasi PUGIS mendorong pengumpulan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kategori sosial lainnya, sehingga temuan audit menjadi lebih akurat dan berbasis fakta yang mendalam.

Dalam standar internasional seperti *The Institute of Internal Auditors* (IIA), profesionalisme auditor juga diukur dari kemampuannya menjunjung tinggi etika dan keadilan. PUGIS membantu unit kerja mencapai level maturitas organisasi yang lebih tinggi.

Di Inspektorat I, fungsi penggerak PUGIS ditanamkan di Agen Perubahan dengan harapan personil yang telah memiliki kapasitas perubahan dapat mendorong implementasi yang memadai di unit kerja. Langkah ini bukan sekadar pemenuhan struktur organisasi, melainkan sebuah ikhtiar strategis untuk melembagakan perspektif gender dalam esensi pengawasan.

Inspektorat I sejauh ini belum sepenuhnya memasukkan kesetaraan gender sebagai prioritas dalam agenda pengawasan mengingat pada tahun 2025 isu

utamanya adalah terkait Program Prioritas Presiden. Namun demikian, esensi kesetaraan gender telah menjadi komitmen dalam penugasan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) serta dokumen turunan di Inspektorat I didorong untuk mengintegrasikan dimensi gender. Dalam kondisi BPOM yang proporsi perempuan lebih besar, esensi kesetaraan dibangun dengan tidak membeda-bedakan mitra berdasarkan gender.

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, penguatan kelembagaan dilakukan dengan integrasi ke Agen Perubahan sebagai pusat kendali untuk mengkoordinasikan seluruh upaya percepatan kesetaraan gender di internal organisasi.

Kapasitas Auditor terkait gender juga diperkuat dengan menggunakan sumber pelatihan yang relevan dan terjangkau di era Inpres 1 Tahun 2025 dengan harapan terbentuk SDM pengawasan yang memiliki ketajaman analisis gender dan kepekaan sosial, sehingga mampu mendeteksi isu-isu ketimpangan dalam setiap obyek pengawasan.

Data Terpilah untuk pengawasan belum menjadi bagian dari Kertas Kerja pada 2025 namun telah menjadi program untuk tahun 2026. Adapun Data Terpilah yang dimiliki adalah terkait peserta rapat karena penerapan dimulai di fungsi dukungan.

Dalam penyusunan anggaran, Inspektorat I berkomitmen mengimplementasikan alat analisis formal untuk memastikan setiap program pengawasan telah melalui pemindaian gender untuk menjamin akuntabilitas anggaran yang responsif gender. RO yang dibahas dalam Laporan Tahunan ini mendapat penandaan Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah terkait Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien.

Implementasi PUG di Inspektorat I yang paling terencana adalah dalam konteks penerimaan CPNS. Dalam hal pembagian alokasi Tim Kerja, telah dilakukan pembagian berbasis kesetaraan gender. Namun demikian, mengingat proporsi CPNS perempuan lebih banyak, maka pendekatan yang dilakukan juga turut menyesuaikan. Sebagai gambaran, untuk CPNS laki-laki dibagi adil ke seluruh Tim Kerja. Elemen usia juga dipertimbangkan, demikian pula status pernikahan untuk

tidak menempatkan pegawai-pegawai yang memiliki kondisi serupa di dalam satu Tim Kerja. Selain itu pada tahun 2025, salah satu CPNS masuk dari formasi disabilitas. Untuk itu, penempatan meja juga disesuaikan dengan posisi terdekat dari pintu.

Tabel 4. Implementasi PUG di Persiapan Masuk CPNS

Nama	Keterangan		L/P	Umur
Natasya Adelia Zehra	S1 Teknik Sipil	66.121	P	25.18
Daniel Saito Batubara	D3 Teknik Sipil	45.6	L	26.88
Rina Dewi Oviliana	S1 Akuntansi, Internal Audit PT PAL	71.164	P	25.77
Annisa Wulandari	S1 Hukum, Formasi Kalimantan	50.73	P	23.45
Rana Syifa Medinda	S1 Akuntansi, Profesi Akuntan	64.546	P	25.74
Stella Aprilenia Endes	S1 Akuntansi, Chartered Accountant	67.486	P	25.02
Nadhida Sekar Rahmadhani	D3 Akuntansi, paling muda	54.541	P	22.42
Yasmin Said Latulanit	S1 Akuntansi, pengalaman akuntan	64.008	P	31.01
Chelly Aprilia Wardhani	S1 Akuntansi	65.68	P	26.05
Ikhsana Cesarda Rosydanti	S1 Akuntansi, UGM	67.881	P	25.12
Aliyana Salma Nafisya	D4 Akuntansi Sektor Publik, UGM	64.812	P	22.92
Ertiza Auli Alghani	S1 Akuntansi, paling senior kedua (32)	68.29	P	32.76
Muhammad Ilham Utama	S1 Akuntansi	71.658	L	25.70
Dean Bermana Karosekali	S1 Akuntansi, Risk Management di Indomaret	65.139	L	26.55
Alya Dini Nabila Rachmawati	S1 Akuntansi, Assurance Senior di EY	70.959	P	25.70
Izzati Karna Wastitya	S1 Akuntansi, salah satu yg paling muda	70.024	P	22.91
Sifa Fauzi	S1 Akuntansi	72.541	P	24.08
Ricoriady Simamora	S1 Hukum	70.478	L	24.20
Ditha Rizki Lestari	S1 Akuntansi, paling senior (34)	68.876	P	34.88
Rahajeng Anindyajati	S1 Akuntansi, UII	75.424	P	25.51
Aisyah Salsabila Lubis	S1 Akuntansi, UGM	72.171	P	25.67
Emiya Ibrena Br Sembiring	D3 Statistik	54.532	P	24.62
Rayhan Anandra Kurnia	S1 Administrasi Publik, Konsultan Pajak	67.93	L	22.58
Maria Dewi Maharani	S1 Akuntansi	77.798	P	25.00

Terkait disabilitas, Inspektorat I mengalami kondisi ruangan di lantai 2 tanpa adanya lift atau akses satu-satunya adalah tangga. Untuk CPNS yang masuk dari formasi disabilitas telah diidentifikasi dapat naik tangga 2 kali untuk bekerja

sehingga satu-satunya pendekatan yang bisa dilakukan adalah penempatan meja kerja.

BAB III
HASIL KEGIATAN

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I

a. Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM

Indikator ini merupakan indikator yang mengukur keberhasilan Pembangunan zona integritas yang diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Tujuan utama dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam mekanisme Pembangunan zona integritas, Untuk dinilai mampu mendapat predikat WBK/WBBM, instansi pemerintah terlebih dahulu perlu memastikan terlaksananya pembangunan Zona Integritas dengan baik. Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat beberapa tahapan yang perlu menjadi perhatian instansi dan unit kerja sebelum dilakukan penilaian/evaluasi secara internal dan pengusulan kepada TPN. Tahap Pembangunan zona integritas adalah pencanangan zona integritas, penetapan zona integritas, Pembangunan unit kerja, pemantauan Pembangunan zona

integritas.

Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian target sebagai berikut:

Semula			Menjadi			Justifikasi
Sasaran Kegiatan	**Indikator**	**Target 2025**	**Sasaran Kegiatan**	**Indikator**	**Target 2025**	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas	73,7%	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas **Unit Kerja BPOM**	**62,86%**	**Indikator:** Penyesuaian nomenklatur dengan penjelasan spesifik pembangunan zona integritas yang dimaksud pada Unit Kerja BPOM **Target:** Adanya penyesuaian target dengan adanya pemutakhiran definisi operasional IKU. Semula keberhasilan tingkat pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM memperhitungkan WBK dan WBBM, menjadi hanya memperhitungkan WBBM saja

Dari target di atas, capaian indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian di Tahun 2025
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	62,86%	33,33%	53,02%

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1) Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan/atau WBBM

Pencapaian predikat WBK dan/atau WBBM didukung oleh pengisian Lembar Kerja Evaluasi yang mengacu kepada ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Upaya pengisian dan analisis kesesuaian Lembar Kerja Evaluasi dengan data dukung yang disampaikan memerlukan intervensi dari APIP. Anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp87.439.000,00 dengan serapan sebesar Rp87.438.862,00 (99.9998%).

Untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dari hasil pembangunan ZI dari unit kerja, maka diperlukan kegiatan verifikasi lapangan baik

penilaian WBBM oleh TPN dari Kementerian PANRB dan penilaian WBK oleh TPI dari BPOM. Rincian Kegiatan Verifikasi Lapangan Penilaian WBK/WBBM Tahun 2025 dilakukan dengan rincian sebagaimana dinyatakan pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Rincian Kegiatan Terkait WBK dan/atau WBBM

No	Unit Kerja	Tanggal
1	Balai POM di Ambon	14-16 Juli 2025
2	Balai Besar POM di Jayapura	28-30 Juli 2025
3	Balai POM di Mamuju	4-6 Agustus 2025
4	Balai Besar POM di Serang	7-9 Agustus 2025
5	Balai POM di Batam	19-21 Agustus 2025
6	Balai Besar POM di Manado	14-16 September 2025
7	Balai Besar POM di Semarang	2-4 September 2025



Gambar 7. Kegiatan Verifikasi Lapangan Penilaian WBK pada Balai POM di Ambon



Gambar 8. Kegiatan Verifikasi Lapangan Penilaian WBK pada Balai POM di Batam



Gambar 9. Kegiatan Verifikasi Lapangan Penilaian WBBM pada Balai Besar POM di Manado



Gambar 10. Kegiatan Verifikasi Lapangan Penilaian WBBM pada Balai Besar POM di Semarang

Sebagai bagian dari pelaksanaan evaluasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dilakukan kegiatan pleno hasil penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan. Hasil pelaksanaan pleno tersebut telah dilaporkan melalui Surat Dinas Inspektur Utama Nomor BPI.06.06.7.10.25.344 tanggal 7 Oktober 2025 perihal Penyampaian Hasil Pelaksanaan Pleno Hasil Penilaian Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri di Lingkungan BPOM Tahun 2025. Pleno dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 2 Oktober 2025 dan diperoleh hasil:

a. Unit Kerja untuk diajukan predikat Menuju WBK
    1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
    2. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
    3. Balai Besar POM di Palembang
    4. Balai Besar POM di Serang
    5. Balai Besar POM di Jayapura
    6. Balai POM di Jambi

7. Balai POM di Batam
8. Balai POM di Mamuju

b. Unit Kerja untuk diajukan predikat Menuju WBBM
   1. Direktorat Pengawasan Kosmetik
   2. Balai Besar POM di Banda Aceh
   3. Balai Besar POM di Jakarta
   4. Balai Besar POM di Semarang
   5. Balai Besar POM di Mataram
   6. Balai Besar POM di Manado



Gambar 11. Pleno Hasil Penilaian Unit Kerja Menuju WBK secara Mandiri di Lingkungan BPOM Tahun 2025

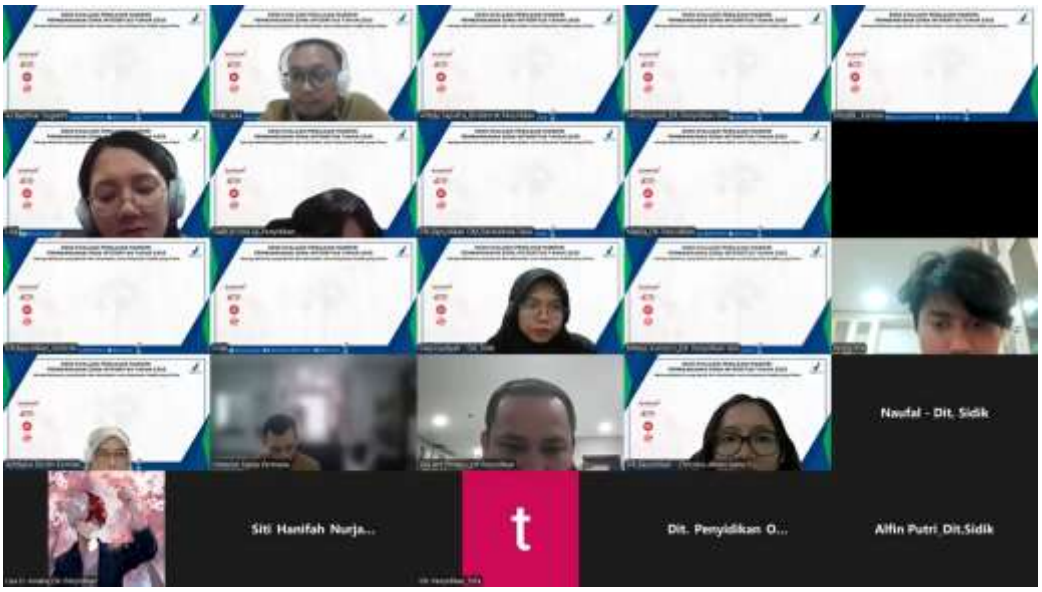
2) Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Pelayanan Publik yang Prima, dan Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No 90 serta Pedoman ZI Badan POM Bagi Seluruh Unit Kerja

Pembangunan Zona Integritas di BPOM pada tahun 2025 diselenggarakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan sosialisasi Peraturan Menteri PANRB No.90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 25 Februari 2025 secara daring melalui *zoom Meeting*. Kemudian Unit Kerja melakukan pengisian dan penilaian mandiri (*self assessment*) pada Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas sesuai ketentuan dari Kementerian PANRB yang selanjutnya dilakukan evaluasi melalui kegiatan *desk* secara daring.

Kegiatan *Desk* dilakukan terhadap 75 (tujuh puluh lima) Unit Kerja baik yang MS berdasarkan hasil pra evaluasi maupun yang TMS dengan metode wawancara untuk menilai Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan data dukung yang disampaikan Unit kerja. Output dari kegiatan ini berupa penyesuaian Lembar Kerja Evaluasi sesuai dengan hasil *desk* yang berkontribusi terhadap perolehan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) pada masing-masing Unit Kerja baik pada Unit Kerja Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada level Balai Besar dan Balai POM.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan dokumen lain yang menyertai, maka kegiatan ini termasuk yang menjadi elemen penyesuaian sehingga kegiatan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan dengan skema daring sepenuhnya.



Gambar 12. Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, serta Pelayanan Publik yang Prima

b. Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi BPOM

SPIP merupakan serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

Pada tahun 2025 tidak terdapat penyesuaian target, sehingga capaian indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian di Tahun 2025
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,2	4,16	99,06%

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1) Bimbingan Teknis Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung penguatan penerapan manajemen risiko di lingkungan BPOM, Inspektorat I melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan *refreshment* terkait penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari upaya pembinaan kepada unit kerja. Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko merupakan salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman unit kerja dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif. Melalui kegiatan ini, unit kerja memperoleh penguatan terkait konsep, prinsip, serta tahapan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko diberikan kepada unit kerja di lingkungan BPOM yang mengajukan permohonan bimtek atau pendampingan kepada Inspektorat I, maupun kepada unit kerja yang berdasarkan hasil evaluasi penerapan manajemen risiko pada tahun sebelumnya memerlukan peningkatan pemahaman serta penguatan implementasi manajemen risiko. Pada tahun 2025, telah dilakukan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko sesuai dinyatakan pada **Tabel 6**.

Tabel 6. Kegiatan terkait Manajemen Risiko

No.	Unit Kerja	Tanggal Kegiatan
1	Pusat Data dan Informasi Obat Dan Makanan	12 Februari 2025
2	Balai Besar POM di Serang	18 Februari 2025
3	Balai POM di Ambon	20 Februari 2025
4	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	21 Maret 2025
5	Loka POM di Rejang Lebong	04 Juli 2025
6	Refreshment Implementasi Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM pada 7 Unit Pelaksana Teknis Mitra Pengawasan Inspektorat I (BBPOM di Medan, BBPOM di Semarang, Balai POM di Surakarta, Balai POM di Payakumbuh, Balai POM di Bau Bau, Loka POM di Kepulauan Sangihe, Loka POM di Kabupaten Sambas)	17 Juli 2025
7	Balai POM di Mamuju	3 September 2025
8	Loka POM di Buleleng	18 Desember 2025
9	Balai POM di Bengkulu	22 Desember 2025



Gambar 13. Koordinasi Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tahun 2024

Output dari kegiatan ini berupa Laporan Hasil Bimbingan Teknis (Bimtek) yang memuat berbagai informasi terkait pelaksanaan kegiatan, antara

lain hasil *pre-test* dan *post-test* seluruh peserta, nilai tingkat maturitas, catatan atas kelemahan yang teridentifikasi, serta hasil diskusi dan rekomendasi terkait implementasi manajemen risiko pada masing-masing unit kerja.

Adapun seluruh Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada tahun 2025 dilakukan tanpa anggaran melalui mekanisme daring maupun undangan dari unit kerja di pusat.

2) Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal

Dalam proses penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D), BPOM telah mendukung pencapaian tujuan K/L/D sesuai mandat yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern, BPOM selalu berkomitmen mencapai tujuan pengendalian tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola serta melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2025, telah dilakukan kegiatan terkait SPIP pada Balai Besar POM di Denpasar. Kegiatan dilakukan tanggal 22-23 Oktober 2025 yang bertempat di Aula Balai Besar POM di Denpasar oleh BPKP, tim Inspektorat I dan Inspektorat II selaku tim Penjaminan Kualitas serta Biro Hukum dan Organisasi selaku Sekretariat PM SPIPT BPOM. Kegiatan

hari pertama dimulai dengan pembukaan oleh Kepala Balai Besar POM di Denpasar, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, dan Auditor Muda BPKP. kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh Kepala Balai Besar POM di Denpasar terkait profil balai yang meliputi *catchment area* pengawasan, jumlah SDM, penyelenggaraan SPIP, aspek positif, capaian kinerja, dan bentuk kerja sama dengan stakeholder/pemerintah daerah. Kegiatan hari kedua terdiri dari diskusi lanjutan terkait sub unsur pada kertas kerja evaluasi SPIPT dan observasi terhadap aset yang dilakukan pada laboratorium, gudang reagensia dan gudang arsip. Beberapa poin diskusi antara lain:

a. *Improvement* atas implementasi SPIP yang telah dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Denpasar;
b. Kebijakan dan implementasi pemberian *reward and punishment* terkait penegakan integritas dan nilai etika;
c. Rencana dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai;
d. Perencanaan dan monitoring kinerja;
e. Tindakan pengamanan aset yang telah dilaksanakan;
f. Anggaran pemeliharaan aset;
g. Alur pengujian pihak ketiga;
h. Reviu indikator kinerja sehubungan penetapan Rancangan Strategis BPOM yang baru ditetapkan;
i. Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK.

Anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp8.584.000,00 dengan serapan sebesar Rp8.583.286,00 (99.9917%) yang seluruhnya digunakan untuk Perjalanan Dinas.

3) Desk Maturitas Manajemen Risiko

Kegiatan Desk Maturitas Manajemen Risiko merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran BPOM sebagaimana diharapkan. Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan SPIP adalah penilaian risiko.

Proses penilaian risiko di lingkungan BPOM telah diatur dalam kebijakan internal terkait manajemen risiko melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM. Inspektorat Utama menyelenggarakan Desk maturitas manajemen risiko mengacu pada Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM. Desk Maturitas Manajemen Risiko dilaksanakan terhadap seluruh Satuan Kerja Eselon I, Unit Kerja Pusat, Balai Besar/Balai POM, dan Loka POM.

Kegiatan dilakukan pada tanggal 04 s.d 21 November 2025 berdasarkan Nota Dinas Inspektur Utama Nomor B-PI.06.07.7.10.25.360 tentang Undangan Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025 di Lingkungan BPOM dan sepenuhnya dilakukan secara daring. Berdasarkan kegiatan desk maturitas manajemen risiko yang dilaksanakan, diperoleh nilai rata-rata maturitas manajemen risiko seluruh unit kerja tahun 2025 adalah 2,875 (*risk aware*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Rata-rata nilai Satuan Kerja Eselon 1 sebesar 3,094 (*risk defined*)
2. Rata-rata nilai Unit Kerja Pusat sebesar 3,205 (*risk defined*)
3. Rata-rata nilai Balai Besar POM sebesar 2,974 (*risk aware*)
4. Rata-rata nilai Balai POM sebesar 2,814 (*risk aware*)
5. Rata-rata nilai UPT di lingkungan PPPOMN sebesar 1,948 (*risk naive*)
6. Rata-rata nilai Loka POM sebesar 2,491 (*risk aware*)

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan dokumen lain yang menyertai, kegiatan ini termasuk yang menjadi elemen penyesuaian sehingga dilaksanakan dengan skema daring sepenuhnya.

c. Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Indikator ini merupakan indikator yang mengukur Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran

dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result-oriented government). Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat 4 (empat) komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 30); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25). Inspektorat I berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Inspektorat I bertanggung jawab untuk mengawal keberhasilan pencapaian target Nilai Evaluasi akuntabilitas kinerja internal Badan POM.

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian target sebagai berikut:

Semula			Menjadi			Justifikasi
Sasaran Kegiatan	**Indikator**	**Target 2025**	**Sasaran Kegiatan**	**Indikator**	**Target 2025**	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,73	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	**20,75**	**Target:** Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2024

Dari target di atas, capaian indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian di Tahun 2025
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,75	20,69	99,71%

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1) Evaluasi SAKIP

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi atas seluruh kegiatan dalam mencapai target sasaran kinerja. Kriteria penilaian evaluasi SAKIP berdasarkan pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM dengan terdapat perubahan sesuai Surat Edaran Inspektur Utama Nomor PI.04.7.08.25.03 Tahun 2025. Evaluasi SAKIP bertujuan untuk:

a) Memperoleh informasi implementasi SAKIP

   Evaluasi memberikan informasi tentang berbagai aspek implementasi SAKIP, seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

b) Menilai tingkat implementasi dan akuntabilitas kinerja

Evaluasi menilai sejauh mana instansi pemerintah telah mengimplementasikan SAKIP dan bagaimana kinerja mereka berdampak pada pencapaian tujuan.

c) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
Evaluasi memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP dan kinerja instansi pemerintah.

d) Memonitor tindak lanjut rekomendasi
Evaluasi memastikan bahwa rekomendasi dari evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti dan berdampak pada peningkatan implementasi SAKIP dan kinerja.

Kegiatan evaluasi SAKIP Tahun 2025 dilakukan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama:

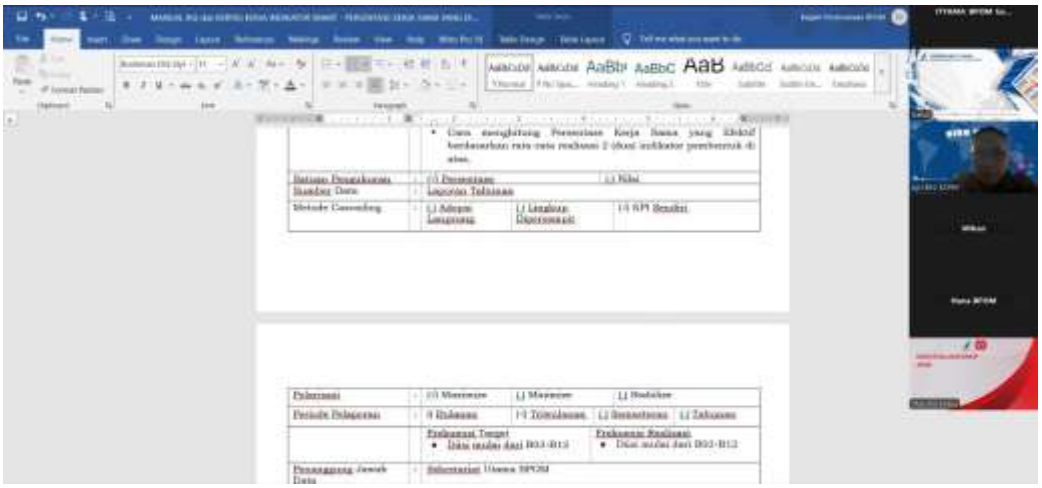
1. Nomor PI.04.7.07.25.136 tanggal 30 Juli 2025 untuk Melaksanakan Desk Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM TA 2025;
2. Nomor PI.04.7.09.25.166 tanggal 8 September 2025 untuk Melaksanakan diskusi panel atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM TA 2025 dan Melaksanakan penyusunan laporan hasil SAKIP di Lingkungan BPOM TA 2025; dan
3. Nomor PI.04.7.10.25.191 tanggal 10 Oktober 2025 untuk Perpanjangan waktu dalam melaksanakan penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP di Lingkungan BPOM TA 2025. dan sepenuhnya dilakukan secara daring.

Hasil dari kegiatan evaluasi SAKIP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Utama telah melaksanakan desk evaluasi SAKIP tahun 2025 terhadap 83 Satuan Kerja di lingkungan BPOM yang terdiri dari 6 (enam) Satuan Kerja Eselon I, 4 (empat) Satuan Kerja Eselon II Mandiri Pusat, 42 Balai/Balai Besar POM dan 31 Loka POM.
2. Ruang Lingkup evaluasi SAKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan

kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas output maupun outcome termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja.

3. Evaluasi SAKIP dilaksanakan melalui proses pengumpulan, analisis, interpretasi data dan informasi sehingga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
4. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh simpulan bahwa secara keseluruhan rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 adalah 78,48%, jika dibandingkan dengan rata-rata nilai hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dengan rata-rata nilai 78,99%, disimpulkan bahwa rata-rata nilai hasil evaluasi mengalami penurunan sebesar 0,51%. Hal utama yang menyebabkan nilai hasil evaluasi mengalami penurunan adalah menurunnya capaian kinerja *output* dan *outcome* pada sebagian besar Satker di Lingkungan BPOM.



Gambar 14. Desk Evaluasi SAKIP Tahun 2025 pada Sekretariat Utama BPOM

Adapun seluruh Evaluasi SAKIP pada tahun 2025 dilakukan tanpa menggunakan anggaran atau diselesaikan secara daring maupun dengan mekanisme lainnya karena sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan dokumen lain yang menyertai, kegiatan ini termasuk yang menjadi elemen penyesuaian sehingga dilaksanakan dengan skema daring sepenuhnya.

d. Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM

Survei Penilaian Integritas merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan instansi. Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing instansi serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. SPI hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga (eksternal), dan dari kalangan ahli (eksper). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut. Adapun penilaian SPI meliputi transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas,pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), trading in influence (intervensi eksternal untuk pemberian izin/rekomendasi teknis), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi.

Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian target sebagai berikut:

Semula			**Menjadi**			**Justifikasi**
Sasaran Kegiatan	**Indikator**	**Target 2025**	**Sasaran Kegiatan**	**Indikator**	**Target 2025**	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	**84,48**	**Target:** Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2024

Dari target di atas, capaian indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	**Indikator**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**Capaian di Tahun 2025**
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,48	80,03	94,73%

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1) Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM

Sebagai lembaga pemerintah yang berperan penting dalam pengawasan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki komitmen kuat dalam membangun integritas dan mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan kerja. Program Anti Korupsi BPOM merupakan implementasi dari kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi. Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM yang dilakukan oleh Inspektorat I merupakan salah satu langkah strategi pemberantasan korupsi yaitu edukasi dan kampanye dengan memberikan pembelajaran Pendidikan antikorupsi. Materi yang disampaikan pada Sosialisasi Program anti korupsi meliputi pengantar korupsi, komitmen integritas, survei penilaian integritas (SPI), benturan kepentingan (COI), *Whistleblowing System* (WBS), gratifikasi.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan dokumen lain yang menyertai, kegiatan ini termasuk yang menjadi elemen penyesuaian sehingga dilaksanakan dengan skema daring sepenuhnya.

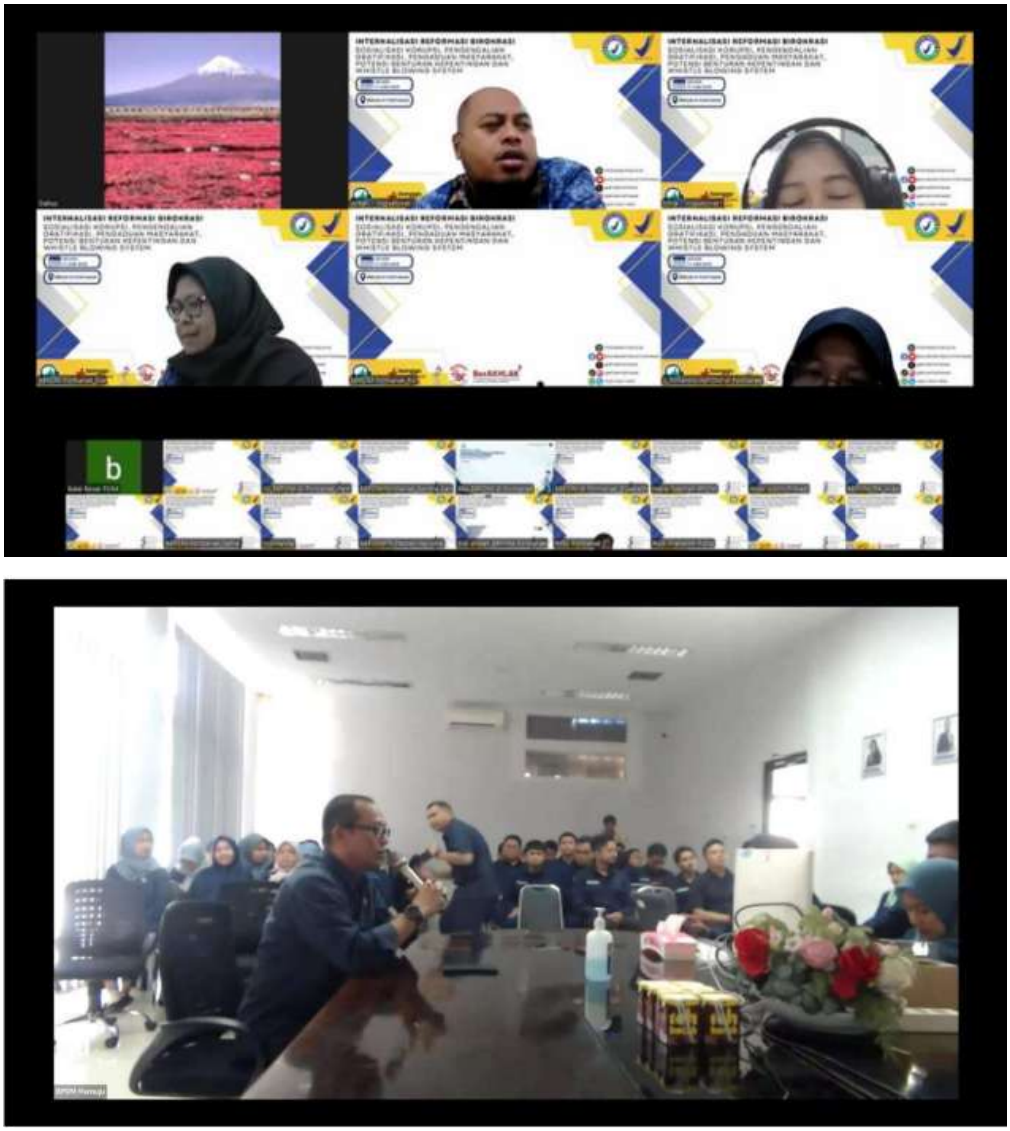
Kegiatan sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM dilaksanakan secara daring

dan dilakukan oleh personil pada Tim Gugus Tugas 5. Rincian kegiatan sosialisasi program anti korupsi yang dilakukan selama Tahun 2025 dijelaskan pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Kegiatan terkait Anti Korupsi

No	Unit Kerja	Tanggal Kegiatan
1	Balai Besar POM di Samarinda	19 Mei 2025
2	Balai Besar POM di Pontianak	17 Juni 2025
3	Balai POM di Mamuju	21 Juli 2025
4	Biro Hukum dan Organisasi	6 - 7 Agustus 2025

No	Unit Kerja	Tanggal Kegiatan
5	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	21 Agustus 2025



Gambar 15. Kegiatan Sosialisasi di Pontianak dan Mamuju



Gambar 16. Kegiatan Sosialisasi di Biro Hukum dan Organisasi serta Direktorat SPO

Output dari kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi ini berupa Laporan Hasil Bimbingan Teknis (Bimtek) yang memuat berbagai informasi terkait pelaksanaan kegiatan, antara lain dokumentasi kegiatan, tanya jawab dengan peserta, hasil pre-test dan post-test seluruh peserta. Adapun seluruh kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi pada tahun 2025 dilakukan tanpa anggaran melalui mekanisme daring maupun undangan dari unit kerja di pusat.

2) Sosialisasi SK LHKAN dan Bimtek Fasilitasi LHKAN

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di BPOM dapat sepenuhnya diterjemahkan ke dalam Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN bukan rutinitas tahunan bagi para ASN di BPOM. Di balik barisan angka dan rincian aset pada LHKPN, terkandung sebuah filosofi besar tentang transparansi, akuntabilitas, dan integritas. LHKPN adalah cerita tentang upaya sebuah bangsa untuk membangun kepercayaan publik yang seringkali terkikis oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Proses pengisian LHKPN dapat dimaknai sebagai audit terhadap diri mereka sendiri, khususnya pada setiap jengkal tanah dan bangunan yang dibeli, setiap kendaraan yang terparkir di garasi, hingga simpanan di bank yang mungkin terlupakan. Ketelitian dan kejujuran menjadi kunci utama.

Pentingnya LHKPN semakin terasa ketika dilihat dari perspektif pencegahan korupsi. Dalam teori kriminologi, peluang seringkali menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana. Dengan adanya kewajiban pelaporan harta secara berkala, ruang bagi penyelenggara negara untuk melakukan penyimpangan menjadi semakin sempit. Setiap penambahan harta yang signifikan dan tidak wajar akan segera terlihat dan menjadi alarm bagi sistem pengawasan. Jika seorang pejabat memiliki gaya hidup yang jauh melampaui pendapatan resminya, LHKPN akan menjadi instrumen pertama yang membunyikan peluit peringatan. Inilah yang disebut sebagai fungsi deteksi dini, di mana ketidaksesuaian data dapat menjadi pintu masuk bagi penyelidikan lebih lanjut mengenai potensi tindak pidana pencucian uang atau penerimaan gratifikasi yang tidak sah.

Lebih jauh lagi, LHKPN berfungsi sebagai pelindung bagi para pejabat yang benar-benar jujur. Laporan kekayaan yang akurat dapat menjadi perisai dari tuduhan yang tidak berdasar. Ketika seorang pejabat dituduh melakukan korupsi hanya karena memiliki rumah yang bagus, ia dapat dengan mudah menepis tuduhan tersebut dengan menunjukkan rekam jejak hartanya yang telah dilaporkan secara konsisten sejak awal

menjabat. Dengan demikian, LHKPN membantu memisahkan antara mereka yang benar-benar berintegritas dengan mereka yang hanya berpura-pura baik di permukaan. Ini adalah bentuk perlindungan diri bagi individu yang ingin menjaga nama baik keluarga dan martabat jabatannya di mata sejarah.

Pada akhirnya, LHKPN adalah tentang budaya dengan mimpi masa depan ketika penyelenggara negara dengan bangga menunjukkan laporan kekayaannya sebagai bukti pengabdian yang bersih. Narasi LHKPN bukan hanya milik KPK atau para pejabat, tapi milik seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan pemerintahan yang bersih dan melayani. Setiap angka yang tercantum dalam laporan tersebut adalah detak jantung dari integritas bangsa.

Di BPOM sendiri terdapat tenggat internal pelaporan 28 Februari setiap tahun atau satu bulan lebih cepat dibandingkan standar dari KPK. Dengan kebijakan ini, kegiatan sosialisasi menjadi hal yang sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan dokumen lain yang menyertai, menjadi elemen penyesuaian sehingga tidak ada realisasi. Namun demikian, capaian 100% ketepatan waktu pelaporan LHKPN telah dipotret pada evaluasi Pembangunan Zona Integritas.

e. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Indikator ini merupakan pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas

rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

Pada tahun 2025 tidak terdapat penyesuaian target sehingga capaian indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian di Tahun 2025
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,18%	97,77%	101,65%

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1) Pendampingan Pemeriksaan BPK

a) Pendampingan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024

Pendampingan pemeriksaan merupakan kegiatan berkelanjutan yang dilaksanakan seiring dengan proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada kegiatan ini, Inspektorat Utama berperan sebagai penghubung (*liaison officer)* antara BPK dan unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memfasilitasi komunikasi, koordinasi, serta pemenuhan kebutuhan data selama proses pemeriksaan dengan tetap menjaga objektivitas dan independensi kedua belah pihak. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPOM Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas BPK Nomor 14/ST/VIII/02/2025 tanggal 3 Februari 2025 dan berlangsung sampai dengan 16 Mei 2025.

Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I selama tahun 2025 meliputi:

1. *Entry Meeting* Pemeriksaan Laporan Keuangan, yang dilaksanakan secara *hybrid* pada 11 Februari 2025 dengan melibatkan pimpinan unit kerja di lingkungan BPOM.

2. Pendampingan kegiatan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa BPK pada satuan kerja sampel daerah pada wilayah pengawasan Inspektorat I meliputi:
   - BBPOM di Medan

     Pendampingan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai dengan 28 Februari 2025 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama NomorPI.05.7.02.25.29 tanggal 20 Februari 2025. Hasil pendampingan telah dilaporkan kepada Inspektur Utama melalui Nota Dinas Inspektur I tanggal 26 Maret 2025.
   - BPOM di Ambon

     Pendampingan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari sampai dengan 1 Maret 2025 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.05.7.02.25.28 tanggal 21 Februari 2025. Hasil pendampingan telah dilaporkan kepada Inspektur Utama melalui Nota Dinas Inspektur I tanggal 17 Maret 2025.
   - BPOM di Payakumbuh

     Pendampingan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Maret 2025 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.06.10.7.02.25.34 tanggal 27 Februari 2025. Hasil pendampingan telah dilaporkan kepada Inspektur Utama melalui Nota Dinas Inspektur I tanggal 27 Maret 2025.



Gambar 17. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan Pemeriksaan di Payakumbuh, Ambon, dan Medan

3. Pembahasan Konsep Temuan Pemeriksaan (KTP) yang disampaikan BPK dalam tiga tahap:
   - Surat BPK Nomor 13/S/TIM-I-LKBPOM/04/2025 tanggal 30 April 2025 perihal Permintaan Tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan;
   - Surat BPK Nomor 02/KTP/LK-BPOM-1/05/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan LK BPOM Tahun 2024 Tahap 2;
   - Surat BPK Nomor 03/KTP/LK-BPOM-1/05/2025 tanggal 2 Mei 2025 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan LK BPOM Tahun 2024 Tahap 3;
4. Penyusunan Komentar Instansi, dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
   - Pembahasan internal pada 2 Mei 2025 bersama dengan perwakilan satker di lingkungan BPOM sesuai dengan Surat Undangan Inspektur Utama Nomor R-PI.05.7.04.25.29
   - Pembahasan bersama Tim Pemeriksa BPK pada 5 Mei 2025 sesuai Surat Undangan Inspektur Utama Nomor T-PI.05.7.05.25.33
   - Penyampaian Komentar instansi ~~k~~epada BPK pada 6 Mei 2025 melalui Surat Inspektur Utama Nomor PI.05.7.05.25.176.

b) Pendampingan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024–2025

Pemeriksaan kinerja oleh BPK dilaksanakan untuk menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan. Pendampingan pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat Utama guna mendukung kelancaran proses pemeriksaan serta memfasilitasi koordinasi antara BPK dan unit kerja BPOM.

Pemeriksaan kinerja dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu:

1. Pemeriksaan Pendahuluan, berdasarkan Surat Tugas BPK Nomor 67/B/ST/ANGGOTA-VI/PPN.02/07/2025 tanggal 15 Juli 2025, yang dilaksanakan pada 21 Juli sampai dengan 15 Agustus 2025. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan klarifikasi data untuk memahami proses bisnis dan dukungan manajemen pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di BPOM.
2. Pemeriksaan Terinci, berdasarkan Surat Tugas BPK Nomor 90/T/ST/ANGGOTA-VI/PPN.02/09/2025 tanggal 4 September 2025, yang dilaksanakan pada 12 September sampai dengan 18 November 2025 dan diperpanjang hingga 2 Desember 2025. *Entry meeting* pemeriksaan terinci dilaksanakan pada 12 September 2025 secara *hybrid* dengan melibatkan pimpinan unit kerja BPOM.



Gambar 18. Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025



Gambar 19. Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025

Selama proses pemeriksaan kinerja, Inspektorat I melaksanakan pendampingan pada satuan kerja sampel didaerah pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang, meliputi:

1. Balai POM di Batam

   Pendampingan dilaksanakan pada tanggal 29 September sampai dengan 3 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.06.10.7.09.25.174 tanggal 29 September 2025. Hasil pendampingan telah dilaporkan kepada Inspektur Utama melalui Nota Dinas Inspektur I tanggal 17 November 2025.

2. Balai Besar POM di Medan

   Pendampingan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 Oktober 2025 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.06.10.7.10.25.184 tanggal 2 Oktober 2025. Hasil pendampingan telah dilaporkan kepada Inspektur Utama melalui Nota Dinas Inspektur I tanggal 4 November 2025.

Kegiatan Pasca Pemeriksaan Tim Pemeriksa BPK telah menyampaikan Konsep Temuan Pemeriksaan (KTP) Pemeriksaan

Kinerja Tahun 2025 sebanyak 3 tahap dengan rincian sebagai berikut:

a. Surat BPK Nomor 01/WPJ1_KIN_BPOM/12/2025 tanggal 10 Desember 2025 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Tahap 1;
b. Surat BPK Nomor 02/WPJ1_KIN_BPOM/12/2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Tahap 2;
c. Surat BPK Nomor 03/WPJ1_KIN_BPOM/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Tahap 3.

Selanjutnya telah diadakan pembahasan untuk menyusun Komentar Instansi yang diselenggarakan pada Kamis, 18 Desember 2025 sesuai Surat Undangan Inspektur Utama Nomor T-PI.05.7.12.25.386 perihal Undangan Pembahasan Konsep Temuan Pemeriksaan (KTP) Kinerja atas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bersama Tim Pemeriksa BPK dan dilaksanakan secara paralel dengan penyampaian komentar atas KTP. Pada tahap ini, proses pemeriksaan masih menunggu *feedback* dari Tim Pemeriksa BPK sebagai dasar penetapan dan penerbitan Temuan Pemeriksaan (TP).

Anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp188.810.00,00 dengan serapan sebesar Rp188.808.469,00 (99.9992%) yang digunakan untuk Konsumsi Rapat dan Perjalanan Dinas.

2) Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK

Pemantauan Tindak Lanjut adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan bahwa pejabat dan/atau auditi telah melaksanakan rekomendasi hasil audit dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pemantauan Tindak Lanjut ini dilakukan berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dilakukan dengan memverifikasi dokumen pendukung dari satker/unit kerja dengan memperhatikan kesesuaian dengan rekomendasi, kelengkapan, dan keabsahan dokumen pendukung, dan kebenaran dan atau ketepatan terhadap rekomendasi, kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan hasil verifikasi tersebut. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Inspektorat Utama berkoordinasi dengan Tim Pemantauan dari BPK RI.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK periode Semester I tahun 2025

   Sebelum Tim BPK melaksanakan pemantauan dan evaluasi TLHP, Inspektorat Utama terlebih dahulu melaksanakan desk dalam rangka pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada tanggal 11 Juni 2025. Kegiatan ini bertujuan sebagai upaya untuk mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 s.d. 2024, serta memperoleh informasi mengenai kendala dalam mengimplementasikan rekomendasi pemeriksaan.

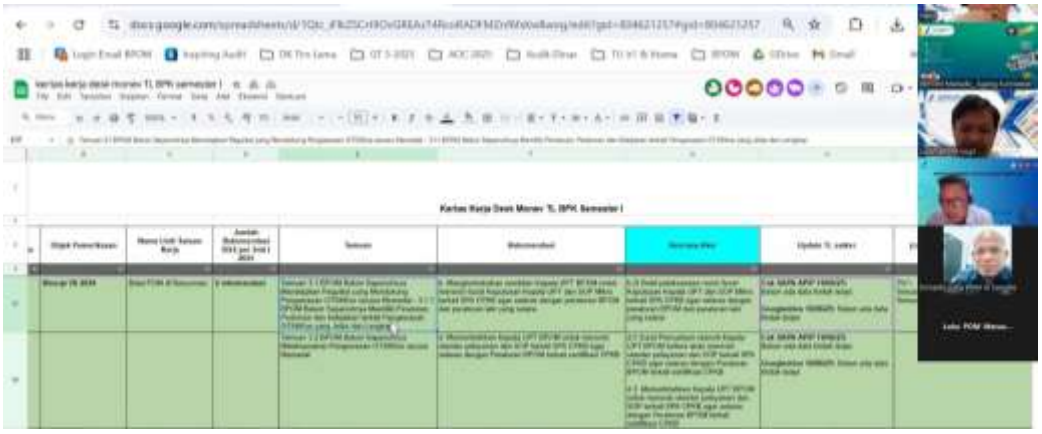
   Hasil pemantauan TLRHP Semester I telah dilaporkan berdasarkan Nota Dinas Inspektur I Nomor PI.05.71.07.25.208 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2025 bersama Tim BPK RI tanggal 7 Juli 2025.

   Inspektorat Utama telah menerima Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2025 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Nomor 56/T/LHPt/DJPKN-VI/PMT.01/7/2025 tanggal 31 Juli 2025. Pada

Semester I tahun 2025 BPOM berhasil memperoleh capaian persentase tindak lanjut Sesuai Saran (SS) sebesar 97,43%. Capaian tersebut melebihi target indikator kinerja tahun 2025 yakni sebesar 96,18%, namun mengalami sedikit penurunan dari capaian periode sebelumnya yakni 98,56%. Hal ini dikarenakan terdapat penambahan jumlah rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2024 yakni sebanyak 23 rekomendasi.

Rincian capaian tersebut sebagai berikut:

a. 833 dari 855 rekomendasi sesuai saran (97,43%)
b. 19 dari 855 rekomendasi belum sesuai saran (2,22%)
c. 0 rekomendasi belum ditindaklanjuti
d. 3 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (0,35%)

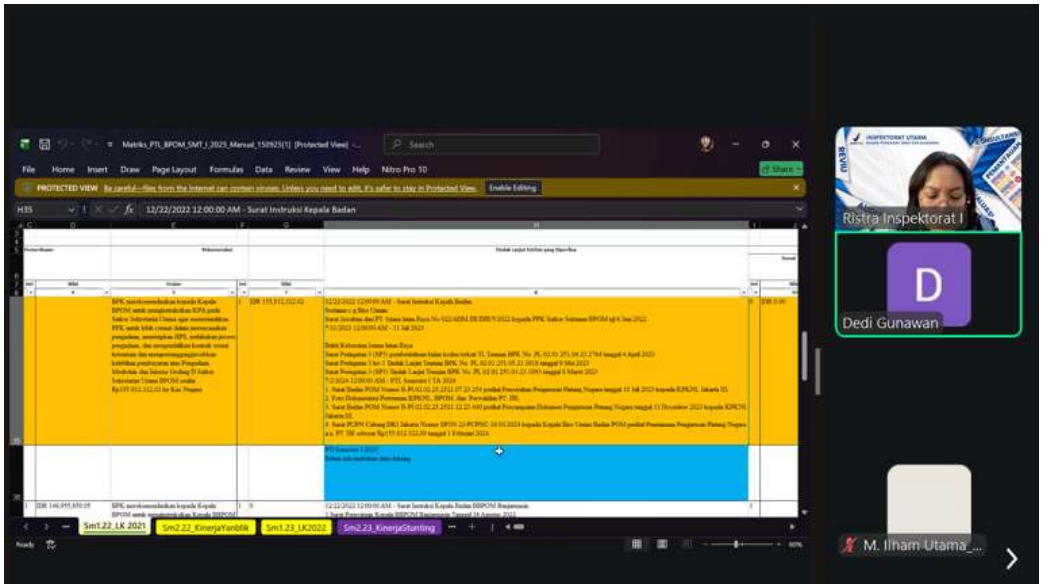


Gambar 20. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK periode Semester I tahun 2025

b. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Periode Semester II tahun 2025

Inspektorat Utama telah melaksanakan desk berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Utama Nomor PI.05.7.12.25.245 tentang Pendampingan dalam rangka Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Semester II Tahun 2025 oleh Tim BPK dan

PI.05.7.12.25.246 tentang Observasi dalam rangka Pendampingan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Semester II Tahun 2025 oleh Tim BPK dalam rangka pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi Hasil pemeriksaan BPK RI pada tanggal 5 Desember 2025. Hasil pemantauan TLRHP Semester II telah dilaporkan berdasarkan Nota Dinas Inspektur I Nomor PI.05.71.12.25.489 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2025 bersama Tim BPK RI tanggal 24 Desember 2025.



Gambar 21. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK periode Semester II tahun 2025

Dalam pemantauan TL per semester II 2025, terdapat penambahan jumlah rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM TA 2024 yakni sebanyak 16 rekomendasi. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Tim PTL Semester II 2025, secara keseluruhan terdapat 13 (tiga belas) rekomendasi yang dapat diusulkan sesuai saran (SS) dengan progres sementara pemenuhan tindak lanjut rekomendasi BPK secara keseluruhan pada Semester II tahun 2025 yaitu Sesuai Saran (SS) sebesar 97,13%. Capaian

sementara tersebut diprediksi telah melebihi target indikator kinerja tahun 2025 yakni sebesar 96,18%.

Rincian progres pemenuhan tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai berikut:

a. 846 dari 871 rekomendasi sesuai saran (97,13%)
b. 22 dari 871 rekomendasi belum sesuai saran (2,53%)
c. 0 rekomendasi belum ditindaklanjuti
d. 3 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (0,34%)

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan dokumen lain yang menyertai, kegiatan ini termasuk yang menjadi elemen penyesuaian sehingga dilaksanakan dengan skema daring sepenuhnya.

f. Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I

Reformasi birokrasi bukanlah sekadar jargon administratif atau tumpukan dokumen laporan yang menghiasi lemari kantor pemerintah, melainkan roh dari pelayanan publik. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggunakan instrumen strategis yang dikenal sebagai Zona Integritas (ZI).

Walaupun esensi Reformasi Birokrasi sendiri telah dikembangkan terpisah melalui skema Reformasi Birokrasi General dan Tematik, secara filosofis pembangunan Zona Integritas masih menggunakan prinsip miniatur dari implementasi Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja. Jika Reformasi Birokrasi nasional adalah sebuah ekosistem besar, maka Zona Integritas adalah sel-sel hidup yang membentuk kesehatan ekosistem tersebut. Tujuannya tegas yakni mewujudkan instansi pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam narasi besar pembangunan ZI, kita mengenal konsep *Island of Integrity* atau Pulau Integritas. Konsep ini berangkat dari realitas bahwa

mengubah sistem birokrasi secara masif dan serentak di seluruh penjuru negeri adalah tantangan yang sangat berat.

Island of Integrity adalah metafora ketika suatu unit kerja memutuskan untuk mengisolasi diri dari praktik-praktik koruptif yang mungkin masih terjadi di lingkungan sekitarnya. Unit ini membangun benteng moral dan sistemik yang kuat, sehingga ia menjadi pulau yang bersih di tengah samudra yang mungkin masih terkontaminasi. Harapannya, pulau-pulau integritas ini tidak berdiri sendiri selamanya. Melalui keberhasilan sebuah unit meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), unit tersebut akan menjadi percontohan (*role model*). Efek domino diharapkan terjadi adalah pulau-pulau ini akan saling terhubung, meluas, dan akhirnya membentuk daratan integritas yang menyatu secara nasional.



Gambar 22. Ilustrasi tentang Island of Integrity

Berdasarkan ketentuan dari Kemenpan RB, pembangunan ZI tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui enam area perubahan yang saling berinteraksi secara sistemik yakni Manajemen Perubahan, Penataan Tata

Laksana, Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pembangunan ZI dimulai dengan Pencanangan, yaitu deklarasi komitmen dari pimpinan unit kerja bahwa instansinya siap memasuki zona perubahan. Deklarasi pada dasarnya adalah langkah nol yang wajib ditindaklanjuti dengan pembangunan yang sesungguhnya, dengan unit kerja harus memenuhi indikator-indikator dalam lembar kerja evaluasi. Pencanangan di Inspektorat Utama BPOM diselenggarakan pada 14 Januari 2025.

Indikator ini merupakan pemenuhan terhadap pembangunan ZI. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.



Gambar 23. Penandatanganan Komitmen Pembangunan ZI

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan.
2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM.

Pada tahun 2025 tidak terdapat penyesuaian target sehingga capaian indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian di Tahun 2025
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	89,12	90,59	101,65%

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1) Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

Elemen Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan merupakan area penganggaran yang mendukung kinerja Inspektorat I secara umum, termasuk pada penyediaan air minum, pembayaran bulanan aplikasi rapat, hingga perjalanan dinas untuk kegiatan yang relevan. Pagu anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp164.101.000,00 dengan realisasi sebesar Rp164.095.825,00 (99,9968%).

Di era Inpres 1/2025, fungsi perangkat rapat daring seperti Zoom Meeting menjadi sangat krusial. Penggunaan Zoom Inspektorat I pada tahun 2025 mencapai 957 rapat sepanjang tahun atau setara dengan 79 rapat per bulan atau 3 rapat per hari. Rata-rata waktu yang dihabiskan

oleh peserta rapat adalah 67,9 menit per peserta yang dikalkulasi dari 1,9 juta menit rapat yang digunakan oleh 28.619 partisipan.



Koordinasi kegiatan juga mencakup dukungan pada kegiatan di luar perencanaan sebagaimana terangkum pada **Tabel 8**.

Tabel 8. Kegiatan Perjalanan Dinas Dukungan Administrasi Pengawasan

No.	Perjalanan Dinas	Tanggal Kegiatan
1.	Pendampingan dalam Rangka Pemeriksaan BPK pada BPOM di Balai POM di Ambon (Pendamping Eselon II)	26-27 Februari 2025
2.	Pendampingan BPKP dalam rangka Piloting Pedoman Evaluasi Tata Kelola Keamanan Obat dan Makanan pada Balai Besar POM di Bandung	5-7 Mei 2025
3	Pendampingan BPKP dalam rangka Piloting Pedoman Evaluasi Tata Kelola Keamanan Obat dan Makanan pada Balai Besar POM di Banjarbaru	19-21 Mei 2025
4	Pendampingan BPKP dalam rangka Piloting Pedoman Pengawasan Penguatan Industri Farmasi pada Provinsi Jawa Timur	9-11 Juni 2025
5	Koordinasi dalam Rangka Presentasi pada 11th International Conference on Contemporary Social and Political	26-27 Agustus 2025

No.	Perjalanan Dinas	Tanggal Kegiatan
	Affairs (ICoCSPA 2025)	
6	Kegiatan Workshop Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Kasus-Kasus Fraud di Best Western Premier La Grande, Bandung	22-24 Oktober 2025
7	Menghadiri Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM Tahun 2025 di Semarang	2-5 Desember 2025

g. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I yang sesuai standar

Indikator ini merupakan pemenuhan terhadap Dokumen SAKIP merupakan dokumen yang wajib disusun oleh Unit Organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di Lingkungan BPOM. Pemenuhan dokumen SAKIP mengacu Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Bagi Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker di Lingkungan BPOM, dokumen SAKIP tersebut meliputi 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut:

1. RKT tahun n+1 (1 Dokumen) → B09;
2. PK tahun n (1 Dokumen) → B02;
3. RAPK tahun n (1 Dokumen) → B02;
4. Capaian RAPK TW IV tahun n-1 (1 Dokumen) → B01;
5. Capaian RAPK TW I tahun n (1 Dokumen) → B04;
6. Capaian RAPK TW II tahun n (1 Dokumen) → B07;
7. Capaian RAPK TW III tahun n (1 Dokumen) → B10;
8. Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun n-1 → B01;
9. Laporan Evaluasi Internal TW I tahun n (1 Dokumen) → B04;
10. Laporan Evaluasi Internal TW II tahun n (1 Dokumen) → B07;
11. Laporan Evaluasi Internal TW III tahun n (1 Dokumen) → B10.

Indikator ini merupakan hal yang baru pada tahun 2025 dengan capaian indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian di Tahun 2025
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	100%	90,91	90,91%

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1) **Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)**

   Kegiatan ini mendukung terbentuknya laporan-laporan sebagai luaran kinerja dari Inspektorat I. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp216.000,00 dengan realisasi Rp216.000,00 atau serapan 100%.



Gambar 24. Kegiatan Evaluasi Internal Triwulan IV 2024 pada Januari 2025

h. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I

Indikator ini memberikan gambaran sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata pada pelaksanaan pengawasan intern. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input.

Persentase Capaian Output : Persentase Capaian Input x 100%

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

TE=(IE-SE)/SE

Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kriteria:

1. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
2. Tidak efisien apabila TE>1

Pada tahun 2025 tidak terdapat penyesuaian target sehingga capaian indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian di Tahun 2025
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100%	75%	75%

Kegiatan ini menjadi rumah untuk anggaran yang terkait dengan gaji dan kebutuhan operasional Inspektorat Utama yang dikelola oleh Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.

i. Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I

Indikator ini memberikan gambaran penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat I. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko.Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko. Berikut kategori tingkat maturitas beserta karakteristiknya:

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian target sebagai berikut:

Semula			**Menjadi**			**Justifikasi**
Sasaran Kegiatan	**Indikator**	**Target 2025**	**Sasaran Kegiatan**	**Indikator**	**Target 2025**	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	**3,64**	**Target:** Adanya penyesuaian target pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2024 dan pola peningkatan di 5 tahun yang akan datang.

Dari target di atas, capaian indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian di Tahun 2025
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,69	3,69	101,37%

Berdasarkan hasil evaluasi dari Inspektorat Utama, Inspektorat I memperoleh nilai 3,688 atau masih berada di level kematangan yang sama dengan sebelumnya.

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

a. Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat I

Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat I berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat I. Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

1. Wujud Fisik (*Tangible*)

   Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.

2. Keandalan (*Reliability*)

   Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat I memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat I dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.

3. Kesigapan (*Responsiveness*)

   Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat I dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.

4. Jaminan (*Assurance*)

   Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat I untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.

5. Empati (*Empathy*)

Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat I pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.

Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian target sebagai berikut:

Semula			**Menjadi**			**Justifikasi**
Sasaran Kegiatan	**Indikator**	**Target 2025**	**Sasaran Kegiatan**	**Indikator**	**Target 2025**	
Meningkatnya kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase Laporan layanan jasa assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang dilaksanakan sesuai standar mutu	100%	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan **intern** yang efektif dan efisien	**Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I**	**88,48**	**Sasaran Kegiatan**: Penyesuaian dilakukan dengan penambahan nomenklatur "intern" yang lebih menjelaskan tupoksi lingkup Inspektorat I. **Indikator:** Indikator lebih menggambarkan sasaran kegiatan 2 (merupakan lingkup persempit dari IKU Eselon I). **Target:** Terdapat perpindahan IKU "Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I" dari sasaran kegiatan 3 ke sasaran kegiatan 2. Perpindahan dinilai perlu karena IKU lebih dapat mendukung dan menggambarkan meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien.

Dari target di atas, capaian indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	**Indikator**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**Capaian di Tahun 2025**
Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88,48	88,49	100,01%

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1) Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I

Kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I mendukung kehadiran Inspektur I dalam meningkatkan kualitas layanan pengawasan intern khususnya untuk adanya permintaan dari mitra pengawasan. Anggaran untuk komponen ini adalah sebesar Rp103.491.000,00 yang direalisasikan sebesar 103.489.210,00 (99,9983%). Kegiatan pada Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I pada tahun 2025 sebagaimana dinyatakan pada **Tabel 9**.

Tabel 9. Rincian Kegiatan Pimpinan

No.	Unit Kerja	Tanggal Kegiatan
1.	Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Bimbingan Teknis "Satukan Aksi, Stop Resistensi Antimikroba" serta Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Dumai	19-20 Agustus 2025
2	Undangan sebagai Narasumber pada Rapat Kerja Teknis dan Pembinaan Kinerja Fungsi Penindakan di Bandung	09-10 September 2025
3	Koordinasi dalam Rangka Pendampingan Pemeriksaan Kinerja BPK pada BPOM di Balai POM di Batam	02-04 Oktober 2025
4	Koordinasi dalam menghadiri acara Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Unit Pelaksana Teknis Binaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan serta Konsolidasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Dukungan MBG di Bali	03-05 November 2025
5	Menghadiri Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM Tahun 2025 di Semarang (Pimpinan)	02-05 Desember 2025

2) Reviu RKA-K/L

Reviu RKA-K/L merupakan kegiatan Reviu atas Rencana Kinerja Anggaran atas masing-masing Satuan Kerja di lingkungan Badan POM. Kegiatan reviu dilaksanakan paralel pada saat penyusunan RKA-K/L Kementerian/Lembaga setelah diperolehnya Alokasi Anggaran K/L (bulan Oktober), sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.03/2025 tanggal 29 September 2025 tentang Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.03.02.7.10.25.189 tanggal 6 Oktober 2025, Inspektorat I telah melaksanakan Reviu Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 terhadap seluruh Satuan Kerja di Wilayah Pengawasan inspektorat I yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober s.d. 21 November 2025.

Output dari kegiatan ini berupa Laporan Hasil Reviu (LHR) yang memuat ketidaksesuaian dan rekomendasi terkait hal-hal yang menjadi perhatian atas RKA pada masing-masing Satuan Kerja.
Berdasarkan hasil reviu RKA-K/L yang telah dilakukan, dapat disimpulkan masih ditemukannya kelemahan-kelemahan dalam perencanaan penganggaran, antara lain:

1. Ketidaksesuaian antara RKP dan Renja K/L serta Pagu Alokasi;
2. Ketidaksesuaian dengan kebijakan penganggaran secara umum;
3. Ketidakpatuhan dalam pencantuman penandaan anggaran pada Level Keluaran (*Output*);
4. Ketidakpatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran;
5. Ketidakpatuhan dalam pemenuhan dokumen pendukung RKA-K/L;
6. Ketidaksesuaian lainnya/catatan penting lainnya yang perlu jadi perhatian

Anggaran terkait kegiatan ini menjadi bagian pemenuhan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk efisiensi sehingga realisasinya adalah Rp0.

3) Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan oleh BPK

Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan oleh BPK bertujuan untuk mempersiapkan Satuan Kerja terutama pada level UPT dengan memastikan bahwa Satuan Kerja telah memahami prosedur dan menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku serta memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk area yang masih memerlukan perbaikan. Asistensi diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi Satuan Kerja yang akan diperiksa dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Dalam kegiatan asistensi tersebut, dilakukan diskusi serta sampling dan cek fisik atas berkas serta output kegiatan yang termasuk dalam lingkup pelaporan keuangan. Hasil dari kegiatan asistensi berupa catatan dan rekomendasi yang langsung disampaikan kepada unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti sebelum dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK.

Pada tahun 2025 Inspektorat I telah melaksanakan Kegiatan asistensi dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI terhadap 3 (tiga) UPT yang berada pada wilayah pengawasan Inspektorat I, dengan rincian sebagai berikut:

- Balai POM di Payakumbuh

  Asistensi dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 21 Februari 2025 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.05.71.02.25.26 tanggal 13 Februari 2025. Hasil asistensi telah dilaporkan kepada Inspektur Utama melalui Nota Dinas Inspektur I Nomor PI.05.71.03.25.73 tanggal 6 Maret 2025.
- Balai POM di Ambon

  Asistensi dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 21 Februari 2025 berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor

PI.05.71.02.25.27 tanggal 13 Februari 2025. Hasil asistensi telah dilaporkan kepada Inspektur Utama melalui Nota Dinas Inspektur I Nomor PI.06.10.71.02.25.61 tanggal 26 Februari 2025.

- Balai Besar POM di Medan (Daring)

  Asistensi dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 28 Februari 2025. Hasil asistensi telah dilaporkan kepada Inspektur Utama melalui Nota Dinas Inspektur I Nomor PI.05.71.04.25.109 tanggal 31 Maret 2025.

Kegiatan ini mendukung fungsi APIP sebagai *consulting*, baik kepada BPK RI sebagai *stakeholder* yang diamanatkan oleh Undang-Undang, maupun juga klien dari UPT yang menjadi lokus Pemeriksaan oleh BPK.



Gambar 25. Asistensi dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK pada Balai POM di Payakumbuh



Gambar 26. Asistensi dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK pada Balai POM di Payakumbuh





Gambar 27. Asistensi dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK pada Balai POM di Ambon

Anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp49.606.000,00 dengan serapan sebesar Rp49.605.395,00 (99.9988%).

4) Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan dokumen lain yang menyertai, kegiatan ini termasuk yang menjadi elemen penyesuaian sehingga tidak dilaksanakan.

5) Reviu (LK, BMN, dan PIPK)

Pengawasan Inspektorat I dalam pengelolaan keuangan negara diantaranya dilakukan melalui Reviu Pemutakhiran Barang Milik Negara (BMN), Reviu Laporan keuangan dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

a) Reviu Pemutakhiran BMN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Kepala BPOM selaku Pengguna Barang (PB) bertanggung jawab untuk menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) secara periodik semesteran dan tahunan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode pelaporan serta mutasi yang terjadi selama periode pelaporan tersebut. Sebagai wujud komitmen, Inspektorat I melakukan reviu terhadap Laporan Barang Kuasa Pengguna pada tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang- Wilayah (UAPPB-W) serta seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Reviu pemutakhiran BMN dilaksanakan sebelum penyusunan laporan keuangan sebagai langkah awal untuk memberikan keyakinan bahwa posisi BMN yang disajikan di laporan telah sesuai. Selama tahun 2025 APIP melakukan 2 (dua) kali reviu pemutakhiran BMN yaitu untuk TA 2024 dan semester I TA 2025.

b) Reviu Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diberikan tanggung jawab

untuk melakukan reviu dan memberikan pernyataan telah direviu terhadap Laporan Keuangan Instansi yang disertakan dalam penyampaian Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan. Pernyataan telah direviu menyatakan bahwa Laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan menyajikan informasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK BPOM dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK BPOM serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga dapat menghasilkan LK BPOM yang berkualitas.

Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi. Dalam pelaksanaan reviu, Inspektorat Utama telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka-angka dalam Laporan Keuangan ke catatan akuntansi, permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi, serta analisis untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa pada Laporan Keuangan.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan reviu laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

- LK Satuan Wilayah BPOM TA 2024 Unaudited pada tanggal 4-6 Februari 2025
- LK BPOM TA 2024 Unaudited pada tanggal 17-28 Februari 2025
- LK BPOM TA 2024 Audited pada tanggal 6-9 Mei 2025

- LK Satuan Wilayah BPOM Semester I TA 2025 pada tanggal 15-18 Juli 2025
- LK BPOM Semester I TA 2025 pada tanggal 28-31 Juli 2025
- LK Satuan WIlayah BPOM TW III TA 2025 pada tanggal 14-24 Oktober 2025
- LK BPOM TW III TA 2025 pada tanggal 21 Oktober-7 November 2025

Laporan hasil reviu dan rekomendasi telah disampaikan kepada Sekretariat Utama untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti.

c) Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Inspektorat Utama telah melakukan reviu PIPK atas hasil penilaian implementasi PIPK Satuan Kerja sesuai Surat tugas Nomor PI.03.01.7.01.25.08 pada tanggal 23-31 Januari 2025.

Tujuan reviu PIPK adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan Badan POM TA 2024 telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Reviu atas hasil implementasi PIPK tingkat Satuan Kerja dilakukan secara sampling terhadap 16 Satuan Kerja sebagai berikut:

1) Sekretariat Utama
2) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
3) Deputi Bidang Penindakan

4) Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
5) Balai Besar POM di Bandung
6) Balai Besar POM di Bandar Lampung
7) Balai Besar POM di Denpasar
8) Balai Besar POM di Manado
9) Balai POM di Pangkalpinang
10) Balai POM di Gorontalo
11) Balai POM di Surakarta
12) Balai POM di Jember
13) Balai POM di Bogor
14) Balai POM di Kota Dumai
15) Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
16) Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rekomendasi atas hasil reviu PIPK ditindaklanjuti oleh Satker sebagai bahan perbaikan dalam penerapan pengendalian intern dan monitoring khususnya terkait pengelolaan keuangan dan BMN baik pada periode berjalan maupun periode pelaporan keuangan selanjutnya.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, kegiatan terkait reviu sepenuhnya dilakukan secara daring melalui zoom meeting sehingga tidak terdapat realisasi anggaran.

6) Penyelenggaraan Pemeriksaan Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Berdasarkan Surat Undangan Inspektur Utama Nomor T-PI.05.7.09.25.331 tanggal 9 September 2025 telah diadakan *Entry Meeting* Pemeriksaan Terinci BPK RI atas Kinerja atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025 yang diadakan secara *hybrid* pada 12 September 2025 dan mengundang seluruh Pejabat Pimpinan Madya, Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, pada kegiatan tersebut disampaikan tujuan,

ruang lingkup, dan Aspek Pemeriksaan dari pelaksanaan pemeriksaan kinerja serta jangka waktu dan susunan Tim Pemeriksa.

Kegiatan Pemeriksaan Kinerja Terinci dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa BPK berdasarkan Surat Tugas Nomor 90/T/ST/ANGGOTA-VI/PPN.02/09/2025 tanggal 4 September 2025 perihal Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Daerah yang dilaksanakan selama 50 hari sejak tanggal 12 September s.d. 18 November 2025.

Selanjutnya terdapat perpanjangan waktu pemeriksaan selama 10 hari kerja mulai tanggal 19 November s.d 2 Desember 2025, sesuai dengan Surat Tugas Nomor 128/T/ST/ANGGOTA-VI/PPN.02/11/2025 tentang Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kinerja serta dengan menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan yang dilaksanakan. Pemeriksaan kinerja oleh BPK merupakan proses simultan yang sesuai dengan penjadwalan kegiatan dari penugasan BPK pada Kementerian/Lembaga, sehingga pendampingan pemeriksaan merupakan kegiatan yang berkelanjutan yang mendukung proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, berdasarkan hal tersebut Tim Inspektorat Utama telah melaksanakan Pendampingan dalam rangka Pemeriksaan Kinerja sesuai Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.05.7.9.25.247 tanggal 12 September 2025.

Anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp8.722.000,00 dengan serapan sebesar Rp8.722.00,00 (100%) yang mencakup konsumsi rapat untuk kegiatan *entry meeting* Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan sesuai kriteria pada Standar Biaya yang berlaku.



Gambar 28. Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025

b. Persentase Rekomendasi Pengawasan *Assurance* pada Mitra Kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti

Indikator ini merupakan pemenuhan terhadap tugas dan fungsi Inspektorat I yaitu pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Yang dimaksud pengawasan *assurance* adalah audit kinerja. Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan *assurance*.

Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan klien. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh klien sesuai rekomendasi. Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian target sebagai berikut:

Semula			**Menjadi**			**Justifikasi**
Sasaran Kegiatan	**Indikator**	**Target 2025**	**Sasaran Kegiatan**	**Indikator**	**Target 2025**	
Meningkatnya kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	93,57%		Persentase rekomendasi pengawasan **assurance** pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	**92,13%**	**Indikator:** Penyesuaian nomenklatur *"assurance"* untuk lebih menggambarkan peran *assurance* dari Inspektorat. *Assurance* yang dimaksud adalah audit operasional dan audit kinerja. **Target:** Penyesuaian Target pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan rata-rata realisasi kinerja di tahun 2021-2024 karena tingkat kendali IKU yang rendah

Dari target di atas, capaian indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	**Indikator**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**Capaian di Tahun 2025**
Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	92,13%	98,66	107,09%

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1) Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan

APIP memiliki peran strategis dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, serta integritas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tugas penting APIP adalah melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut

atas rekomendasi yang dikeluarkan melalui proses pengawasan, khususnya audit. Tugas ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan bagian kritis dalam memastikan bahwa hasil audit benar-benar memberikan dampak nyata bagi perbaikan tata kelola, peningkatan efektivitas program, serta mitigasi risiko penyimpangan di masa mendatang.

Audit tanpa tindak lanjut dapat disebut diagnosis tanpa terapi. Rekomendasi audit hanya akan menjadi dokumen tanpa nilai apabila tidak diikuti langkah korektif yang sesuai. Di sinilah peran APIP menjadi kunci. Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut memastikan bahwa setiap rekomendasi benar-benar ditindaklanjuti, baik dalam bentuk perbaikan prosedur, penyempurnaan kebijakan, penertiban administrasi, maupun pengembalian kerugian negara apabila ada unsur keuangan yang terlibat. Selain itu, pemantauan tindak lanjut berfungsi sebagai mekanisme *feedback loop* antara auditor dan entitas yang diawasi. Melalui proses ini, kualitas audit dapat meningkat, dan organisasi akan semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap rekomendasi.

APIP di BPOM menjalankan pemantauan tindak lanjut berdasarkan pedoman, khususnya melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 682 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Intern, Pengawasan Ekstern, dan Pemeriksaan Ekstern di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan pemutakhiran dari ketentuan sebelumnya.

Tahap pertama adalah mengumpulkan laporan tindak lanjut dari entitas yang diaudit yang dalam hal ini diunggah melalui aplikasi SAPA APIP, antara lain berupa dokumen koreksi administrasi, kebijakan baru atau revisi SOP, bukti pengembalian kerugian negara, hingga laporan implementasi sistem atau mekanisme baru. Terhadap hal ini, APIP perlu memastikan kelengkapan, relevansi, dan kebenaran dokumen tersebut.

Setelah bukti terkumpul, APIP melakukan analisis terhadap kecukupan tindakan yang telah dilakukan. Analisis ini mencakup kesesuaian dengan rekomendasi audit, efektivitas tindakan perbaikan, hingga validitas bukti. Pada tahap ini, APIP harus bersikap objektif dan independen. Apabila tindak lanjut belum optimal, entitas akan diminta memperbaiki atau melengkapi tindakan tersebut.

Tidak semua tindak lanjut dapat dinilai hanya dari dokumen. Untuk rekomendasi yang bersifat substantif, strategis, atau berhubungan dengan perubahan sistem, APIP dapat melakukan pemeriksaan langsung di lapangan guna memastikan keakuratan pelaporan, baik untuk melakukan verifikasi fisik pengadaan barang/jasa, konfirmasi ke pihak terkait, observasi implementasi kebijakan baru, hingga pemeriksaan ulang catatan administrasi sebagai bentuk pemastian bahwa perbaikan benar-benar terjadi, bukan hanya formalitas dokumentatif.

Setelah melakukan analisis dan verifikasi, APIP menetapkan status tindak lanjut. Status ini terdiri dari:

- Status 1 (warna Hijau): Sesuai Saran
- Status 2 (warna Kuning): Belum Sesuai Saran
- Status 3 (warna Oranye): Belum Tindak Lanjut
- Status 4 (warna Merah): Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah

Penetapan status ini penting sebagai dasar pelaporan kepada pimpinan dan sebagai indikator efektivitas pengawasan sebagaimana termuat dalam kegiatan ini. Luaran dari kegiatan ini adalah Laporan Pemantauan yang dirilis setiap Triwulan baik oleh Inspektorat I maupun konsolidasi di level Inspektorat Utama.

Laporan tersebut menjadi referensi penting bagi pimpinan untuk mengambil keputusan strategis terkait pembinaan, penegakan disiplin, dan peningkatan sistem pengendalian intern. Pemantauan tindak lanjut bukan pekerjaan yang mudah. APIP sering menghadapi berbagai

tantangan, seperti kurangnya komitmen unit kerja terhadap rekomendasi audit, minimnya pemahaman tentang risiko apabila TL tidak dilakukan, terbatasnya sumber daya (termasuk anggaran) untuk verifikasi lapangan, perbedaan interpretasi antara auditor dan unit kerja, serta kompleksitas temuan yang membutuhkan perubahan sistem besar. Oleh karena itu, APIP harus memiliki kompetensi teknis, komunikasi yang baik, serta ketegasan dalam menegakkan rekomendasi.

Ketika dilakukan secara konsisten dan berkualitas, pemantauan tindak lanjut memberikan dampak besar, antara lain pada peningkatan akuntabilitas, penguatan SPIP, pencegahan kerugian negara, peningkatan kualitas layanan publik, hingga penguatan budaya kepatuhan. Dengan demikian, pemantauan TL bukan sekadar tanggung jawab, tetapi sebuah kontribusi nyata terhadap hadirnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Anggaran terkait kegiatan ini menjadi bagian pemenuhan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 untuk efisiensi sehingga realisasinya adalah Rp0.

2) Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP melaksanakan pengawasan intern salah satunya melalui audit, yang terdiri dari audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

Audit dalam koridor Aparat Pengawas Intern Pemerintah Indonesia (APIP) merupakan suatu proses evaluasi independen dan obyektif terhadap kinerja organisasi atau unit kerja pemerintah, termasuk pengelolaan keuangan, program, dan operasional, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa organisasi tersebut berfungsi secara

efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, APIP menggunakan standar, metode, dan teknik audit yang telah ditetapkan. APIP juga melaksanakan audit berdasarkan prinsip independensi, integritas, objektivitas, dan profesionalisme.

Hasil dari audit yang dilakukan oleh APIP disampaikan dalam bentuk laporan audit, yang berisi temuan-temuan dan rekomendasi untuk perbaikan dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan operasional pemerintah. Laporan audit ini akan menjadi masukan bagi pimpinan organisasi pemerintah dalam memperbaiki kinerja dan pengelolaan keuangannya.

Dengan adanya fungsi audit oleh APIP, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Auditee yang diaudit diperoleh dari sistematika penilaian risiko sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, komponen yang menjadi penyusun dari Penilaian Risiko dalam Pengawasan yang dilakukan berdasarkan faktor risiko untuk kemudian ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan intern dalam waktu 1 tahun.

Proses Audit merupakan sistematika yang panjang mengingat sebelum adanya kegiatan Audit *on site* terdapat mekanisme survei pendahuluan. Setelah Audit *on site* terdapat mekanisme konfirmasi dan perbaikan dari auditee untuk kemudian diproses menjadi hasil akhir berupa Laporan Hasil Audit (LHA).

Audit Kinerja merupakan kegiatan utama yang dalam pelaksanaannya mencakup sebagian besar sumber daya yang dimiliki Inspektorat I. Audit Kinerja dan/atau Operasional bertujuan menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didanai DIPA Inspektorat Utama Badan POM, serta memberikan rekomendasi untuk membantu manajemen atau pimpinan unit kerja dalam meningkatkan kinerjanya.

Saran atau rekomendasi temuan Audit Kinerja tersebut antara lain dapat berupa perbaikan maupun yang bersifat penyempurnaan sistem pengendalian intern agar pengendalian kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga temuan kejadian penyimpangan atau ketidaktaatan tidak berulang. Tindak Lanjut terhadap rekomendasi atau saran disampaikan melalui Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAPA APIP). Saran atau rekomendasi juga dapat ditujukan untuk mengurangi dampak kerugian akibat adanya penyimpangan atau ketidaktaatan dalam pelaksanaan anggaran, melalui penyetoran ke kas negara.

Audit Operasional pada Tahun 2025 dilaksanakan pada 2 Balai POM dan 1 Loka POM dengan anggaran sebesar Rp319.406.000,00 dengan realisasi sebesar Rp319.405.007,00 (99.9997%) yang terdiri dari konsumsi rapat pembahasan dan perjalanan dinas untuk kegiatan. Adapun perjalanan dinas untuk Audit Kinerja level UPT dilakukan sesuai tabel berikut:

Tabel 10. Rincian Pelaksanaan Audit

Lokus Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Balai POM di Tanjung Balai	Pra Pendahuluan: 2-7 Mei 2025 Survey Pendahuluan: 8-16 Mei 2025 Audit Lapangan: 18-24 Mei 2025 Pelaporan: 26 Mei-3 Juni 2025
Balai POM di Pangkal Pinang	Pra Pendahuluan: 21-25 Juli 2025 Survey Pendahuluan: 28 Juli-1 Agustus 2025

Lokus Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
	Audit Lapangan: 3-9 Agustus 2025 Pelaporan: 11-13 Agustus 2025
Loka POM di Tanjung Pinang	Survey Pendahuluan: 20-24 Oktober 2025 Audit Lapangan: 26 Oktober-1 November 2025 Pelaporan: 3-5 November 2025

Adapun Audit Kinerja untuk level Program pada tahun 2025 dilaksanakan pada program Pengawalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik BOK POM Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Adapun *auditee* dalam audit kinerja ini adalah Kedeputian Bidang Pangan Olahan dan Biro Perencanaan dan Keuangan. Untuk melihat gambaran implementasi program secara komprehensif maka dilakukan uji petik secara *on site* pada 3 Provinsi, yaitu pada Provinsi Jawa Timur, Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan, dengan rangkaian kegiatan meliputi:

Tabel 11. Rincian Pelaksanaan Audit Kinerja Program

Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Pra Pendahuluan	6 s.d 27 Maret 2025
Survei Pendahuluan	8 April s.d 16 Mei 2025;
Penelaahan Dokumen dan Konfirmasi Audit Kinerja	30 Juni s.d 31 Agustus 2025
Uji Petik pada Provinsi Jawa timur, Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan	30 Juni s.d 4 Juli 2025
Penelaahan Dokumen dan Konfirmasi Audit Kinerja (Lanjutan)	1 September s.d 15 Oktober 2025

3) Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen POM Terintegrasi Unit Kerja Inspektorat I

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta peningkatan kualitas pengawasan intern, penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System/QMS) dan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) menjadi kebutuhan strategis di lingkungan BPOM, khususnya pada unit pengawasan intern (APIP).

QMS merupakan pendekatan sistematis dalam mengelola proses organisasi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengawasan, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawalan program strategis dilaksanakan secara konsisten, terdokumentasi, terukur, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks APIP, QMS berperan penting untuk menjamin mutu hasil pengawasan sehingga rekomendasi yang dihasilkan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas dan tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah sekaligus implementasi Inpres 1 Tahun 2025, BPOM mengembangkan pendekatan Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) yang mengintegrasikan berbagai sistem manajemen yang telah diterapkan, seperti sistem manajemen mutu, manajemen risiko, pengendalian intern pemerintah, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar profesional pengawasan. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi, mengurangi duplikasi proses, serta memperkuat pengendalian atas pencapaian tujuan strategis organisasi.

Implementasi SMT bukan hanya merupakan kebutuhan administratif, tetapi menjadi bagian integral dari upaya transformasi pengawasan intern menuju pengawasan yang profesional, adaptif, dan bernilai tambah bagi organisasi.

Adapun seluruh kegiatan terkait kegiatan ini dilaksanakan secara daring maupun dengan mekanisme lainnya sehingga tidak ada realisasi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

c. Persentase Layanan Jasa Konsultansi pada Mitra Kerja Inspektorat I yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

Indikator ini merupakan pemenuhan terhadap pelayanan untuk konsultasi. Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum.

Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultansi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman solusi.pom.go.id merupakan kanal atau saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang/jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat I sebagai *trusted advisor* yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.

Pada tahun 2025 tidak terdapat penyesuaian target sehingga capaian indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian di Tahun 2025
Meningkatnya kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

Pembahasan Layanan Konsultansi Pengawasan Intern

Layanan konsultansi merupakan salah satu peran strategis APIP yang berfokus pada pemberian saran, fasilitasi, dan pelatihan tanpa mengambil

alih tanggung jawab manajemen. Berbeda dengan fungsi audit yang bersifat retrospektif, layanan ini lebih bersifat preventif dan proaktif. Melalui pembahasan ini, APIP memposisikan diri sebagai mitra strategis bagi unit kerja untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini serta memberikan solusi perbaikan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien sebelum permasalahan berkembang menjadi temuan yang signifikan.

Dalam praktiknya, esensi dari layanan konsultansi ini adalah pendampingan berkelanjutan yang diberikan APIP kepada unit kerja. APIP berperan sebagai penasihat terpercaya yang membantu unit kerja dalam memperkuat sistem pengendalian intern dan memastikan tata kelola organisasi berjalan sesuai koridor regulasi. Dengan adanya dialog yang terbuka dalam sesi pembahasan, unit kerja dapat berkonsultasi mengenai hambatan operasional yang mereka hadapi, sehingga kebijakan yang diambil oleh manajemen tetap selaras dengan prinsip akuntabilitas.

Salah satu fokus krusial dalam layanan ini adalah kesiapan unit kerja dalam menghadapi pemeriksaan eksternal. APIP bertindak sebagai jembatan yang membantu unit kerja merapikan dokumentasi, memperkuat substansi pertanggungjawaban, dan memastikan bahwa seluruh tindak lanjut hasil pengawasan sebelumnya telah diselesaikan dengan baik. Dengan pendampingan ini, unit kerja tidak hanya merasa lebih siap secara administratif, tetapi juga memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi karena proses bisnisnya telah melalui uji coba dan reviu internal yang ketat.

Secara keseluruhan, pembahasan layanan konsultansi ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi secara menyeluruh. Dengan mengedepankan fungsi edukasi dan supervisi, APIP membantu meminimalisir celah kecurangan serta mendorong terciptanya budaya organisasi yang sadar risiko. Transformasi peran APIP dari sekadar "penjaga gerbang" menjadi konsultan internal yang solutif pada akhirnya akan mempercepat pencapaian tujuan strategis instansi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara

berkelanjutan. Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp7.697.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.696.920,00 (99,9990%).

d. Persentase Pengaduan Wilayah Pengawasan Inspektorat I yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu

Indikator ini merupakan pemenuhan terhadap pelayanan untuk pengaduan. Pengaduan adalah proses atau tindakan mengungkapkan keluhan, masalah, atau ketidakpuasan terhadap suatu hal kepada pihak yang berwenang atau yang dapat melakukan tindakan perbaikan. Pengaduan dapat berkaitan dengan layanan publik, produk, perilaku tidak etis, pelanggaran hukum, atau masalah lainnya yang mempengaruhi organisasi. Dalam hal ini pengaduan yang dimaksud adalah pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system*.

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan dan / atau dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

Whistleblowing System (WBS) adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan BPOM. Tindak lanjut penanganan pengaduan menjadi penting untuk menegaskan bahwa Inspektorat I berperan aktif untuk mewujudkan budaya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan organisasi BPOM yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan *fraud*.

Pada tahun 2025 tidak terdapat penyesuaian target sehingga capaian indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian di Tahun 2025
Meningkatnya kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

1) Audit Tujuan Tertentu

Audit dengan Tujuan Tertentu adalah jenis audit yang dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang meminta audit. Contoh tujuan audit dengan tujuan tertentu adalah pengecekan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu, pengecekan penggunaan dana yang telah dialokasikan, atau pengecekan keamanan sistem informasi. Audit Tujuan Tertentu merupakan jenis Audit yang terpisah dengan Audit Operasional dan Kinerja mengingat perannya yang menunjang output yang berbeda. Audit Tujuan Tertentu umumnya dimanfaatkan untuk penelusuran pengaduan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi WBS di lingkungan BPOM.

Kegiatan Audit Tujuan Tertentu pada tahun 2025 dilakukan pada 4 (empat) Unit Kerja dengan hasil 3 (tiga) Unit Kerja terbukti dan 1 (satu) Unit Kerja tidak terbukti. Adapun seluruh ATT pada tahun 2025 dilakukan tanpa menggunakan anggaran atau diselesaikan secara daring maupun dengan mekanisme lainnya.

2) Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021, elemen Penguatan Pengawasan memuat elemen pengelolaan pengaduan, benturan kepentingan, dan pengelolaan gratifikasi. Pada

tahun 2025, Inspektorat I telah menyusun laporan sebanyak 3 (tiga) Laporan Tahunan yang terdiri dari Laporan Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan Tahun 2025, Laporan Monitoring dan Evaluasi Gratifikasi Tahun 2025 dan Laporan Monitoring dan Evaluasi *Whistleblowing System* (WBS) dan Pengaduan Masyarakat (Dumas).

a) Berdasarkan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan Triwulan IV tahun 2025 pada wilayah pengawasan Inspektorat I, dari total 3.229 pegawai, sebanyak 2.834 pegawai tidak mempunyai potensi dan/atau benturan kepentingan (nihil) dan 395 pegawai mempunyai potensi benturan kepentingan.
b) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaporan gratifikasi wilayah pengawasan Inspektorat I selama Tahun 2025 terdapat 61 laporan gratifikasi, yang terdiri dari 24 laporan penolakan dan 37 laporan penerimaan, dengan total nilai pelaporan sebesar Rp30.838.600,00.
c) Berdasarkan monitoring dan evaluasi atas pelaporan *Whistleblowing System* (WBS) dan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Triwulan IV tahun 2025 pada wilayah pengawasan Inspektorat I, terdapat sejumlah 12 laporan yang terdiri dari 7 (tujuh) laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan 5 (lima) laporan *Whistleblowing System* (WBS).

Sehubungan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, kegiatan ini menjadi salah satu yang masuk dalam efisiensi penganggaran.

3. Terwujudnya Organisasi Inspektorat I yang Profesional

a. Persentase Pemenuhan Dokumen Kapabilitas APIP pada Wilayah Pengawasan Inspektorat I yang Sesuai Standar

Indikator ini merupakan pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP yang wajib disusun oleh Unit Organisasi dalam mewujudkan APIP yang kapabel di Pemerintahan. Pemenuhan dokumen pada definisi awal mengacu pada penilaian Kapabilitas APIP sesuai Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang

Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pemenuhan standar dokumen dilakukan berdasarkan dengan level kapabilitas yang akan dicapai. Bagi Unit Organisasi Eselon II, dokumen Kapabilitas APIP tersebut meliputi daftar dokumen yang telah disepakati. Pada akhir tahun 2025, BPKP melakukan pemutakhiran regulasi untuk penilaian Kapabilitas APIP melalui Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 hadir sebagai respons strategis terhadap dinamika tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks dan tuntutan global akan standar pengawasan intern yang lebih tinggi. BPKP memandang bahwa peran APIP tidak boleh lagi sekadar menjadi unit administratif yang melakukan pengawasan secara sporadis, melainkan harus bertransformasi menjadi mitra strategis yang mampu memberikan nilai tambah nyata bagi organisasi. Landasan utama perubahan ini adalah kebutuhan hukum untuk mengganti peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan aktivitas pengawasan saat ini.

Secara filosofis, peningkatan kapabilitas APIP ditujukan untuk mewujudkan peran pengawasan intern yang efektif dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan instansi pemerintah. APIP kini diberikan mandat yang lebih luas untuk memberikan peringatan dini (*early warning*), meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta menjaga kualitas tata kelola di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan mandat Presiden agar APIP proaktif mencegah kebocoran keuangan negara dan mengawal program pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029.

Dalam peraturan ini, kapabilitas APIP didefinisikan sebagai kemampuan untuk memberikan nilai tambah dan membantu organisasi mencapai

tujuannya melalui aktivitas dukungan pengawasan. Untuk mengukur hal tersebut, diperkenalkan sebuah kerangka fundamental yang disebut Model Kapabilitas APIP. Model ini tidak lagi hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi mencakup seluruh rangkaian aktivitas sistematis yang berkelanjutan. Peningkatan kapabilitas ini dilaksanakan secara kolaboratif antara tiga pihak utama yakni pimpinan instansi (Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah), unit APIP itu sendiri, dan BPKP sebagai pembina.



Gambar 29. Ilustrasi Kapabilitas APIP Model Terbaru

Struktur model kapabilitas ini terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait, yaitu level kapabilitas, elemen kapabilitas, dan topik kapabilitas. Level kapabilitas berfungsi sebagai tangga pertumbuhan yang menggambarkan tingkat kematangan APIP, sementara elemen dan topik menyediakan rincian substansi yang harus dipenuhi untuk mencapai level tertentu.

Pemerintah menetapkan lima tingkatan level kapabilitas APIP untuk menggambarkan evolusi fungsi pengawasan intern. Level 1 (Rintisan) dicirikan oleh aktivitas pengawasan yang masih bersifat sporadis atau *ad-hoc*, tanpa rencana yang jelas, dan hanya sekadar menjalankan fungsi administratif mandatory. Pada Level 2 (Terstruktur), APIP mulai memiliki landasan prosedur dan struktur, namun kualitas serta konsistensinya masih rendah dan cenderung berfokus pada kepatuhan administratif saja.

Level 3 (Memadai) menjadi titik krusial di mana APIP dianggap mampu melaksanakan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan tujuan organisasi tercapai secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta mampu memberikan peringatan dini atas risiko kecurangan (*fraud*). Transisi ke Level 4 (Terintegrasi) menunjukkan peran APIP yang sudah optimal dalam mengawal risiko strategis lintas sektor dan memberikan *insight* bagi manajemen puncak. Puncak dari model ini adalah Level 5 (Optimal), di mana APIP telah menjadi *role model* nasional yang mampu memberikan *foresight* atau proyeksi masa depan melalui pengawasan secara *real-time* untuk membantu organisasi merespons perubahan lingkungan strategis secara lincah.

Transformasi APIP dilakukan melalui penguatan lima elemen utama yang menjadi pilar kapabilitas. Elemen pertama adalah Kualitas Peran dan Layanan yang mencakup kegiatan asurans (seperti audit ketaatan dan kinerja) serta kegiatan konsultansi strategis. Elemen kedua adalah Profesionalisme Penugasan yang menuntut penerapan standar audit internal global dan pengendalian kualitas yang ketat, mulai dari pengembangan informasi awal hingga pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Elemen ketiga, Manajemen Pengawasan, menekankan pada perencanaan pengawasan yang responsif terhadap dinamika pemangku kepentingan dan pelaporan yang efektif kepada manajemen puncak. Elemen keempat adalah Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya, yang memastikan tersedianya anggaran, SDM yang kompeten, dan dukungan teknologi informasi yang memadai sesuai dengan beban kerja pengawasan. Terakhir, elemen Budaya dan Hubungan Organisasi menjadi fondasi integrasi, di mana APIP harus membangun budaya integritas, kualitas komunikasi, serta koordinasi yang baik dengan pihak eksternal agar dampak pengawasannya dapat diandalkan.

Keberhasilan peningkatan kapabilitas APIP sangat bergantung pada komitmen pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pimpinan instansi diwajibkan memberikan dukungan nyata dalam bentuk

pemantauan arahan, pemberian akses informasi seluas-luasnya bagi APIP, menjaga independensi dan objektivitas pengawasan, serta menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Di sisi lain, pimpinan unit APIP bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan peningkatan kapabilitas di lingkungan masing-masing. BPKP dalam hal ini memegang peran sentral sebagai instansi pembina yang bertugas melakukan evaluasi secara berkala dan memberikan pembinaan berkelanjutan. Sinergi ini dirancang untuk memastikan bahwa APIP tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat di mata pimpinan organisasi.

Salah satu perubahan paling signifikan dalam peraturan ini adalah pergeseran paradigma penilaian dari yang sebelumnya bersifat administratif menjadi evaluasi yang berorientasi pada pengujian substansi. Evaluasi kapabilitas APIP yang dilakukan oleh BPKP mencakup analisis bukti pendukung, observasi, wawancara, dan konfirmasi langsung. BPKP menetapkan bobot penilaian yang mencerminkan prioritas pengawasan, di mana elemen Kualitas Peran dan Layanan mendapatkan porsi terbesar yaitu 40%.

Bobot terbesar tersebut menunjukkan bahwa manfaat nyata dari hasil pengawasan menjadi indikator utama keberhasilan APIP. Elemen Profesionalisme Penugasan dan Manajemen Pengawasan masing-masing diberikan bobot 20%, sementara elemen pendukung lainnya seperti Pengelolaan Kinerja dan Budaya Organisasi masing-masing berbobot 10%. Proses evaluasi ini dilakukan setahun sekali, namun dapat dilakukan sewaktu-waktu jika terjadi kasus korupsi yang signifikan, restrukturisasi organisasi, atau perubahan kebijakan besar di instansi tersebut.

Peraturan ini secara eksplisit mendorong APIP untuk mengadopsi teknologi informasi dalam setiap tahapan bisnisnya. Pada level yang lebih tinggi, APIP diharapkan mampu memanfaatkan *Data Science* dan *Data Modelling* untuk melakukan analisis prediktif dan deteksi dini risiko kecurangan secara otomatis. Transformasi digital ini bertujuan untuk mengubah pola komunikasi

hasil pengawasan menjadi lebih interaktif dan berorientasi pada *foresight*. Dengan dukungan teknologi, APIP diharapkan dapat melaksanakan *Continuous Auditing* dan *Continuous Monitoring* (CACM), sehingga pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan instansi didasarkan pada data yang mutakhir dan akurat. Hal ini menjadi sangat penting mengingat tantangan integritas sektor publik yang masih dinilai rapuh, sebagaimana dicatat dalam proses aksesi OECD.

Pemberlakuan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 diikuti dengan masa transisi dari tahun 2025 hingga awal 2026. Selama masa transisi ini, evaluasi kapabilitas APIP dan penjaminan kualitasnya tidak lagi mempertimbangkan level kapabilitas yang diperoleh di bawah peraturan lama. Hal ini bertujuan untuk memberikan titik awal yang adil bagi seluruh APIP untuk menyesuaikan diri dengan kriteria baru yang lebih ketat dan bermakna. Secara keseluruhan, peraturan ini diharapkan menjadi panduan bagi penyusunan *roadmap* peningkatan kapabilitas yang efektif bagi setiap APIP kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuan akhirnya adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pengawasan intern yang adaptif dan memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian target pembangunan nasional Indonesia.

Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian target sebagai berikut:

Semula			**Menjadi**			**Justifikasi**
Sasaran Kegiatan	**Indikator**	**Target 2025**	**Sasaran Kegiatan**	**Indikator**	**Target 2025**	
Terwujudnya Organisasi Inspektorat I yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,9	Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	**Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar**	**100%**	**Indikator dan Target:** Indikator baru yang lebih menggambarkan dalam mewujudkan organisasi Inspektorat I yang profesional dan merupakan lingkup persempit dari IKU Eselon I

Dari target di atas, capaian indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian di Tahun 2025
Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	100%	100%	100,00%

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I

Anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp11.169.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.168.175,00 (99.9926%) yang terdiri dari pembayaran kegiatan ke penyelenggara serta dukungan perjalanan dinas. Untuk mendukung elemen ini telah diikuti 11th *International Conference on Contemporary Social and Political Affairs* dengan tema "*Power Structures and Ethical Imperatives of Artificial Intelligence in a Fragmented Global Order*" yang berlangsung di Universitas Airlangga, Surabaya. Dalam kegiatan ini dipaparkan hasil riset tentang kesiapan penggunaan AI di lingkungan Inspektorat Utama BPOM. Selain itu, terdapat anggaran yang dikeluarkan untuk memperoleh nilai Bahasa Inggris dari sejumlah kecil pegawai di Inspektorat I guna menjadi justifikasi dalam proses pengembangan kompetensi ke depannya.

Secara khusus riset yang dibawakan dalam *International Conference* di Surabaya substansinya adalah tentang organisasi baik di sektor publik maupun bisnis yang mulai memanfaatkan AI untuk mengatasi berbagai permasalahan operasional dan mengkapitalisasi peluang baru. Dalam konteks sektor publik, AI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memaksimalkan alokasi sumber daya, dan menyediakan layanan yang lebih berpusat pada kebutuhan masyarakat.

Gelombang transformasi ini juga menyentuh fungsi-fungsi yang secara tradisional dianggap konservatif, seperti fungsi audit. Ada ekspektasi tinggi bahwa AI dapat mengubah prosedur audit secara total, mulai dari penilaian risiko hingga proses pengumpulan bukti. Meskipun demikian, jalan menuju

adopsi AI tidaklah mudah dan penuh dengan hambatan. Tingginya tingkat kegagalan dalam inisiatif penerapan teknologi menunjukkan bahwa organisasi harus benar-benar siap sebelum melangkah lebih jauh.



Gambar 30. Ilustrasi Penelitian AI Readiness

Kesiapan ini menjadi sangat relevan bagi sektor publik, terutama dalam fungsi audit internal yang implementasi teknologinya masih berada pada tahap awal. Kompleksitas teknologi AI, keberadaan sistem warisan, dan gerak birokrasi yang lambat menjadi tantangan signifikan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, sebuah organisasi wajib memahami kesiapan internalnya sendiri sebelum mencoba mengintegrasikan AI secara sukses guna menghindari pemborosan sumber daya dan kegagalan proyek.

Penelitian bertujuan untuk menguji status kesiapan AI pada Inspektorat di BPOM. Sebagai bagian dari pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan, BPOM memiliki peran krusial yang didukung oleh kantor-kantor regional di seluruh negeri. Penilaian kesiapan ini difokuskan pada empat dimensi kritis: manusia, proses, teknologi, dan lingkungan organisasi.

Meskipun literatur mengenai dampak AI pada audit mulai berkembang, studi empiris mengenai kesiapan AI pada irisan spesifik di sektor publik masih tergolong langka. Dalam sejarahnya, penggunaan alat bantu dalam audit bukanlah hal baru, namun AI modern menuntut kompetensi yang jauh lebih maju dibandingkan sistem pakar terdahulu. Auditor internal saat ini dituntut untuk menguasai keterampilan baru dalam analitik data, statistik, dan tata kelola AI agar dapat memberikan penilaian risiko yang lebih akurat. Keberhasilan adopsi ini tidak hanya bergantung pada keahlian individu auditor, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel internal organisasi seperti kepemimpinan yang kuat, infrastruktur TI yang mumpuni, serta ketersediaan data berkualitas tinggi. Di sektor publik, tantangan ini sering kali diperparah oleh adanya silo data dan kurangnya literasi AI di kalangan pegawai negeri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk membedah persepsi auditor di BPOM melalui kuesioner daring. Data dikumpulkan dari seluruh populasi yang berjumlah 99 auditor di lingkungan Inspektorat Utama BPOM, sebuah entitas yang sebenarnya telah memiliki tingkat kapabilitas internal audit yang cukup tinggi dengan rating IACM 3,77. Instrumen penelitian disusun berdasarkan model empat dimensi yang mencakup kesiapan manusia (literasi dan kemauan), kesiapan proses (penyelarasan alur kerja), kesiapan teknologi (infrastruktur dan tata kelola data), serta kesiapan lingkungan organisasi (dukungan kepemimpinan dan anggaran). Profil responden menunjukkan komposisi yang menarik, di mana terdapat pergeseran demografis yang signifikan. Mayoritas tenaga kerja, yakni sekitar 65%, terdiri dari auditor muda maupun CPNS dengan masa kerja di bawah lima tahun. Di sisi lain, kelompok auditor senior yang memiliki pengalaman lebih dari sepuluh tahun berjumlah lebih sedikit, namun memegang peran kunci. Kehadiran generasi baru yang lebih "melek digital" ini menjadi aset potensial bagi perubahan teknologi, namun di saat yang sama menekankan pentingnya program transfer pengetahuan dari staf senior yang memahami seluk-beluk birokrasi dan hambatan sistemik secara mendalam.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, tingkat kesiapan AI di Fungsi Audit Internal BPOM berada pada level moderat. Dimensi kesiapan manusia muncul sebagai elemen yang paling positif, dengan 50% responden menilainya pada tingkat "Tinggi" atau "Sangat Baik". Hal ini mengindikasikan bahwa auditor secara individu merasa siap dan memiliki kemauan untuk belajar serta beradaptasi dengan teknologi AI.

Optimisme pada aspek sumber daya manusia ini tidak sebanding dengan kesiapan pada dimensi lainnya. Kesiapan proses dan teknologi secara dominan dinilai berada pada level moderat, masing-masing sebesar 48% dan 51%. Temuan ini memberikan sinyal kuat adanya kesenjangan antara kemauan tenaga kerja dengan kemampuan sistem organisasi dalam mendukung AI.

Kesiapan lingkungan organisasi juga berada di tingkat moderat, yang menunjukkan bahwa meskipun tidak ada penolakan terang-terangan, dukungan aktif dan visi strategis dari kepemimpinan mungkin masih belum dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan pegawai. Organisasi saat ini berada di persimpangan jalan, di mana kesadaran akan perubahan teknologi sudah ada, namun mobilisasi sumber daya secara menyeluruh belum sepenuhnya terjadi.

Salah satu temuan paling krusial dalam studi ini adalah adanya perbedaan persepsi yang tajam berdasarkan masa kerja auditor. Auditor yang baru bergabung cenderung menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang jauh lebih tinggi terhadap kesiapan organisasi di semua dimensi. Sebaliknya, auditor senior yang telah memiliki pemahaman mendalam tentang alur kerja institusi memberikan penilaian yang jauh lebih hati-hati dan cenderung pesimis, terutama pada aspek teknologi dan proses. Ketidaksesuaian ini bukan disebabkan oleh kurangnya keterampilan di pihak senior, melainkan karena mereka lebih menyadari hambatan nyata seperti kualitas data yang buruk, sistem warisan yang sulit diintegrasikan, prosedur yang kaku, serta hambatan birokrasi lainnya. Sebagai contoh, pada kesiapan teknologi,

persepsi mengenai kesiapan yang tinggi menurun drastis seiring bertambahnya pengalaman kerja auditor. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi organisasi saat ini menjadi hambatan utama. Sementara auditor muda melihat potensi masa depan, auditor senior memberikan peringatan mengenai perlunya investasi mendasar pada sistem TI dan tata kelola data sebelum implementasi AI dilakukan.

Sebagai kesimpulan, Fungsi Audit Internal BPOM memiliki modal awal yang kuat berupa sumber daya manusia yang antusias dan siap secara individu, namun hal ini dibatasi oleh dukungan sistemik yang masih tertinggal. Penelitian ini menegaskan bahwa kesiapan AI bersifat multidimensi, dan keberhasilan tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan keinginan pegawai tanpa adanya infrastruktur yang memadai. Secara praktis, studi ini menjadi alat diagnostik bagi BPOM untuk memprioritaskan modernisasi teknologi dan rekayasa ulang proses bisnis audit.

Rekomendasi utama bagi kepemimpinan adalah segera menyusun strategi jangka panjang adopsi AI yang jelas, yang mencakup alokasi anggaran khusus dan pembentukan tim proyek untuk mengatasi hambatan teknis. Selain itu, sangat penting bagi manajemen untuk menjembatani kesenjangan persepsi antara staf junior dan senior melalui dialog transparan, sehingga optimisme generasi muda dapat dipadukan dengan kebijaksanaan praktis para veteran dalam merancang rencana transformasi yang realistis. Bagi organisasi sektor publik lainnya, penelitian ini berfungsi sebagai pengingat untuk melakukan penilaian kesiapan secara holistik guna memastikan bahwa tenaga kerja yang bersedia didukung oleh sistem yang mumpuni, demi menjamin keberhasilan integrasi teknologi di masa depan.

b. Nilai Telaah Sejawat Inspektorat I

Indikator Nilai telaah sejawat intern merupakan proses evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh auditor internal lain (rekan sejawat) untuk menilai kualitas pekerjaan audit internal. Proses ini biasa dikenal dengan *Peer*

Review Internal atau *Quality Assurance Review* (QAR), dan merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu audit internal. Nilai telaah sejawat intern berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.6.06.5.2657 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern, Standar Audit Intern Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern.

Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian target sebagai berikut:

Semula			**Menjadi**			**Justifikasi**
Sasaran Kegiatan	**Indikator**	**Target 2025**	**Sasaran Kegiatan**	**Indikator**	**Target 2025**	
Terwujudnya Organisasi Inspektorat I yang profesional	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88,48	Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	**Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I**	**82,8**	**Indikator dan Target:** Merupakan indikator baru yang lebih menggambarkan dalam mewujudkan organisasi Inspektorat I yang profesional. Penentuan target berdasarkan nilai TSE pada tahun 2020 dan 2024.

Dari target di atas, capaian indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian di Tahun 2025
Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	82,8	86,36	104,30%

Adapun kegiatan yang mendukung indikator ini adalah:

Kerja Sama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L

Kegiatan ini dirancang sebagai wadah strategis untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi pengawasan di seluruh lini pemerintahan dalam rangka mewujudkan Inspektorat I yang profesional. Melalui kolaborasi lintas program dan lintas sektor, terjadi integrasi sumber daya serta penyelarasan metodologi kerja. Fokus utamanya adalah membangun komunikasi yang solid sehingga setiap risiko penyimpangan dapat dideteksi lebih dini dan dikelola secara kolektif demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang

bersih dan transparan. Selain sebagai sarana koordinasi, kerja sama ini juga berfungsi sebagai platform pertukaran data dan praktek terbaik dalam menghadapi tantangan pengawasan yang semakin kompleks. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam satu visi pengawasan yang terpadu, efektivitas pengendalian terhadap program-program strategis dapat meningkat secara signifikan. Anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp18.400.000,00 dengan realisasi 100%.

BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

Dinamika kegiatan pengawasan intern yang diselenggarakan oleh Inspektorat I pada tahun 2025 menjadi tantangan signifikan dalam upaya pencapaian tujuan. Penambahan personil CPNS secara signifikan menjadi hal yang harus dihadapi bersamaan dengan Inpres 1 Tahun 2025. Melalui segenap upaya bersama, maka berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam program dapat dilaksanakan secara memadai. Secara lebih lengkap untuk kesimpulan dari capaian kinerja dapat dibaca pada Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun Anggaran 2025.

2. Saran

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi, maka disarankan adanya beberapa perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Aspek perbaikan pertama adalah peningkatan frekuensi maupun rutinitas evaluasi kinerja dengan diupayakan untuk dilakukan setiap bulan sehingga capaian kinerja dapat dipantau secara rutin dan aktivitas tidak menumpuk di akhir tahun. Aspek perbaikan kedua adalah peningkatan kapabilitas dari personil yang mengelola kegiatan serta peningkatan *ownership* dari personil pada program dan anggaran.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data BMN Inspektorat Utama

NO	NAMA BARANG	2021	2022	2023	2024	2025
Aset Tetap						
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3	Lemari Penyimpan	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	0 unit
4	Mesin Penghitung Uang	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
5	Lemari Besi/Metal	27 unit	27 unit	19 unit	24 unit	24 unit
6	Lemari Kayu	44 unit	44 unit	44 unit	62 unit	20 unit
7	Brankas	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8	Buffet	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
9	Locker	5 unit	5 unit	0 unit	0 unit	0 unit
10	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	0 unit
11	Alat Penghancur Kertas	7 unit	8 unit	8 unit	9 unit	8 unit
12	Laser pointer			1 unit	1 unit	1 unit
13	LCD Projector/Infocus	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
14	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15	Meja Kerja Kayu	30 unit	67 unit	63 unit	68 unit	71 unit
16	Kursi Besi/Metal	84 unit	84 unit	84 unit	133 unit	141 unit
17	Kursi Kayu	6 unit	6 unit	0 unit	0 unit	0 unit
18	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
19	Meja Rapat	2 unit	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit
20	Tempat Tidur Kayu	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
21	Kasur/Spring Bed	0 unit	0 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
22	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit
23	Workstation	6 unit	5 unit	10 unit	6 unit	10 unit
24	Air Cleaner	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
25	Lemari Es	3 unit	3 unit	2 unit	3 unit	2 unit
26	Kompor Listrik	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
27	Rice Cooker	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
28	Teko Listrik	2 unit	3 unit	3 unit	0 unit	0 unit
29	Oven Listrik	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
30	Blender	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
31	Televisi	3 unit	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit
32	Dispenser	8 unit	8 unit	16 unit	17 unit	16 unit
33	Coffee Maker	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
34	Karpet	0 unit	0 unit	0 unit	3 unit	3 unit
35	Lampu Belajar	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
36	Audio Mixing Console	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
37	Microphone/ Wireless MIC	0 unit	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit
38	Voice Recorder	3 unit	3 unit	10 unit	10 unit	10 unit
39	Video Mixer	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
40	Tripod Camer	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
41	Camera Digital	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
42	Camera Conference	1 unit	3 unit	5 unit	5 unit	5 unit
43	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
44	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit
45	Kursi Zeis	14 unit	14 unit	14 unit	0 unit	0 unit

NO	NAMA BARANG	2021	2022	2023	2024	2025
46	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
47	Microwave Oven	0 unit	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit
48	Screen Pembatas	0 unit	19 unit	19 unit	19 unit	0 unit
49	P.C Unit	38 unit	45 unit	42 unit	35 unit	35 unit
50	Notebook	94 unit	105 unit	109 unit	101 unit	121 unit
51	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
52	Speaker Komputer	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
53	Monitor			1 unit	1 unit	1 unit
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	44 unit	48 unit	48 unit	37 unit	37 unit
55	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit
56	Server	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit
57	Software Komputer	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit	0 unit
58	Monografi	144 unit	114 unit	114 unit	0 unit	0 unit
59	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	0 unit	0 unit

Lampiran 2

Pengembangan SDM Tahun 2025

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Adam P.W.A Wibowo, S.H., M.H.	Inspektur I	TW2	E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital	14
Adam P.W.A Wibowo, S.H., M.H.	Inspektur I	TW4	Workshop Metodologi, Teknik Investigasi dan Pengungkapan Kasus-Kasus Fraud di Best Western Premier La Grande; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	25
Abrar Rabbani Putra Ramadana, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW1	E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Leader Dialogue: Kesehatan Jiwa, Raga, dan Harta dalam Membentuk Budaya BerAKHLAK; Sosialisasi Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Pemutakhiran BMN Tahunan Tahun 2024; Sosialisasi Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Pemutakhiran BMN Tahunan Tahun 2024; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	27
Abrar Rabbani Putra Ramadana, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW2	Enterprise Arsitektur SPBE	2
Abrar Rabbani Putra Ramadana, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW3	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2025 untuk RKAKL Tahun Anggaran 2027	5
Abrar Rabbani Putra Ramadana, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW4	E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	10
Agus Sulisno, S.Si, Apt	Auditor Ahli Madya	TW1	E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	14
Agus Sulisno, S.Si, Apt	Auditor Ahli Madya	TW2	E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Sistem Manajemen Risiko; Perekat Bangsa Tingkat Dasar; Reviu Laporan Keuangan; Enterprise Arsitektur SPBE; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	16
Agus Sulisno, S.Si, Apt	Auditor Ahli Madya	TW4	E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Sistem Manajemen Risiko; Perekat Bangsa Tingkat Dasar; Reviu Laporan Keuangan; Enterprise Arsitektur SPBE; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP; Sistem Manajemen POM Terintegrasi	41
Aisyah Salsabila Lubis, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Goal Setting / Penetapan Tujuan; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital; Kerja sama dan diskusi kelompok dalam penyusunan laporan dan bahan presentasi hasil orientasi CPNS; Reviu Laporan Penugasan Akhir; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; E-Learning Membangun Budaya Digital; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Sistem Manajemen Risiko; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pelatihan PBJ Tingkat Dasar model MOOC Tahun 2025; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN	213
Aisyah Salsabila Lubis, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Penilaian Kapabilitas APIP; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025; Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender; Sosialiasi Strategi Akselerasi Peran BPOM dalam Mendukung Pembangunan Nasional melalui Penerbitan Izin Edar kepada UMKM	131

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Aisyah Salsabila Lubis, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Webinar mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO); Webinar mengenai âInteraksi, Bias, dan Partisipasi Aktif Bermakna Pada Disabilitasâ; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	742
Alexander Arie Sanata Dharma S, S.Farm., Apt., M.A.	Auditor Ahli Muda	TW1	Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025; E-Learning Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja 2024; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) Untuk Umum; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Sistem Manajemen Risiko; E-Learning Membangun Budaya Digital; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; Dukungan BPOM untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	88
Alexander Arie Sanata Dharma S, S.Farm., Apt., M.A.	Auditor Ahli Muda	TW2	WHO Listed Authority (WLA); Pengembangan Diri dan Orang Lain Tingkat Dasar; Reviu Pengawasan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	6
Alexander Arie Sanata Dharma S, S.Farm., Apt., M.A.	Auditor Ahli Muda	TW3	E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Teknik Menulis Opini dan Menembus Redaksi KOMPAS; Webinar Komunikasi Inklusif di Tengah Keberagaman Neurologis; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Sosialiasi Strategi Akselerasi Peran BPOM dalam Mendukung Pembangunan Nasional melalui Penerbitan Izin Edar kepada UMKM	24
Alexander Arie Sanata Dharma S, S.Farm., Apt., M.A.	Auditor Ahli Muda	TW4	#JadiPaham Konflik Kepentingan; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Optimalisasi AI untuk Penyusunan Telaahan Staf, Naskah Akademik, dan Penelitian; Digital Forensics in Internal Audit: From Data to Evidence; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Dasar-dasar dan Penggunaan Generative AI; Kebijakan PDLN dan Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan PDLN; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	49
Aliyana Salma Nafisya, S.Tr.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; E-Learning Etika Komunikasi Digital; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Penetapan Tujuan ke Depan; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Sistem Manajemen Risiko; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital; Kerja sama dan diskusi kelompok dalam penyusunan laporan dan bahan presentasi hasil orientasi CPNS; Penyelesaian Laporan Orientasi CPNS; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Budaya Digital; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar model MOOC Tahun 2025; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	215
Aliyana Salma Nafisya, S.Tr.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Pelatihan PBJ Level-1 model MOOC Batch 2 Tahun 2025, Penilaian Kapabilitas APIP | BPOM | 2025, E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki, Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill, Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025, Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan, Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar, Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP, Sistem Manajemen POM Terintegrasi, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM), Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset, Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis	112

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Aliyana Salma Nafisya, S.Tr.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	723
Alya Dini Nabila Rachmawati, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Penetapan Tujuan ;Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024 ;Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital ;E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN ;E-Learning Membangun Budaya Digital ;E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital ;E-Learning Etika Komunikasi Digital ;E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital ;Pelatihan PBJ Tingkat Dasar model MOOC Tahun 2025 ;Kerja sama dan diskusi kelompok dalam penyusunan laporan dan bahan presentasi hasil orientasi CPNS ;Review Laporan Penugasan Akhir ;E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital ;E-Learning Budaya Digital ;Sistem Manajemen Risiko ;Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan ;Core Value BerAKHLAK : Akuntabel ;Core Value BerAKHLAK : Harmonis ;Core Value BerAKHLAK : Kompeten ;Core Value BerAKHLAK : Loyal ;Core Value BerAKHLAK : Adaptif ;Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif ;Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 ;Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM ;Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN	213
Alya Dini Nabila Rachmawati, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; Penilaian Kapabilitas APIP | BPOM | 2025; #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rejeki; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis	108
Alya Dini Nabila Rachmawati, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW4	#JadiPaham Konflik Kepentingan; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; MOOC Inklusif Penyandang Disabiliitas dan Bahasa Isyarat Sederhana bagi Tenaga Kesehatan; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	708
Annisa Wulandari, S.H	Auditor Ahli Pertama	TW2	Penetapan Tujuan ke Depan; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, Manajemen Risiko, dan Literasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Core Value BerAKHLAK : Loyal; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; Sistem Manajemen Risiko; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Kerja sama dan diskusi kelompok dalam penyusunan laporan dan bahan presentasi hasil orientasi CPNS; Penyelesaian Laporan Orientasi CPNS; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar Model MOOC Tahun 2025; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN	211
Annisa Wulandari, S.H	Auditor Ahli Pertama	TW3	Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Microskill; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Penilaian Kapabilitas APIP; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender; Sosialiasi Strategi Akselerasi Peran BPOM dalam Mendukung Pembangunan Nasional melalui Penerbitan Izin Edar kepada UMKM	118

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Annisa Wulandari, S.H	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Pelatihan Antikorupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Webinar mengenai âInteraksi, Bias, dan Partisipasi Aktif Bermakna Pada Disabilitasâ; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Massive open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	740
Bagus Pribadi Hermawan, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW1	E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Dukungan BPOM untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	20
Bagus Pribadi Hermawan, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW2	Reviu Laporan Keuangan; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online	4
Bagus Pribadi Hermawan, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW3	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025; Sosialisasi Anti Penyuapan, Gratifikasi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan POM Tahun Anggaran 2025; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning PengarusutamaanGender (PUG); Sosialisasi SOP Makro PengawasanÂ Intern; Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender; Sosialiasi Strategi Akselerasi Peran BPOM dalam Mendukung Pembangunan Nasional melalui Penerbitan Izin Edar kepada UMKM	29
Bagus Pribadi Hermawan, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW4	Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Optimalisasi AI untuk Telaahan Staf, Naskah Akademik, serta Penelitian; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	25
Chelly Aprilia Wardhani, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Sistem Manajemen Risiko; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pencapaian Target/ Goal Setting; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Kerja sama dan diskusi kelompok dalam penyusunan laporan dan bahan presentasi hasil orientasi CPNS; Review Laporan Penugasan Akhir; E-Learning Membangun Budaya Digital; Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar Model MOOC Tahun 2025; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN	213
Chelly Aprilia Wardhani, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Penilaian Kapabilitas APIP; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; Pelatihan PBJP Level-1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; #JadiPaham Gratifikasi Itu Bukan Rezeki; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender	114
Chelly Aprilia Wardhani, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	708

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Daniel Saito Batubara, A.Md.T.	Auditor Terampil	TW2	E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar Model MOOC Tahun 2025; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Pemahaman tentang Tugas Pokok Unit Kerja, Manajemen Resiko dan Literasi Digital; Pendalaman Materi Pada Ruang Lingkup Inspektorat I; Pendalaman Materi Pada Ruang Lingkup Inspektorat I; 1. Pemahaman jabatan dan unit kerja; 2. Pemahaman Manajerial; Pemahaman terhadap struktur organisasi, fungsi unit kerja, serta peran dan tanggung jawab jabatan melalui kegiatan orientasi CPNS di BPOM; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pemahaman Mendetail Tentang Fungsi dan Peran Jabatan Auditor, Unit Inspektorat I dan Gugus Tugas.; Sistem Manajemen Risiko; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	215
Daniel Saito Batubara, A.Md.T.	Auditor Terampil	TW3	Implementasi dan Dampak Artificial Intelligence; Society 5.0; Jadi Paham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Mengenal Artificial Intelligence; E-Learning Penggunaan Generative AI (ChatGPT) dalam Pengawasan Obat dan Makanan; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Membangun Pola Pikir yang Adaptif dan Terbuka; Scientific Decision Making; Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online; Penilaian Kapabilitas APIP; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi SOP Makro PengawasanÂ Intern; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis	126
Daniel Saito Batubara, A.Md.T.	Auditor Terampil	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Webinar mengenai âInteraksi, Bias, dan Partisipasi Aktif Bermakna Pada Disabilitasâ; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan II	709
Dean Bermana Karosekali, S.E	Auditor Ahli Pertama	TW2	Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Sistem Manajemen Risiko; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Penetapan/Pencapaian Tujuan; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar; Pemahaman Tugas dan Laporan Presentasi OJT; Melakukan reviu laporan; E-Learning Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja 2024; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	216

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Dean Bermana Karosekali, S.E	Auditor Ahli Pertama	TW3	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Pelatihan Kompetensi PBJP Level -1; Jadi Paham Gratifikasi Itu Bukan Rezeki; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; Overview Penilaian Kapabilitas APIP; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis	98
Dean Bermana Karosekali, S.E	Auditor Ahli Pertama	TW4	Jadi Paham Konflik Kepentingan; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	690
Dhika Yoga Saputra, S.E.	Perencana Ahli Pertama	TW1	Quality Management Systems (QMS) Implementation Training Course (ISO 9001:2015); ISO 9001:2015 Requirements Training Course; Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja 2024	41
Dhika Yoga Saputra, S.E.	Perencana Ahli Pertama	TW2	Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Pengendalian Intern Pemerintah; E-Learning Etika Komunikasi Digital; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Orientasi PPPK Tahap I BPOM 2025; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	43
Dhika Yoga Saputra, S.E.	Perencana Ahli Pertama	TW3	Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Gratifikasi itu Bukan Rezeki; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sosialisasi Core Values BerAKHLAK; Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Badan POM Tahun 2025; Seminar Psikoedukasi Overthinking dan Kecemasan : Cara Otak Menjebak Kita & Bagaimana Mengatasinya; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar; Workshop Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2026; Sosialisasi SOP Makro PengawasanÂ Intern; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender; Sosialiasi Strategi Akselerasi Peran BPOM dalam Mendukung Pembangunan Nasional melalui Penerbitan Izin Edar kepada UMKM; Massive Open Online Course (MOOC) LAN; Penilaian Kapabilitas APIP	152
Dhika Yoga Saputra, S.E.	Perencana Ahli Pertama	TW4	Konflik Kepentingan; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Jauhi Sarkopenia Ketahui Nutrisi dan Suplemen yang Tepat; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Sosialisasi Proses Ijin Melakukan Perceraian ASN; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Webinar mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO); Webinar mengenai âInteraksi, Bias, dan Partisipasi Aktif Bermakna Pada Disabilitasâ; Cara Praktis & Aman bagi ASN untuk Mempercepat Analisis Data dengan Copilot AI; Trik Cepat Bikin Infografis dan Visualisasi Materi Sosialisasi dengan Copilot AI; Kuasai Copilot AI dari Microsoft: Cara Cepat Menyelesaikan Pekerjaan Berulang & Administrasi Harian; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	50
Dhimas Haryo Kuncoro, S.H.	Auditor Ahli Pertama	TW1	E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; Sistem Manajemen Risiko; Dukungan BPOM untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	26
Dhimas Haryo Kuncoro, S.H.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Enterprise Arsitektur SPBE	2
Dhimas Haryo Kuncoro, S.H.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	2
Dhimas Haryo Kuncoro, S.H.	Auditor Ahli Pertama	TW4	Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	22

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Ditha Rizki Lestari, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Goal Setting/ Penetapan Tujuan; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar model MOOC Tahun 2025; Kerja sama dan diskusi kelompok dalam penyusunan laporan dan bahan presentasi hasil orientasi CPNS; Review laporan penugasan akhir; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Sistem Manajemen Risiko; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN	215
Ditha Rizki Lestari, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; Pelatihan Anti korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP); E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025; Penilaian Kapabilitas APIP BPOM 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender	164
Ditha Rizki Lestari, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialisasi Proses Ijin Melakukan Perceraian ASN; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Webinar mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO); Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	710
Elia Gustimona, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW1	E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Leader Dialogue: Kesehatan Jiwa, Raga, dan Harta dalam Membentuk Budaya BerAKHLAK; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital	9
Elia Gustimona, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW2	E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Mengelola Perubahan Tingkat Dasar; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Budaya Digital	10
Elia Gustimona, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	8

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Emiya Ibrena Br Sembiring, A.Md	Auditor Terampil	TW2	Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Sistem Manajemen Risiko; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen resiko, dan literasi digital; 1. Pemahaman jabatan dan unit kerja 2. Pemahaman manajerial; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; Pendalaman Materi pada Ruang Lingkup Inspektorat I; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Pemahaman terhadap struktur organisasi, fungsi unit kerja, serta peran dan tanggung jawab jabatan melalui kegiatan Orientasi CPNS di BPOM; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar model MOOC Tahun 2025; Pemahaman mendetail tentnag fungsi dan peran jabatan Auditor, Unit Inspektorat I, dan Gugus Tugas; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	207
Emiya Ibrena Br Sembiring, A.Md	Auditor Terampil	TW3	Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset	134
Emiya Ibrena Br Sembiring, A.Md	Auditor Terampil	TW4	#JadiPaham Konflik Kepentingan; Penilaian Kapabilitas APIP | BPOM | 2025; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; MOOC Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan II	733
Ertiza Auli Alghani, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Goal Setting/Penetapan Tujuan; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko dan literasi digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Budaya Digital; Kerja sama dan diskusi kelompok dalam penyusunan laporan dan bahan presentasi hasil orientasi CPNS; Review Laporan Penugasan Akhir; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Sistem Manajemen Risiko; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar model MOOC Tahun 2025; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	213
Ertiza Auli Alghani, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Penilaian Kapabilitas APIP | BPOM | 2025; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; E-learning #JadiPaham Gratifikasi Itu Bukan Rezeki; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	112

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Ertiza Auli Alghani, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Society 5.0; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; MOOC Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; E-Learning Bahasa Inggris Study Luar Negeri : Spending Money; E-Learning Bahasa Inggris Study Luar Negeri : Creative People; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Webinar mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO); Webinar mengenai âInteraksi, Bias, dan Partisipasi Aktif Bermakna Pada Disabilitasâ; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	731
Farizka Dhian Widyartanti, S.H.	Auditor Ahli Madya		Sistem Manajemen Risiko; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Dukungan BPOM untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	12
Farizka Dhian Widyartanti, S.H.	Auditor Ahli Madya		E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Budaya Digital; Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Reviu Laporan Keuangan; Enterprise Arsitektur SPBE; WHO Listed Authority (WLA)	20
Farizka Dhian Widyartanti, S.H.	Auditor Ahli Madya		Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset	6
Farizka Dhian Widyartanti, S.H.	Auditor Ahli Madya		âWebinar Digital Forensics in Internal Audit: From Data to Evidenceâ; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	8
Fikri Jalalluddin, S.Stat	Auditor Ahli Muda		E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Dukungan BPOM untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	16
Fikri Jalalluddin, S.Stat	Auditor Ahli Muda		Pengembangan Diri dan Orang Lain Tingkat Dasar; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025; Integritas Tingkat Lanjutan; Enterprise Arsitektur SPBE; Bimbingan Teknis Online : Coaching dan Mentoring	12
Fikri Jalalluddin, S.Stat	Auditor Ahli Muda		Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	8
Fikri Jalalluddin, S.Stat	Auditor Ahli Muda		E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; E-Learning #JadiPaham Gratifikasi Itu Bukan Rezeki; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	30
Fitria Dewi Renggansih, S.H.	Auditor Ahli Pertama		E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	8
Fitria Dewi Renggansih, S.H.	Auditor Ahli Pertama		E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; Reviu Laporan Keuangan; Enterprise Arsitektur SPBE; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	18
Fitria Dewi Renggansih, S.H.	Auditor Ahli Pertama		E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025; Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender; Sosialiasi Strategi Akselerasi Peran BPOM dalam Mendukung Pembangunan Nasional melalui Penerbitan Izin Edar kepada UMKM	21
Fitria Dewi Renggansih, S.H.	Auditor Ahli Pertama		Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	11
Hans Samuel Joy, S.Ak	Auditor Ahli Pertama	TW1	E-Learning Budaya Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Sosialisasi Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Pemutakhiran BMN Tahunan Tahun 2024; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital	16
Hans Samuel Joy, S.Ak	Auditor Ahli Pertama	TW2	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	6
Hans Samuel Joy, S.Ak	Auditor Ahli Pertama	TW4	Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	24

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Ikhsana Cesarda Rosydanti, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasiÂ digital.; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Sistem Manajemen Risiko; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Komunikasi untuk Presentasi dan Kerja; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar Model MOOC Tahun 2025; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Peraturan JF Auditor Ahli Pertama; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	213
Ikhsana Cesarda Rosydanti, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Pelatihan PBJP Level-1 Model MOOC Tahun 2025; Penilaian Kapabilitas APIP; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender	112
Ikhsana Cesarda Rosydanti, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	721
Irwan Setiawan, S.Si	Auditor Ahli Muda	TW1	E-Learning Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; Sistem Manajemen Risiko; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Dukungan BPOM untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	24
Irwan Setiawan, S.Si	Auditor Ahli Muda	TW2	Pengembangan Diri dan Orang Lain Tingkat Dasar; Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Pengendalian Intern Pemerintah; WHO Listed Authority (WLA); Reviu Pengawasan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	15
Irwan Setiawan, S.Si	Auditor Ahli Muda	TW3	Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat Dan Makanan Terintegrasi Tahun 2025; Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis	14
Irwan Setiawan, S.Si	Auditor Ahli Muda	TW4	Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	52
Istiqomah, S.Si	Auditor Ahli Muda	TW1	E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; Sistem Manajemen Risiko; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	22
Istiqomah, S.Si	Auditor Ahli Muda	TW2	Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; Reviu Laporan Keuangan; WHO Listed Authority (WLA); Membina Kerjasama Tim; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN	13
Istiqomah, S.Si	Auditor Ahli Muda	TW3	Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG)	6
Istiqomah, S.Si	Auditor Ahli Muda	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	13

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Izzati Karna Wastitya, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW2	E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; E-Learning Etika Komunikasi Digital; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Sistem Manajemen Risiko; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital.; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar model MOOC Tahun 2025; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Budaya Digital; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Komunikasi untuk presentasi dan kerja; Peraturan JF Auditor Ahli Pertama; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	213
Izzati Karna Wastitya, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Penilaian Kapabilitas APIP BPOM; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Program Sertifikat Pengadaan Publik (CPPP); Character Building Tangkal Bahaya Judi Online; Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender	114
Izzati Karna Wastitya, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	688
Lilis Dyan Tika, S.E	Auditor Ahli Pertama	TW1	E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Sosialisasi Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Pemutakhiran BMN Tahunan Tahun 2024; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Budaya Digital; Sosialisasi Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Pemutakhiran BMN Tahunan Tahun 2024; Sosialisasi Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Pemutakhiran BMN Tahunan Tahun 2024; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Dukungan BPOM untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	32
Lilis Dyan Tika, S.E	Auditor Ahli Pertama	TW2	Enterprise Arsitektur SPBE; WHO Listed Authority (WLA); Bimbingan Teknis Online : Coaching dan Mentoring; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2025 untuk RKAKL Tahun Anggaran 2027; Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Sosialisasi Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Pemutakhiran BMN Tahunan Tahun 2024; E-Learning Budaya Digital; Sistem Manajemen Risiko	42
Lilis Dyan Tika, S.E	Auditor Ahli Pertama	TW3	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2025 untuk RKAKL Tahun Anggaran 2027; Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis	9
Lilis Dyan Tika, S.E	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	11
Liza Eka Putri, S.Farm., Apt.	Auditor Ahli Madya	TW1	Sosialisasi Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Pemutakhiran BMN Tahunan Tahun 2024; E-Learning Budaya Digital; Sistem Manajemen Risiko; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; Dukungan BPOM untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	26

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Liza Eka Putri, S.Farm., Apt.	Auditor Ahli Madya	TW2	CHARACTER BUILDING TANGKAL BAHAYA JUDI ONLINE; Perekat Bangsa Tingkat Dasar; WHO Listed Authority (WLA); Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	8
Liza Eka Putri, S.Farm., Apt.	Auditor Ahli Madya	TW3	E-Learning Persiapan Beasiswa : Pengantar dan Persiapan Post Graduate Life; E-Learning Persiapan Beasiswa : Mencari Tahu Universitas Terbaik; Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset	6
Liza Eka Putri, S.Farm., Apt.	Auditor Ahli Madya	TW4	E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; e-learning#Jadi Paham Konflik Kepentingan; e-learning#Jadi Paham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Digital Forensics in Internal Audit; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	23
M Taufiq Anshori, S.E.	Auditor Ahli Muda	TW1	Sosialisasi Penggunaan TTE pada Aplikasi SIMAKIN; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; Sosialisasi SE Pengelolaan Kinerja dan Peluncuran Aplikasi SIMAKIN 2025; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital	18
M Taufiq Anshori, S.E.	Auditor Ahli Muda	TW2	Pengembangan Diri dan Orang Lain Tingkat Dasar; Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Pengendalian Intern Pemerintah	9
M Taufiq Anshori, S.E.	Auditor Ahli Muda	TW3	Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset	6
M Taufiq Anshori, S.E.	Auditor Ahli Muda	TW4	E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	7
Mahayu Dwi Setyaningrum, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW1	Leader Dialogue: Kesehatan Jiwa, Raga, dan Harta dalam Membentuk Budaya BerAKHLAK; Sosialisasi SE Pengelolaan Kinerja dan Peluncuran Aplikasi SIMAKIN 2025; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Budaya Digital; Sosialisasi Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Pemutakhiran BMN Tahunan Tahun 2024; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	25
Mahayu Dwi Setyaningrum, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW2	Reviu Pengawasan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN	4
Mahayu Dwi Setyaningrum, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW3	Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset	6
Mahayu Dwi Setyaningrum, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW4	Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	7
Maria Dewi Maharani, S.Ak	Auditor Ahli Pertama	TW2	E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Sistem Manajemen Risiko; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar model MOOC Tahun 2025; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen resiko, dan literasi digital; Kemampuan komunikasi untuk pemaparan presentasi hasil orientasi CPNS.; Peraturan JF Auditor Ahli Pertama; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM	209
Maria Dewi Maharani, S.Ak	Auditor Ahli Pertama	TW3	Pelatihan Kompetensi PBJ level-1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; Penilaian Kapabilitas APIP; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Generative AI untuk Peningkatan Kinerja ASN Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2025; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Sosialisasi Core Values BerAKHLAK; Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender; Sosialiasi Strategi Akselerasi Peran BPOM dalam Mendukung Pembangunan Nasional melalui Penerbitan Izin Edar kepada UMKM	163

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Maria Dewi Maharani, S.Ak	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; E-Learning Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja 2024; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; MOOC Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; BIMBINGAN TEKNIS PEKAN MERDEKA PAHLAWAN; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	731
Melva Martua Hutahuruk, S.Farm, Apt	Pelaksana	TW3	Sistem Manajemen Risiko	6
Muhammad Fadlan Husni, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW1	Leader Dialogue: Kesehatan Jiwa, Raga, dan Harta dalam Membentuk Budaya BerAKHLAK; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; Sosialisasi Penggunaan TTE pada Aplikasi SIMAKIN	19
Muhammad Fadlan Husni, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW2	Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025	2
Muhammad Fadlan Husni, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW3	Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Seminar Psikoedukasi Overthinking dan Kecemasan : Cara Otak Menjebak Kita & Bagaimana Mengatasinya; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender	12
Muhammad Fadlan Husni, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW4	Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 3 Tahun 2025; E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	79
Muhammad Ilham Utama, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Sistem Manajemen Risiko; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar Model MOOC Tahun 2025; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital.; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Komunikasi untuk kerja dan presentasi; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Perlu meningkatkan pemahaman terkait peraturan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	215
Muhammad Ilham Utama, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Pelatihan PBJP Level 1 Model MOOC Tahun 2025; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; E-Learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Penilaian Kapabilitas APIP | BPOM | 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Workshop Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2026; Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender	115
Muhammad Ilham Utama, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	738

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Mukhammad Luthfi Nugroho, SE	Auditor Ahli Muda	TW1	Sosialisasi Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Pemutakhiran BMN Tahunan Tahun 2024; Leader Dialogue: Kesehatan Jiwa, Raga, dan Harta dalam Membentuk Budaya BerAKHLAK; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	23
Mukhammad Luthfi Nugroho, SE	Auditor Ahli Muda	TW2	Sistem Manajemen Risiko; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025; Reviu Laporan Keuangan	10
Mukhammad Luthfi Nugroho, SE	Auditor Ahli Muda	TW3	Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat Dan Makanan Terintegrasi Tahun 2025	4
Mukhammad Luthfi Nugroho, SE	Auditor Ahli Muda	TW4	Strategi Kolaboratif Lintas Sektor Dalam Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan Menuju Indonesia Emas Yang Sehat dan Berdaya Saing; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	14
Nabila Emy Mayasari, S.H., M.H.	Auditor Ahli Pertama	TW1	E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Sosialisasi Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Pemutakhiran BMN Tahunan Tahun 2024; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital	18
Nabila Emy Mayasari, S.H., M.H.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Bimbingan Teknis Penilaian Maturitas Pengendalian Intern Pemerintah; E-Learning Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja 2024; Pengembangan Diri dan Orang Lain Tingkat Dasar	18
Nabila Emy Mayasari, S.H., M.H.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sistem Manajemen POM Terintegrasi	4
Nabila Emy Mayasari, S.H., M.H.	Auditor Ahli Pertama	TW4	#JadiPaham Konflik Kepentingan; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	30
Nadhida Sekar Rahmadhani, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW2	E-Learning Membangun Budaya Digital; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital; 1. Pemahaman jabatan dan unit kerja; 2. Pemahaman manajerial; Pendalaman Materi pada Ruang Lingkup Inspektorat I; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Sistem Manajemen Risiko; Pemahaman terhadap struktur organisasi, fungsi unit kerja, serta peran dan tanggung jawab jabatan memlaui kegiatan orientasi CPNS d BPOM; Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar model MOOC Tahun 2025; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pemahaman Mendetail tentang Peran Fungsi dan Peran Jabatan Auditor, Unit Inspektorat I dan GT; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN	213
Nadhida Sekar Rahmadhani, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW3	Penilaian Kapabilitas APIP BPOM 2025; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Tahun 2025; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP); Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis	108

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Nadhida Sekar Rahmadhani, A.Md.Ak.	Auditor Terampil	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Design Thinking; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK; MOOC Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Pengantar Teknologi Informasi; MeLabel POL! - Memahami Label Pangan Olahan; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Webinar mengenai âInteraksi, Bias, dan Partisipasi Aktif Bermakna Pada Disabilitasâ; Meningkatkan Kinerja dengan Kerjasama Tim Level Dasar; Supervisory Development Programme - Negotiation; Supervisory Development Program - Managing Team; Negosiasi, Kepemimpinan, dan Pengembangan Orang Lain; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan II	741
Nafisa Sabrina, A.Md.Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	TW1	E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Budaya Digital; Dukungan BPOM untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	16
Nafisa Sabrina, A.Md.Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	TW2	Pengelolaan Uang Persediaan (UP) Pertanggungjawaban Keuangan Negara; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025; WEBINAR: MENGENALI, MERESPONS DAN MENCEGAH PELECEHAN, EKSPLOITASI, DAN KEKERASAN SEKSUAL (PEKS) DI TEMPAT KERJA; Reviu Pengawasan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	8
Nafisa Sabrina, A.Md.Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	TW3	Sosialisasi Anti Penyuapan, Gratifikasi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan POM Tahun Anggaran 2025; Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender	6
Nafisa Sabrina, A.Md.Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	TW4	Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Webinar mengenai âInteraksi, Bias, dan Partisipasi Aktif Bermakna Pada Disabilitasâ	8
Natasya Adelia Zehra, S.T.	Auditor Ahli Pertama	TW2	E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Sistem Manajemen Risiko; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Komunikasi untuk Presentasi dan Kerja; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar model MOOC Tahun 2025; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital.; Cara Presentasi Hasil Orientasi CPNS BPOM 2025; Pemahaman tentang Peraturan JF Auditor Ahli Pertama; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	213
Natasya Adelia Zehra, S.T.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Penilaian Kapabilitas APIP BPOM 2025; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; E-Learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender	114
Natasya Adelia Zehra, S.T.	Auditor Ahli Pertama	TW4	Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	694

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Niyan Nurin Ridha Putri, A.Md.M.I.D	Arsiparis Terampil		Sosialisasi Penggunaan TTE pada Aplikasi SIMAKIN; Sosialisasi Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BPOM, BPOM: Jelajah Media Tahun 2025	10
Niyan Nurin Ridha Putri, A.Md.M.I.D	Arsiparis Terampil	TW2	E-Learning Budaya Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Reviu Pengawasan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	16
Niyan Nurin Ridha Putri, A.Md.M.I.D	Arsiparis Terampil	TW3	Seminar Nasional Urgensi Penataan Arsip dalam Mewujudkan Tata Kelola Administrasi yang Baik; Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset	6
Niyan Nurin Ridha Putri, A.Md.M.I.D	Arsiparis Terampil	TW4	Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	5
Pramita Ayu Cahya Palupi, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	TW1	E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; Kemenkeu Corporate University Open Class (KCOC) âCoretax bagi Instansi Pemerintah: Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporanâ; E-Learning Budaya Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital	16
Pramita Ayu Cahya Palupi, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	TW2	Membina Kerjasama Tim; Pelatihan Character Building Tangkal Bahaya Judi Online; Pengelolaan Pajak dalam Pembayaran Keuangan Negara; Mekanisme Pencairan dan Pembayaran Keuangan Pengadaan Barang dan Jasa; Reviu Laporan Keuangan; WHO Listed Authority (WLA); RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024; Pengelolaan Uang Persediaan (UP) Pertanggungjawaban Keuangan Negara	20
Pramita Ayu Cahya Palupi, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	TW3	Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Perjalanan Dinas; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Bimbingan Teknis Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan POM Tahun 2025; Sosialisasi Anti Penyuapan, Gratifikasi, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan POM Tahun Anggaran 2025; E-Learning Modul Coretax Registrasi dan Manajemen Akses bagi Instansi Pemerintah (Open Access) Angkatan II Tahun 2025; Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat Dan Makanan Terintegrasi Tahun 2025; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Seminar Psikoedukasi Overthinking dan Kecemasan : Cara Otak Menjebak Kita & Bagaimana Mengatasinya; Sub Control: AP Corner : Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah dalam Mendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik v6 dengan Mekanisme Pembayaran LS Kontraktual; Open Class (AP Corner) Implementasi PER-11/PJ/2025 pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025; Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset	38
Pramita Ayu Cahya Palupi, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Sosialisasi Proses Ijin Melakukan Perceraian ASN; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	16
Rahajeng Anindyajati, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW2	E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Sistem Manajemen Risiko; Komunikasi untuk Presentasi dan Kerja; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital.; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar model MOOC Tahun 2025; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Peraturan JF Auditor Ahli Pertama; Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	213

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Rahajeng Anindyajati, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Penilaian Kapabilitas APIP | BPOM | 2025; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online; E-Learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender; Sosialiasi Strategi Akselerasi Peran BPOM dalam Mendukung Pembangunan Nasional melalui Penerbitan Izin Edar kepada UMKM	160
Rahajeng Anindyajati, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Webinar mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO); Webinar mengenai âInteraksi, Bias, dan Partisipasi Aktif Bermakna Pada Disabilitasâ; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	709
Rana Syifa Medinda, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Sistem Manajemen Risiko; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar model MOOC Tahun 2025; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital.; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Komunikasi untuk Presentasi dan Kerja; Peraturan JF Auditor Ahli Pertama; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM	211
Rana Syifa Medinda, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Penilaian Kapabilitas APIP; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender	114
Rana Syifa Medinda, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Webinar mengenai âInteraksi, Bias, dan Partisipasi Aktif Bermakna Pada Disabilitasâ; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	710

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Rayhan Anandra Kurnia, S.A.P	Auditor Ahli Pertama	TW2	Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Sistem Manajemen Risiko; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); E-Learning PBJ Level Dasar MOOC LKPP; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital; Mengenai Peraturan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama; Persiapan Untuk Meningkatkan Komunkasi Pada Presentasi; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM	209
Rayhan Anandra Kurnia, S.A.P	Auditor Ahli Pertama	TW3	E-Learning PBJ Level-1 MOOC LKPP; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Penilaian Kapabilitas APIP | BPOM | 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Generative AI untuk Peningkatan Kinerja ASN; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Sosialisasi Core Values BerAKHLAK; Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Badan POM Tahun 2025; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender; Sosialiasi Strategi Akselerasi Peran BPOM dalam Mendukung Pembangunan Nasional melalui Penerbitan Izin Edar kepada UMKM	171
Rayhan Anandra Kurnia, S.A.P	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III; Sistem Manajemen Risiko; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Budaya Digital	685
Ricoriady Simamora, S.H.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Sistem Manajemen Risiko; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar Model MOOC Tahun 2025; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital; Pemahaman Jabatan dan Unit Kerja; dan Pemahaman Manajerial; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; Pendalaman Materi Pada Ruang Lingkup Inspektorat I; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Kemampuan Mengenali Struktur dan Tata Kelola Organisasi BPOM; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Pemahaman Mendetail tentang Fungsi dan Peran Jabatan Auditor, Inspektorat 1, dan Gugus Tugas; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	215

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Ricoriady Simamora, S.H.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025; Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Penilaian Kapabilitas APIP BPOM 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender; Sosialiasi Strategi Akselerasi Peran BPOM dalam Mendukung Pembangunan Nasional melalui Penerbitan Izin Edar kepada UMKM	164
Ricoriady Simamora, S.H.	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Webinar mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO); Webinar mengenai âInteraksi, Bias, dan Partisipasi Aktif Bermakna Pada Disabilitasâ; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	705
Rina Dewi Oviliana, S.Ak	Auditor Ahli Pertama	TW2	E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar model MOOC Tahun 2025; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital; 1. Pemahaman jabatan dan unit kerja; 2. Pemahaman manajerial; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Pendalaman Materi pada Ruang Lingkup Inspektorat I; Sistem Manajemen Risiko; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; Pemahaman terhadap struktur organisasi, fungsi unit kerja, serta peran dan tanggungjawab jabatan melalui kegiatan Orientasi CPNS di BPOM; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pemahaman Mendetail tentang Fungsi dan Peran Jabatan Auditor, Unit Inspektorat I, dan Gugus Tugas; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	215
Rina Dewi Oviliana, S.Ak	Auditor Ahli Pertama	TW3	Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Penilaian Kapabilitas APIP | BPOM | 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Pengawasan Tata Kelola Pengembangan Aplikasi SPBE; Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender	150
Rina Dewi Oviliana, S.Ak	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	703

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Ristra Tyas Irviantie, S.Farm., Apt., MPA.	Auditor Ahli Muda	TW1	E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital	4
Ristra Tyas Irviantie, S.Farm., Apt., MPA.	Auditor Ahli Muda	TW2	Sistem Manajemen Risiko; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Budaya Digital	14
Ristra Tyas Irviantie, S.Farm., Apt., MPA.	Auditor Ahli Muda	TW3	Tangkal Bahaya Judi Online; ElevAIte for Civil Servants - Abdimuda; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset	10
Ristra Tyas Irviantie, S.Farm., Apt., MPA.	Auditor Ahli Muda	TW4	Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital	26
Riza Auliarta Ramadhan, S.Ak	Auditor Ahli Pertama	TW1	E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	16
Riza Auliarta Ramadhan, S.Ak	Auditor Ahli Pertama	TW2	Enterprise Arsitektur SPBE; Pengelolaan Pajak dalam Pembayaran Keuangan Negara; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025; Reviu Pengawasan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	8
Riza Auliarta Ramadhan, S.Ak	Auditor Ahli Pertama	TW3	Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	2
Riza Auliarta Ramadhan, S.Ak	Auditor Ahli Pertama	TW4	Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	5
Rizki Jaka Gustiansyah, S.Farm, Apt	Auditor Ahli Pertama	TW1	Sosialisasi Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Pemutakhiran BMN Tahunan Tahun 2024; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	20
Rizki Jaka Gustiansyah, S.Farm, Apt	Auditor Ahli Pertama	TW2	WHO Listed Authority (WLA); Membina Kerjasama Tim; Reviu Pengawasan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN	11
Rizki Jaka Gustiansyah, S.Farm, Apt	Auditor Ahli Pertama	TW3	Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025; Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2025 untuk RKAKL Tahun Anggaran 2027	7
Rizki Jaka Gustiansyah, S.Farm, Apt	Auditor Ahli Pertama	TW4	Sistem Manajemen POM Terintegrasi; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); #JadiPaham Konflik Kepentingan; #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	19
Rizky Oktaviani, S.E.	Auditor Ahli Muda	TW1	E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Sistem Manajemen Risiko; Dukungan BPOM untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	24
Rizky Oktaviani, S.E.	Auditor Ahli Muda	TW2	Enterprise Arsitektur SPBE; WHO Listed Authority (WLA); E-Learning Digitalent Komdigi tentang Character Building Tangkal Bahaya Judi Online; Reviu Pengawasan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	8
Rizky Oktaviani, S.E.	Auditor Ahli Muda	TW4	E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	43
Saarah Halimah Zulfa, S.H.	Auditor Ahli Pertama	TW1	E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Dukungan BPOM untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	16

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Saarah Halimah Zulfa, S.H.	Auditor Ahli Pertama	TW2	WHO Listed Authority (WLA); Reviu Pengawasan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	6
Saarah Halimah Zulfa, S.H.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset	6
Saarah Halimah Zulfa, S.H.	Auditor Ahli Pertama	TW4	Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	28
Saut Rotona Barcio Tuamano, S.Si	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	TW1	E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Sosialisasi Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Pemutakhiran BMN Tahunan Tahun 2024	18
Saut Rotona Barcio Tuamano, S.Si	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	TW3	Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP	4
Saut Rotona Barcio Tuamano, S.Si	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	TW4	Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	5
Sifa Fauzi, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital.; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; 1. Pemahaman jabatan dan unit kerja; 2. Pemahaman manajerial; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; Pendalaman Materi Pada Ruang Lingkup Inspektorat I; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Pemahaman terhadap struktur organisasi, fungsi unit kerja, serta peran dan tanggung jawab jabatan melalui kegiatan Orientasi CPNS di BPOM; Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; E-Learning Etika Komunikasi Digital; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Sistem Manajemen Risiko; Pelatihan PBJ Tingkat Dasar model MOOC Tahun 2025; Pemahaman Mendetail Tentang Fungsi dan Peran Jabatan Auditor, Unit Inspektorat I dan Gugus Tugas; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	215
Sifa Fauzi, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Penilaian Kapabilitas APIP | BPOM | 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender; Sosialiasi Strategi Akselerasi Peran BPOM dalam Mendukung Pembangunan Nasional melalui Penerbitan Izin Edar kepada UMKM	149
Sifa Fauzi, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Webinar mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO); Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	692

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Sinthia Maida Mahsa, S.Ak.	Penata Layanan Operasional	TW2	E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Sosialisasi dan Internalisasi Employeer Branding dan Core Value BerAKHLAK Tingkat Dasar; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Orientasi PPPK Tahap I BPOM 2025	59
Sinthia Maida Mahsa, S.Ak.	Penata Layanan Operasional	TW3	Penilaian Kapabilitas APIP | BPOM | 2025; E-Learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Webinar Komunikasi Inklusif di Tengah Keberagaman Neurologis; Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender; Massive Open Online Course (MOOC) LAN	86
Sinthia Maida Mahsa, S.Ak.	Penata Layanan Operasional	TW4	Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; e-learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	28
Stefanie Erina, S.TP.	Auditor Ahli Pertama	TW1	E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; E-learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Dukungan BPOM untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	18
Stefanie Erina, S.TP.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Komunikasi Risiko; Pengembangan Diri dan Orang Lain Tingkat Dasar; WHO Listed Authority (WLA); Character Building Tangkal Bahaya Judi Online; Reviu Pengawasan dan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	10
Stefanie Erina, S.TP.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Bimbingan Teknis Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan POM Tahun 2025; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM)	10
Stefanie Erina, S.TP.	Auditor Ahli Pertama	TW4	Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	32
Stella Aprilenia Endes, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Sistem Manajemen Risiko; Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; 1. Pemahaman jabatan dan unit kerja 2. Pemahaman manajerial; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; Pendalaman Materi Pada Ruang Lingkup Inspektorat I; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; "Pemahaman terhadap struktur organisasi, fungsi unit kerja, serta peran dan tanggung jawab jabatan" melalui kegiatan Orientasi CPNS di BPOM"; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Kegiatan Pelatihan PBJ Tingkat Dasar Model MOOC Tahun 2025; Pemahaman Mendetail Tentang Fungsi dan Peran Jabatan Auditor Unit Inspektorat 1 dan Gugus Tugas; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN	213

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Stella Aprilenia Endes, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Kegiatan Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 Model MOOC Batch 2 Tahun 2025; Penilaian Kapabilitas APIP BPOM 2025; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement (CPPP) Tahun 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender	116
Stella Aprilenia Endes, S.Ak.	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK); Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	708
Tri Dahus Susanto, SE	Auditor Ahli Muda	TW1	E-Learning Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja 2024; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Budaya Digital; Sistem Manajemen Risiko	29
Tri Dahus Susanto, SE	Auditor Ahli Muda	TW2	Bimbingan Teknis Online : Coaching dan Mentoring; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Sosialisasi Pengawasan PNBP melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan PNBP berbasis Elektronik e-Mawas PNBP	8
Tri Dahus Susanto, SE	Auditor Ahli Muda	TW3	Audit Sistem Manajemen Mutu - ISO 19011 : 2018; Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) - ISO 37001:2016; E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025; Bimbingan Teknis Auditor Internal Batch 2 Tahun 2025; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill Digital Talent Scholarship 2025; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset	53
Tri Dahus Susanto, SE	Auditor Ahli Muda	TW4	E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	22
Wikan Yogi Pratomo, S.E.	Auditor Ahli Madya	TW1	Sosialisasi Penyusunan Laporan BMN dalam rangka Pemutakhiran BMN Tahunan Tahun 2024; Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; Dukungan BPOM untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	32
Wikan Yogi Pratomo, S.E.	Auditor Ahli Madya	TW2	E-Learning Etika Komunikasi Digital; Enterprise Arsitektur SPBE; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Budaya Digital; Loka Karya Pencegahan Konflik kepentingan di Sektor Publik Batch 1; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online	21
Wikan Yogi Pratomo, S.E.	Auditor Ahli Madya	TW3	Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; E Learning Peningkatan dan Pemanhama Gratifikasi bagi Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri; Sosialisasi Pola Karier dan Perubahan Mindset; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender; Sosialiasi Strategi Akselerasi Peran BPOM dalam Mendukung Pembangunan Nasional melalui Penerbitan Izin Edar kepada UMKM	23
Wikan Yogi Pratomo, S.E.	Auditor Ahli Madya	TW4	E-Learning #Jadi Paham Konflik Kepentingan; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	41
Wisnu Pradipta, S.AP.	Auditor Ahli Pertama	TW1	E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Membangun Budaya Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Dukungan BPOM untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	16

Nama Lengkap	Jabatan	TW	Pengembangan Kompetensi	Total JP
Wisnu Pradipta, S.AP.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Sistem Manajemen Risiko; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN	8
Wisnu Pradipta, S.AP.	Auditor Ahli Pertama	TW3	Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Sosialisasi Perselingkuhan di Tempat Kerja Relasi Kuasa atau Ketimpangan Gender	6
Wisnu Pradipta, S.AP.	Auditor Ahli Pertama	TW4	Bimbingan Teknis Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony	20
Yasmin Said Latulanit, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW2	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIMAKIN pada CPNS dan PPPK TA 2024; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital.; E-Learning Membangun Budaya Digital; Pemahaman jabatan dan unit kerja serta pemahaman manajerial; Pendalaman Materi Pada Ruang Lingkup Inspektorat I; E-Learning Kecakapan Digital bagi Aparatur Pemerintah di Era Digital; Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Pemahaman terhadap struktur organisasi, fungsi unit kerja, serta peran dan tanggung jawab jabatan" melalui kegiatan Orientasi CPNS di BPOM; E-Learning Budaya Digital; E-Learning Pengantar Literasi Digital ASN; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital.; Pemahaman tentang tugas pokok unit kerja, manajemen risiko, dan literasi digital.; Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023; Core Value BerAKHLAK : Adaptif; Core Value BerAKHLAK : Akuntabel; Sistem Manajemen Risiko; E-Learning Etika, Keterampilan, dan Keamanan Digital; E-Learning Etika Komunikasi Digital; E-learning Keamanan dan Keselamatan Digital; Core Value BerAKHLAK : Kolaboratif; Core Value BerAKHLAK : Loyal; Core Value BerAKHLAK : Kompeten; Core Value BerAKHLAK : Harmonis; Core Value BerAKHLAK : Berorientasi Pelayanan; Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Dasar model MOOC Tahun 2025; Pemahaman mendetail tentang fungsi dan peran jabatan auditor, Unit Inspektorat I dan Gugus Tugas; Sosialisasi Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN; Pelatihan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil BPOM	213
Yasmin Said Latulanit, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW3	E-learning #JadiPaham Gratifikasi itu Bukan Rezeki; Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level-1 model MOOC Batch 2 Tahun 2025; Character Building Tangkal Bahaya Judi Online Micro Skill; Pelatihan Anti Korupsi dan Pencegahan Korupsi (AKPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa; Penilaian Kapabilitas APIP | BPOM | 2025; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Lanjutan; Peningkatan Profesionalisme dengan Kualitas Pelayanan Publik Level Dasar; Sistem Manajemen POM Terintegrasi; Pemetaan Proses Bisnis dan Penyusunan SOP; E-Learning Pengarusutamaan Gender (PUG); Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM); Sosialisasi Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); Sosialisasi Pengawasan BPOM dalam Penanggulangan Tuberkulosis	123
Yasmin Said Latulanit, S.E.	Auditor Ahli Pertama	TW4	E-Learning Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja 2024; #JadiPaham Konflik Kepentingan; Pelatihan Certificate Programme in Public Procurement; Pelatihan Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi; Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM; Massive Open Online Course (MOOC) Inklusif Penyandang Disabilitas dan Bahasa Isyarat Sederhana Bagi Tenaga Kesehatan; Sosialiasasi Gratifikasi dan Antikorupsi; Ngobrol Penguatan Budaya Integritas - Integrity in Harmony; Pelatihan Dasar CPNS Golongan III	721


BADAN POM